

# PEMBANGUNAN, MARGINALISASI, DAN DISINTEGRASI PAPUA

I Nyoman Sudira, Cahyo Pamungkas, Fachri Aidulsyah,  
Elvira Rumkabu, Yuliana Langowuyo



Didukung oleh



Forum Akademisi  
Untuk Papua Damai







Didedikasikan untuk  
Munir (1965-2004),  
Ade Rostina (1938-2011),  
Muridan S. Widjojo (1967-2014),  
H. S. Dillon (1945-2019),  
Mestika Zed (1955-2019)  
atas perjuangannya menegakkan  
demokrasi dan HAM di Indonesia

# PEMBANGUNAN, MARGINALISASI, DAN DISINTEGRASI PAPUA

I Nyoman Sudira, Cahyo Pamungkas, Fachri Aidulsyah,  
Elvira Rumkabu, Yuliana Langowuyo

Didukung oleh



Forum Akademisi  
Untuk Papua Damai



*Pembangunan, Marginalisasi, dan Disintegrasi Papua*

Penulis: Cahyo Pamungkas, Elvira Rumkabu, Fachri Aidulsyah,  
I Nyoman Sudira, Yuliana Langowuyo

Desain dan ilustrasi sampul: Fikri Hemas Pratama

Tata Letak Isi: Fikri Hemas Pratama

Cetakan Pertama, Agustus 2020

ISBN: 9786025221552

i – xvii + 201 hlm, 14 x 21 cm

Perpustakaan Nasional RI:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor

Jakarta Imparsial, 2020

PENERBIT

IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor

Jl. Tebet Dalam IV J, No. 5B, Jakarta 12810

Telp: (021) 8290-351

Fax: (021) 8541-821

E-mail: (021) 8541-821

Web : [www.imparsial.org](http://www.imparsial.org)

# DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b>	i
<b>Daftar Tabel</b>	iv
<b>Daftar Singkatan</b>	v
<b>Kata Pengantar</b>	ix
<b>Bab I Pendahuluan</b>	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Urgensi Penelitian	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Rencana Luaran	9
1.6 Kajian Literatur	9
1.7 Kerangka Teori	12
1.8 Metode Penelitian	21
1.9 Sistematika Pembahasan dalam Penelitian	22
<b>Bab II</b>	
<b>Kebijakan Pembangunan di Tanah Papua: Studi Kasus Perjalanan Otsus Papua Tahun 2002-2020</b>	
2.1 Pengantar	26
2.2 State of Imagination dan Historisitas Birokrasi Papua: Mengurai Problem Awal	35

2.3	Sistem Politik Masyarakat Etnik Papua: Mengurai Problem Lanjutan	40
-----	--	----

### **Bab III**

	<b>Marginalisasi dalam Narasi Oap</b>	51
3.1	Pengantar	51
3.2	Gambaran Persoalan OAP	53
3.3	Marginalisasi OAP dalam Pembangunan	58
3.4	Depopulasi OAP dan Akibatnya	75
3.5	Mencegah Marginalisasi dan Depopulasi OAP	93

### **BAB IV**

	<b>Pembangunan, Identitas, dan Resistansi</b>	101
4.1	Sejarah Panjang Penaklukan Papua	101
4.2	Representasi Negatif Papua	106
4.3	Nasionalisme Papua	108
4.4	Indonesianisasi Melalui Pembangunan	110
4.5	Kebijakan Ekstraktif Pasca Reformasi	117
4.6	Agen Pembangunan: Negara, Korporasi, dan Militer	120
4.7	Memahami Resistansi dan Aspirasi Merdeka	126
4.8	Resistansi di dalam Papua	127

### **BAB V**

	<b>Dialog Sebagai Strategi Menangani Isu Pembangunan, Marginalisasi, dan Disintegrasi</b>	131
--	---	-----



5.1	Pengantar	131
5.2	Pendekatan <i>Top-Down</i> dalam Penanganan Isu Papua	132
5.3	Masifnya Marginalisasi Terhadap OAP	138
5.4	Dialog Sektorial Antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat Papua	146
5.5	Menuju Pembangunan Berbasis Kebudayaan	157
5.6	Penutup	163
<b>BAB VI</b>		
	<b>Kesimpulan</b>	167
	<b>Daftar Pustaka</b>	175
	<b>Data Wawancara</b>	194
	<b>Profil FAPD</b>	197
	<b>Profil PACEDEPES</b>	199
	<b>Profil IMPARSIAL</b>	200

# DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Indeks Pembangunan Manusia di Papua dan Papua Barat	54
Tabel 3.2	Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Papua Barat	55
Tabel 3.3	EFI dan EPOI Provinsi Papua Hasil Sensus Penduduk 2010	78
Tabel 3.4	Derajat Fraksionalisasi dan Polarisasi Etnis Di Provinsi Papua Barat Hasil Sensus Penduduk 2010	75
Tabel 4.1	Luasan Izin Pelepasan Kawasan Hutan untuk Wilayah Transmigrasi	118
Tabel 4.2	Jumlah Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	119

# DAFTAR SINGKATAN

ABRI:	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AIDS:	<i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
AMP:	Aliansi Mahasiswa Papua
APBD:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
AURI:	Angkatan Udara Republik Indonesia
BBM:	Buton, Bugis, dan Makassar
BKKBN :	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BPK:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPN:	Badan Pertanahan Nasional
BPS:	Badan Pusat Statistika
Dana Respek:	Dana Rencana Strategis Pengembangan Kampung
DAP:	Dewan Adat Papua
DAU:	Dana Alokasi Umum
DOB:	Daerah Otonomi Baru
DPR:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EFI:	<i>Ethnic Fractionalized Index</i>
EPOI:	<i>Ethnic Polarized Index</i>
FAPD:	Forum Akademisi Papua Damai

FGD:	<i>Focus Group Discussion</i>
FMA:	Forum Mahasiswa Amber
Foreri:	Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian
HAM:	Hak Asasi Manusia
HDI:	<i>Human Development Index</i>
HIV:	<i>Human Immunodeficiency Virus</i>
HNT:	<i>Human Needs Theory</i>
IAIN:	Institut Agama Islam Negeri
Impres:	Instruksi Presiden
IPAC:	<i>Institute for Policy and Analysis of Conflict</i>
IPM:	Indeks Pembangunan Manusia
K/L:	Kementerian dan Lembaga
KBMAP:	Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua
Kemenkes:	Kementerian Kesehatan
KNPB:	Komite Nasional Papua Barat
Kopassus TNI AD:	Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat
LIPI:	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LMA:	Lembaga Musyawarah Adat
LRKN LIPI:	Lembaga Riset Kebudayaan Nasional - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LSM:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MIFEE:	<i>Merauke Integrated Food and Energy Estate</i>

MRP:	Majelis Rakyat Papua
MSG:	<i>Melanesian Spearhead Group</i>
NGOs:	<i>Non-Governmental Organizations</i>
NKRI:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NNG:	Netherlands New Guinea
NTB:	Nusa Tenggara Barat
OAP:	Orang Asli Papua
OPD:	Organisasi Pemerintahan Daerah
OPM:	Organisasi Papua Merdeka
Otsus:	Otonomi Khusus
P2Politik-LIPI:	Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
PAD:	Pendapatan Asli Daerah
PBB:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB:	Produk Domestik Bruto
PDP:	Presidium Dewan Papua
Pemilu:	Pemilihan Umum
Perpres:	Peraturan Presiden
PIC:	<i>Person in Charge</i>
PIR:	Perkebunan Inti Rakyat
PNG:	Papua New Guinea
PNS:	Pegawai Negeri Sipil
PP:	Peraturan Pemerintah
PTFI:	PT. Freeport Indonesia
RI:	Republik Indonesia

RPJMN:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPKAD:	Resimen Para Komando Angkatan Darat
RRI:	Radio Republik Indonesia
Satpol PP:	Satuan Polisi Pamong Praja
SD:	Sekolah Dasar
SDA:	Sumber Daya Alam
SDM:	Sumber Daya Manusia
SK:	Surat Keputusan
SKPKC:	Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan
SOLPAP:	Solidaritas Pedagang Asli Papua
TNI:	Tentara Nasional Indonesia
ULMWP:	<i>The United Liberation Movement for West Papua</i>
UP4B:	Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat
UU:	Undang-Undang
UUD:	Undang-Undang Dasar

# Kata Pengantar

**Mangadar Situmorang Ph. D**

Rektor Universitas Katolik Parahyangan dan  
Koordinator FAPD

PAPUA menghadirkan narasi yang komplit. Narasi itu bisa bersifat personal, bisa juga bersifat kumpulan, baik asosiasional maupun non-asosiasional. Negara pun memiliki narasi sendiri. Demikian juga dengan narasi internasional, entah itu berlingkup sub-regional dan regional seperti Pasifik, Asia, atau pun yang bersifat global. Jika narasi-narasi itu menuntut deskripsi tertentu, maka gambarannya pun lengkap. Kelengkapan deskripsi ini terutama menghadirkan kontras, paradoks, dan kontroversi. Di satu titik ada narasi kegembiraan yang ditandai oleh kekuasaan, kekayaan, kedudukan, atau prospek karir yang cemerlang. Di titik lain narasinya adalah kematian, ketercekaman, ketakutan, perlawanan, dan pemberontakan. Secara teoritis skema narasi-narasi itu cenderung berupa *zero sum game*.

Selalu ada narasi lain di antara kedua titik ekstrim tersebut berupa campuran yang rumit, hadir secara bersamaan: antara senang sekaligus takut, berharap tapi was-was, jujur tapi

ragu, optimis tapi juga skeptis. Rentangnya panjang dan punya kecenderungan mendekati satu titik ekstrim dan menjauhi titik ekstrim lainnya. Disinilah letak kesulitannya yakni bagaimana mengidentifikasi narasi-narasi itu dan selanjutnya mengelolanya secara tepat. Jumlah orang dan pelaku dalam rentangan dua titik ekstrim itu pun jauh lebih banyak. Posisi tawar kadang tidak jelas. Sikap abu-abu. Berdiri di atas dua kaki, bisa berpindah dengan mudah. Kepentingan berubah-ubah. Pendapat kabur. Keyakinan tidak ada. Ini mendorong munculnya skema *non-zero sum game* yang dalam keseharian terlihat pragmatisme bahkan oportunistis. Mereka yang diam dan tidak bersuara, entah karena tidak tahu mau bilang apa atau karena tidak tahu caranya bagaimana, ada disini: di antara mereka yang bersuara A dan mereka yang meneriakkan Z.

Penelitian yang dibukukan ini mengangkat narasi-narasi tersebut. Di satu sisi adalah narasi pembangunan yang mengindikasikan kemajuan dan keberhasilan dan di sisi yang lain adalah narasi marginalisasi, depopulasi, bahkan kolonialisasi. Banyak pihak yang mengapresiasi jalannya proses pembangunan tersebut. Ada berbagai kelompok yang telah menikmati hasil dari proses produksi tersebut, misalnya para pelaku usaha di sektor konstruksi dan sektor produksi dan distribusi berbagai macam material yang diperlukan. Para penyedia modal bernama investasi atau kredit juga telah mendapatkan bagiannya dari proses pembangunan sekurang-kurangnya dalam lima tahun terakhir. Pemerintah atau partai politik pengusung pemerintah pun barangkali sudah mendulang suara dalam pemilu yang dapat mendudukkan mereka di kursi eksekutif dan/atau legislatif. Demikian pula para pengusaha telah menikmati hasil



dari ketersediaan jalan raya hotmix, jembatan, pelabuhan, gudang, dan terminal yang bisa mempermudah transportasi dan distribusi hasil alam atau yang kemudian meningkatkan penjualan kendaraan bermotor dari beroda dua hingga duabelas atau lebih. Tetapi, penelitian ini juga mencatat dilemma berupa dampak buruk dari semua proses dan hasil pembangunan infrastruktur tersebut. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, yang terjadi adalah massifikasi, ekstensifikasi dan intensifikasi eksploitasi yang justru meminggirkan Orang Asli Papua (OAP). Bahkan untuk menjalankan semua proses pembangunan sarana-prasarana fisik tersebut justru semakin banyak tenaga-tenaga kerja migran yang didatangkan dari luar Papua. OAP semakin terdesak, terpinggirkan dari seluruh proses pembangunan beserta hasilnya. Ini telah menjadi dilemma depopulasi yang tidak luput dari verifikasi penelitian ini. Angka dan data kuantitatif dicoba disajikan baik untuk menunjukkan kadar marginalisasi dan depopulasi akibat pembangunan. Pendapat dan pandangan dari mereka yang dirugikan dan dikorbankan juga diketengahkan untuk mengafirmasi kebenaran dampak yang tidak dikehendaki tersebut.

Disana-sini juga disajikan praktik pembungkaman yang menunjukkan keberlanjutan tradisi kekuasaan yaitu operasi keamanan. Pembungkaman tersebut bisa bersifat sementara lewat intimidasi, penangkapan, dan penahanan tanpa proses peradilan yang seharusnya. Tidak sedikit peristiwa pembungkaman yang bersifat permanen, selamanya, yaitu lewat tindakan penghilangan dan/atau pembunuhan, entah disengaja atau tidak. Baik yang bersifat sementara maupun yang permanen, pembungkaman bisa bermuara pada menguatnya marginalisasi dan depopulasi.

Penelitian ini mengangkat fenomena disintegrasi sebagai konsekuensi dari proses marginalisasi dan depopulasi yang berlangsung. Tidak sulit mengamini klaim teoritis yang mengatakan bahwa mereka yang mengalami perampasan dan kehilangan hak milik, termasuk yang asasi seperti hak hidup dan hak untuk menjaga identitas kultural, akan bersuara, melawan, dan memberontak. Klaim empiris yang disajikan adalah bahwa semakin banyak orang yang mengalami keterrampasan (deprivasi) hak dasar tersebut dan mereka adalah Orang Asli Papua. Didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, peralihan generasi dari yang tua kepada yang lebih muda dan lebih terdidik, suara-suara yang menyuarakan penolakan dan perlawanan pun semakin kuat, semakin teroganisir, dan semakin menginternasional. Muaranya, fenomena disintegrasi semakin mengkhawatirkan.

*Kekhawatiran* disintegrasi yang diangkat oleh penelitian ini boleh jadi bias, tidak fair, dan berpihak. Sebab, bagi mereka yang menolak dan melawan marginalisasi, depopulasi, kolonialisasi atau deprivasi, barangkali disintegrasi berupa pemisahan diri adalah solusi yang dinilai paling tepat. Sebaliknya, mereka yang mengkhawatirkan disintegrasi adalah mereka yang telah dan terus mengharap mendapatkan manfaat dari integrasi dan memomorduakan bahkan mengingkari adanya praktik marginalisasi dan deprivasi yang menjadi justifikasi ide dan hasrat disintegrasi.

Namun demikian, kekhawatiran disintegrasi tentu memiliki argumentasi dan justifikasi sendiri yang juga basah dan bisa dipertanggungjawabkan. Pertama, secara ideal atau normatif dalam atau melalui integrasi kemajuan dan kesejahteraan bersama lebih dapat dicapai dan ditingkatkan. Kelebihan dan keunggulan pengetahuan dan teknologi dari luar Papua dapat digunakan untuk memanfaatkan kekayaan alam Papua bagi kesejahteraan bersama,

Orang Asli Papua dan para pendatang, bahkan masyarakat di luar Papua dan dunia internasional. Kedua, bahwa proses disintegrasi seringkali menelan biaya yang amat sangat besar. Sejarah dunia mencatat banyak peristiwa disintegrasi yang bermuara pada perang dan bencana kemanusiaan. Pemisahan Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1999 merupakan contoh paling dekat dan masih melekat dalam benak sebagian besar generasi Indonesia dan Timor Leste.

Penelitian ini tidak sampai pada pilihan apakah mempertahankan integrasi atau menolak disintegrasi. Satu-satunya rekomendasi penelitian ini adalah membuka ruang dialog yang semakin luas dan sungguh-sungguh dalam rangka mengatasi persoalan yang masih terus terjadi. Dialog adalah pilihan bijak, demokratis, dan bermartabat. Salah satu keunggulan dialog sebagai cara penyelesaian konflik dan berbagai persoalan lainnya adalah karakternya yang damai, tanpa paksaan, tanpa intimidasi, dan bebas dari kekerasan. Dan tujuan esensial dari dialog adalah kehormatan dan penghormatan pada kemanusiaan dan semua perbedaan yang ada. Singkatnya, penelitian dan buku ini berangkat dari keyakinan dan berusaha untuk meyakinkan para pembaca dan siapa pun yang peduli dan terlibat dalam persoalan di Papua bahwa dialog adalah proses-proses yang saling menghormati, saling menyejahterahkan dan mendamaikan.



# Kata Pengantar

**Al Araf SH., MDM.**  
Direktur Imparsial

SALAH urus Papua oleh pemerintah sepertinya dapat menjadi penjelasan umum terhadap situasi Papua yang hingga kini masih dilanda konflik berdimensi vertikal. Sejumlah studi telah menyebutkan bahwa sumber utama konflik Papua terdiri dari berbagai faktor, mulai dari persoalan sejarah dan status politik, marginalisasi, pembangunan, hingga kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam realitasnya, sejumlah pendekatan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah tidak hanya belum mampu menyelesaikan konflik, tetapi justru memunculkan masalah-masalah baru yang membuat konflik di Papua bertambah kompleks.

Dalam isu pembangunan di Papua misalnya, adanya dominasi cara pandang “Jakarta” dalam konstruksi kebijakan terhadap

Papua menjadi salah satu persoalan sehingga pembangunan tidak hanya bersifat *top down*, tapi juga mengabaikan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat Papua. Model pembangunan semacam ini dalam realitasnya menimbulkan beragam masalah seperti marginalisasi yang mendorong semakin menguatnya aspirasi disintegrasi di Papua.

Hasil riset kolaborasi Pacedepes, Imparsial dan Forum Akademisi untuk Papua Damai yang berada di tangan anda ini menjelaskan relasi yang kuat antara pembangunan, marginalisasi dan persoalan disintegrasi. Dari hasil riset ini, mengubah paradigma dan pendekatan yang dijalankan pemerintah di Papua perlu dilakukan dengan menjadikan masyarakat Papua sebagai subjek yang harus dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan terkait Papua. Perubahan ini penting agar kebijakan pembangunan yang diambil pemerintah bersifat *bottom up*, sesuai dengan lokalitas dan akomodatif terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat Papua.

Penelitian ini semakin relevan untuk dibaca mengingat waktu diterbitkannya penelitian bertepatan dengan akan berakhirnya pelaksanaan dana otonomi khusus Papua pada tahun depan (2021). Secara khusus, penelitian ini sangat tepat dijadikan evaluasi dan koreksi kebijakan yang diambil dan dijalankan selama ini.

Terakhir, dalam penyusunan ini kami atas nama Imparsial menghaturkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim penulis yang pada kesempatan ini tidak bisa disebutkan satu persatu, yang di tengah kesibukannya telah berhasil menuntaskan penelitian ini

dengan baik. Semoga hasil penelitian ini menjadi bacaan penting dan bermanfaat bagi semua pihak terutama dalam mendorong terwujudnya Papua yang damai, adil dan sejahtera. Selamat membaca!

Jakarta, 17 Agustus 2020





# BAB 1

## PENDAHULUAN

BERULANGNYA kerusuhan yang terjadi di Papua dengan pengorbanan nyawa dan kerusakan infrastruktur menjadi bukti bahwa integritas dan keutuhan NKRI mendapatkan ujian yang sangat berat. Penjelasan yang diberikan para pengambil keputusan bahwa kerusuhan yang terjadi adalah akibat dari provokasi yang dilakukan oleh pemimpin kelompok pro-kemerdekaan yang berdomisili di luar negeri dengan perintah untuk melakukan kerusuhan di kota dan memerintahkan OAP untuk melakukan penyerangan terhadap penduduk pendatang, nampaknya hanya bisa diterima oleh logika pendekatan keamanan. Dari kajian konflik dan perdamaian, pola penanganan persoalan dengan cara eksekutif dan koersif dengan pendekatan kekerasan, disertai penjelasan dengan melimpahkan kesalahan pada provokator, tentu tidak akan menyelesaikan persoalan.<sup>1</sup> Namun hal tersebut

---

1. Kerangka Acuan Workshop Penyusunan Design Penelitian Permasalahan Papua (Bandung: FAPD, PACEDEPES dan IMPARSIAL, Oktober 2019).

melahirkan pertanyaan “kenapa OAP lebih mendengarkan pihak yang dituduhkan tadi untuk melakukan kerusuhan dan melakukan tuntutan untuk merdeka, daripada memilih mendengarkan seruan pemerintah untuk selalu menahan diri dan menjaga integritas dan keutuhan bangsa?” Pertanyaan inilah yang menjadi penggerak dilakukannya penelitian mengenai “Membangun Ruang Dialog: Kajian Terhadap Pembangunan, Marginalisasi dan Disintegrasi di Tanah Papua.”

## 1.1 LATAR BELAKANG

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai keterkaitan isu marginalisasi yang dialami OAP dengan semakin menguatnya eskalasi kekerasan dan gerakan separatis. Aspirasi yang menuntut kemerdekaan tidak hanya terjadi di perkotaan akan tetapi mulai mewacana dan mendapatkan dukungan di daerah pedalaman.<sup>2</sup> Simbol maraknya aksi kekerasan dan penguatan tuntutan kemerdekaan Papua saat ini diwarnai dengan kemunculan aktor baru terutama pada masa setelah reformasi dengan kemunculan aktor kaum muda dan mahasiswa yang mengusung identitas kepapuaan dan menentang Indonesia. Kelompok ini termasuk militan, dengan kelebihan koordinasi, aksi mereka sangat cepat, terpadu dinamis dengan jangkauan yang sangat luas, koordinasi nasional, regional dan internasional, serta berlangsung terpadu dan serentak dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan penggunaan internet

2. Salah satu tokoh Forum Papua Damai, diwawancarai oleh tim peneliti, Oktober 2019, Jakarta.

melalui media sosial seperti WhatsApp, Twitter, dan Line. Mereka menggunakan metode perlawanan sipil dengan aksi-aksi di luar perlawanan politik formal melalui protes, boikot, penggunaan simbol politik dan pengingkaran sosial.<sup>3</sup> Dalam kalimat yang sederhana perjuangan OAP sekarang menunjukkan sifat yang sangat terbuka, menampilkan beragam aktor, bergerak baik di pedalaman maupun diperkotaan kemudian juga mengusung partisipasi gerakan kaum perempuan. Lebih jauh lagi perlawanan OAP terhadap pendudukan Indonesia tidak lagi terkurung dalam romantisme dan nasionalisme yang sempit, akan tetapi dilandaskan sepenuhnya pada kesadaran dan gagasan ingin terbebas dari segala bentuk penindasan dan aktor yang sedang menguasai dan menjajah bumi Papua. Nasionalisme Papua sedang bangkit, bukan nasionalisme yang sempit, primordial, dan etnosentris, melainkan nasionalisme semua orang yang tinggal di Papua dan yang melindungi pluralisme, gender, lingkungan, serta pro-kemanusiaan.

Fenomena baru dalam kaitannya dengan pemberontakan di Papua adalah berkembangnya diaspora Papua ULMWP yang bertujuan untuk mewakili aspirasi OAP Barat dalam perjuangan menentukan nasib sendiri dengan cara-cara damai dan berkoordinasi untuk memenangkan pembebasan Papua Barat di tingkat internasional. Saat ini sudah memiliki tiga kantor yakni di Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Wamena. Dalam masa selanjutnya ULMWP akan menjadi payung perjuangan semua

3. Bandingkan dengan J. MacLeod, "Pathway to Dialogue in Papua: Diplomacy, Armed Struggle or Non Violence Resistance?" dalam *Comprehending West Papua* eds. Peter King et.al. (Sydney: Sydney Center for Peace and Conflict Studies, University of Sydney, 2012), 72.

kegiatan yang ada di Papua dan langkah yang akan mereka tempuh adalah mendorong referendum Papua ke PBB.<sup>4</sup>

Pemaparan mengenai dinamika perlawanan masyarakat di atas mengindikasikan bahwa mereka sudah semakin terkonsolidasi meskipun ada garis di dalam dan di luar negeri mengenai perjuangan mereka, tapi terlihat bahwa koordinasi antar mereka sangat terkendali. Ciri khas gerakan mereka adalah memunculkan identitas baru yang membedakan mereka dengan gaya gerakan sebelumnya yang tidak terkoordinasi. Pada saat diwakili oleh kaum tua yang terafiliasi dengan kekuasaan pusat, membuat gaya lama pergerakan menjadi tidak efisien dan efektif.<sup>5</sup>

Maraknya gerakan kemerdekaan yang terjadi di Tanah Papua menjadi inspirasi utama bagi penelitian ini yang pada intinya berkeinginan untuk mencari pemahaman terjadinya proses marginalisasi atau semakin terpinggirkannya OAP dari ruang partisipasi untuk menikmati sumber-sumber ekonomi, dan sosial budaya, yang akhirnya mendorong mereka untuk melakukan kekerasan dan menuntut kemerdekaan.

## 1.2 URGENSI PENELITIAN

Dari kaca mata kajian konflik dan perdamaian, ada argumentasi yang mengatakan bahwa marginalisasi sosio-ekonomi yang dialami sebuah kelompok masyarakat akan melahirkan beragam

4. Markus Haluk, *ULMWP: Persatuan dan Rekonsiliasi Bangsa Melanesia di Papua Barat*, ed. Tim Kerja ULMWP (Numbay (Jayapura): ULMWP Press, 2015)
5. Haluk, *ULMWP: Persatuan dan Rekonsiliasi*, 27 -35.

persoalan yang jika melewati batas toleransi maka akan memicu terciptanya suasana konflik dan sangat membuka rasionalitas dari kelompok tersebut untuk berontak dan menuntut haknya bahkan sampai pada menuntut kemerdekaan. Marginalisasi yang terjadi terhadap kaum asli Papua pada saat ini sudah membawa serta berapa persoalan seperti:

Pertama, semakin menguatnya polarisasi di Papua yang pada akhirnya melahirkan permusuhan dan ketidakpercayaan antara OAP dengan masyarakat yang lainnya serta dengan pemerintah.

Papua saat ini sudah mengalami polarisasi kekuasaan, kesejahteraan, dan harga diri yang kondisinya bagaikan api dalam sekam yang siap membara dan menjadi pemicu konflik terbuka. Lebih jauh lagi marginalisasi juga sudah menciptakan perbedaan posisi antara OAP dengan kelompok lainnya yang diikuti dengan terjadinya perbedaan pandangan antar satu dengan yang lainnya. Hal ini akhirnya menimbulkan persoalan komunikasi antar OAP dengan kelompok yang lainnya dimana jalinan komunikasi menjadi sangat sulit.<sup>6</sup>

Kedua, di Papua saat ini sudah tercipta pola hubungan yang mengambil bentuk struktural dan eksploitatif dan inilah yang menjadi pemicu bangkitnya rasa kebencian dan menguatnya niat pemberontakan.<sup>7</sup> Di Papua, marginalisasi yang mendorong mereka untuk berontak, sudah menjadi bagian dalam hubungan sosial masyarakat. Hubungan antara masyarakat di Papua sudah

---

6. Rory Miller, *ConCom: Conflict Communication a New Paradigm in Conscious Communication* (Wolfeboro: YMAA Publication Centre, 2015).

7. Terry Boswell dan William J. Dixon, "Marx's Theory of Rebellion: A Cross-National Analysis of Class Exploitation, Economic Development, and Violent Revolt," *American Sociological Review* Vol. 58, No. 5 (Oct., 1993): 681-702. <https://www.jstor.org/stable/2096281>

menjelma menjadi struktur kelas yang eksploitatif, dimana golongan berkuasa mengeksploitasi golongan proletar dan hal inilah yang menyebabkan konflik dan pemberontakan tidak bisa dihindari. Ada rasionalitas yang kuat untuk mengatakan bahwa kerusuhan di Wamena menelan 33 korban tewas adalah luaran dari akibat masifnya marginalisasi yang berujung pada pemberontakan OAP.<sup>8</sup> Bukti lainnya menunjukkan bahwa OAP dalam proses perkembangan ekonomi dan politik yang terjadi, keadaannya terjerembab dalam posisi harus tereksplorasi dan termarginalisasi oleh kaum pendatang, seperti kelompok BBM dan yang lainnya. Kekalahan dalam persaingan ekonomi, politik, dan sosial inilah yang akan melahirkan hubungan sosial yang bersifat 'koersif' antara OAP dengan para migran, termasuk pemerintah pusat.<sup>9</sup>

Ketiga, marginalisasi di Papua juga berdampak pada parahnya kondisi ekonomi OAP yang berkonstelasi dengan buruknya kondisi politik.<sup>10</sup> Tanpa terbendung lagi hal ini berujung pada menguat dan maraknya kekerasan dan pemberontakan menuntut penentuan nasib sendiri. Tidak bisa ditutupi bahwa kondisi politik di Papua masih diselimuti isu pelanggaran HAM dan adanya eksploitasi yang dilakukan melalui investasi besar-besaran dimana para pejabat dan investor lebih menyukai emas, sawit, dan kayu dari pada OAP, akhirnya berujung pada marginalisasi dan pemiskinan masyarakat.<sup>11</sup> Kondisi-kondisi

- 
8. "33 Tewas dalam Rusuh Papua," *Tempo*, 28 September 2019, <https://majalah.tempo.co/read/nasional/158481/33-tewas-dalam-rusuh-papua>
  9. George J. Aditjondro, *Suatu Telaah Dampak Migrasi Suku-suku Bangsa dari Sulawesi Selatan dan Tenggara ke Irian Jaya Sejak Tahun 1962* (Jakarta: LRKN-LIPI, 1986).
  10. John Foran, "Theories of Revolution Revisited: Toward a Forth Generation?" *Sociological Theory* Vol. 11, No. 1 (Mar., 1993): 1-20. <https://www.jstor.org/stable/201977>
  11. "Tanah Papua: Perjuangan yang Berlanjut Untuk Tanah dan Penghidupan," *Buletin Down to Earth*, Edisi Khusus Papua No. 88-90 (Nov. 2011): 89-90.

yang digambarkan di atas, akhirnya menyudutkan OAP dalam keterpurukan ekonomi dan hak politik, dan akhirnya pilihan mereka untuk melakukan pemberontakan tidak bisa dihentikan.

Marginalisasi mengakibatkan OAP mengalami frustrasi karena dalam waktu bersamaan mengambil segala kesejahteraan yang mereka miliki.<sup>12</sup> Selanjutnya pembangunan ekonomi di dalamnya mengandung kekuatan-kekuatan politik menuju ketidakstabilan, karena tidak akan menciptakan elit-elit yang merasakan frustrasi karena tidak menikmati fasilitas seperti apa yang didapat elit sebelumnya dan akhirnya mereka pun akan mempertanyakan hierarki sosial yang ada.<sup>13</sup> Gagalnya pembangunan ekonomi di Papua pada akhirnya mengantarkan OAP ke dalam kondisi dimana mereka harus menghadapi kenyataan yang jauh dengan apa yang mereka harapkan. Harapan akan datangnya kesejahteraan tapi yang terjadi justru pemiskinan, harapan menjadi tuan di tanah sendiri malah justru menghadapi kenyataan terpinggirkan dan didominasi oleh masyarakat pendatang. Kondisi-kondisi inilah yang membuat OAP menjadi mengeluh dan jika keluhannya semakin meningkat tanpa adanya perhatian dari Pemerintah, mereka pun akhirnya akan memilih jalan pemberontakan.

### 1.3 PERTANYAAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai terjadinya proses marginalisasi sosio-ekonomi yang begitu masif

- 
12. James C. Davies. "Toward a Theory of Revolution," *American Sociological Review*, Vol. 27, No. 1 (Feb, 1962).
  13. Mancur Olson Jr., *The Economics of the Wartime Shortage* (Durham, N.C.: Duke University Press, 1968).

terhadap OAP, serta menguatnya aksi kekerasan dan keinginan mereka untuk memerdekakan diri. Beberapa pertanyaan yang diajukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai keterkaitan antara marginalisasi sosio-ekonomi, pemberontakan, dan tuntutan Papua Merdeka adalah:

1. Bagaimanakah pembangunan, marginalisasi, dan disintegrasi di Papua dikonseptualisasi (dipahami) oleh elit dan masyarakat di Papua?
2. Apa isu pembangunan, marginalisasi, dan disintegrasi yang dikeluhkan oleh elit dan masyarakat di Papua?
3. Bagaimana pembangunan, marginalisasi, dan disintegrasi memberi dampak pada menguatnya identitas politik kepapuaan?
4. Sejauh mana dialog dapat menyelesaikan persoalan pembangunan, marginalisasi, dan disintegrasi?

#### **1.4 TUJUAN PENELITIAN**

1. Tujuan yang ingin dicapai adalah penelitian ini ingin menemukan pemahaman aktual dan kontemporer dari proses pembangunan, marginalisasi, dan disintegrasi dalam khazanah literatur akademis dan dari temuan lapangan dengan mengkesplorasi kasus yang terjadi di Tanah Papua.
2. Lebih dalam lagi penelitian ini bertujuan untuk memahami keterkaitan antara kegagalan pembangunan dengan disintegrasi yang secara kalimat hipotetis dapat dikatakan terjadi kegagalan pembangunan yang melahirkan marginalisasi sosio-ekonomi OAP semakin masif, maka akan semakin menguatkan aksi-aksi kekerasan dan dorongan disintegrasi.



## 1.5 RENCANA LUARAN

Hasil nyata yang diharapkan setelah terselesaikannya penelitian “Membangun Ruang Dialog: Kajian Terhadap Pembangunan, Marginalisasi dan Disintegrasi di Tanah Papua,” adalah:

1. Laporan Final Penelitian: Hasil penelitian dicetak dalam bentuk buku laporan dan dipresentasikan dalam seminar nasional dan internasional.
2. Artikel Jurnal: Hasil dari penelitian dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional yang bereputasi.
3. Referensi Bahan Ajar: Hasil penelitian pun diharapkan bisa menjadi bahan referensi untuk beberapa mata kuliah seperti Resolusi Konflik, Kajian Keamanan, Kajian Perdamaian, dan Ekonomi Politik Pembangunan.
4. Buku Pegangan kepada K/L: Hasil penelitian juga dituliskan dalam bentuk *Executive Summary* yang dikirimkan kepada K/L dengan harapan dapat dipertimbangkan untuk menjadi referensi terkait dengan kebijakan Perdamaian di Tanah Papua.

## 1.6 KAJIAN LITERATUR

Hingga saat ini, kajian yang memfokuskan pada perdamaian di Tanah Papua sudah cukup banyak. Misalnya “*Initiating A Peace Process in Papua: Actors, Issues, Process and the Role of Intenational Community*” oleh Prof. Timo Kivimaki yang mencoba membukakan retasan jalan perdamaian di Papua dengan sebuah pendekatan

resolusi konflik.<sup>14</sup> Perdamaian di Papua harus diinisiatifkan atas dasar pemikiran “jika persoalan di Aceh bisa diselesaikan, kenapa tidak dilanjutkan dengan perdamaian di Papua?” Tentu saja tidak berarti bahwa klausul atau model perdamaian yang sudah berhasil di Aceh bisa langsung di ‘copy paste’ untuk Papua. Namun, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pelajaran dari perdamaian di Aceh untuk dijadikan kekuatan dalam membuka jalan perdamaian di Papua.

Pencarian jawaban atas persoalan perdamaian di Papua juga pernah dilakukan oleh P2Politik-LIPI yang melahirkan *“Updating Papua Roadmap: Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua.”*<sup>15</sup> Dengan sangat jeli sudah melakukan pemetaan terhadap 4 persoalan di Papua:

- (1) sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI,
- (2) kekerasan politik dan pelanggaran HAM,
- (3) gagalnya pembangunan ekonomi, dan
- (4) inkonsistensi penerapan pelaksanaan Otsus Papua. Kajian ini juga sangat konstruktif dalam memberikan rekomendasi agen ke depan sebagai landasan perdamaian di Papua yakni: memberikan perlindungan dan kompensasi terhadap pelanggaran HAM yang dialami OAP pada masa lalu. Mengubah paradigma pembangunan agar menyentuh kebutuhan dasar OAP. Merancang dialog untuk membangkitkan kepercayaan dan langkah langkah rekonsiliasi. Terobosan perdamaian untuk Papua

14. Timo Kivimaki, *Initiating A Peace Process in Papua: Actors, Issues, Process, and the Role of International Community* (Washington DC: East-West Centre, 2006).

15. P2Politik-LIPI, *Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua*, eds. Cahyo Pamungkas dan Suma Riella Rusdiarti (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

di sini adalah diperkuatnya wacana dialog sebagai mekanisme dalam menciptakan perdamaian di Papua.

Buku *Dialog Jakarta-Papua: Sebuah Perspektif Papua*, karya Pater Neles Tebay, juga bisa dikatakan sebagai sebuah karya yang sangat argumentatif dalam mengedepankan mekanisme dialog sebagai mekanisme penciptaan perdamaian di Tanah Papua.<sup>16</sup> Berdasarkan argumentasi dorongan untuk mengedepankan dialog atas dasar pandangan dan kearifan lokal Papua. Dengan sangat lugas buku ini sudah memberikan argumentasi logis mengenai betapa pentingnya dialog Jakarta-Papua yang harus didukung dengan ketulusan niat berdialog semua pihak, bahkan sampai memetakan isu, kerangka, pihak yang terlibat serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan dialog Jakarta-Papua.

Dua buku yang ditulis oleh anggota FAPD yang diterbitkan Imparsial, yaitu *Oase Gagasan Papua Damai Waa... Waa...Waa...* (2012) dan *Oase Gagasan Papua Bermartabat Waa...Waa...Waa...* (2017), juga berkontribusi dalam menginisiasi perdamaian Papua.<sup>17</sup> Kedua buku ini mencoba untuk memberikan argumentasi akademis terhadap eksistensi konflik yang terjadi di Papua, eksplorasi mengenai sumber-sumber dari konflik, kemudian dengan argumentasi akademik buku ini juga mendukung untuk dilaksanakannya dialog sebagai mekanisme penyelesaian konflik Papua. Tulisan-tulisan yang dimuat dalam buku juga berargumentasi bahwa tercipta kesempatan yang luas

---

16. Neles Tebay, *Dialog Jakarta – Papua: Sebuah Perspektif Papua* (Jayapura: SKPKC Jayapura, 2009).

17. FAPD, *Oase Gagasan Papua Damai Waa...Waa...Waa...* (Jakarta: Imparsial, 2012) dan FAPD, *Oase Gagasan Papua Bermartabat Waa...Waa...Waa...* (Jakarta: Imparsial, 2017).

bagi perdamaian di Tanah Papua terutama dari sisi demokratisasi dan legitimasi yang dimiliki rezim penguasa.

Beberapa buku yang sudah dikaji di atas semuanya memiliki kelebihan dan memberikan kontribusinya terhadap inisiasi perdamaian di Papua, tentu saja dari sisi dan argumentasi yang beragam. Jika dicermati semua literatur di atas belum memberikan perhatian utama pada keterkaitan kegagalan pembangunan dengan persoalan integrasi Bangsa Indonesia (pemisahan diri Papua). Maka dari itu kajian yang sedang dilakukan ini akan mencoba mengisi kekosongan bahasan mengenai marginalisasi yang memicu gerakan untuk kemerdekaan Papua.

## 1.7 KERANGKA TEORI

Pasca tumbang rezim Orde Baru tahun 1999, sistem politik Indonesia mengalami perubahan dari sistem Otoritarianisme ke era reformasi yang memberi ruang terbuka bagi berlangsungnya proses demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia. Dalam konteks Papua, semangat Reformasi Indonesia telah memberi angin segar baru bagi masyarakat Papua, bukan hanya dalam rangka menghadirkan kebebasan berekspresi dan politik yang selama ini dibungkam, melainkan juga menghadirkan proses akselerasi pembangunan yang sejak Indonesia merdeka, pembangunan di tanah Papua cenderung diabaikan.<sup>18</sup>

Dalam konteks pembangunan, semangat pembangunan di Papua berorientasi bukan hanya dalam rangka membangun infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat, melainkan juga

---

18. Haryanto, "Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Nov, 2009). <https://doi.org/10.22146/jsp.10958>

dalam rangka mentransformasikan konsep pemerintahan daerah yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan publik, mengedepankan asas keadilan, kesetaraan, aspirasi masyarakat, serta mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>19</sup>

Proses terpenting dari berlangsungnya sistem pembangunan di Papua adalah tuntutan akan adanya sebuah pemisahan antara *power* dan *authority* dalam mempengaruhi struktur birokrasi pemerintahan. Secara sederhana Hoffman dan Graham berpandangan bahwa *power* merupakan cara elit mempengaruhi kelompok sosial untuk menjalankan kepentingannya baik dengan cara pemaksaan, subordinasi, dan dependensi.<sup>20</sup> Sedangkan *authority* adalah cara bagaimana kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, mendapatkan persetujuan masyarakat, berkesesuaian moral, hingga memiliki independensi bagi setiap individu dalam melaksanakannya.

Namun harapan terjadinya pemisahan antara *power* dan *authority* dalam demokrasi tidak selamanya terjadi, bahkan seringkali justru saling mendekonstruksi makna satu sama lain. Sebagaimana digambarkan oleh Riggs bahwa tidak selamanya birokrasi pemerintahan demokratis mampu menghasilkan pembangunan yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>21</sup> Sebab di dalam demokrasi, aktivitas pembangunan

- 
19. Edward Aspinall dan Greg Fealy eds., *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation & Democratisation* (Singapura: ISEAS, 2003); dan Christopher Meckstroth, *The Struggle for Democracy: Paradoxes of Progress and the Politics of Change* (Oxford: Oxford University Press, 2015).
  20. John Hoffman dan Paul Graham, *Introduction to Political Theory* (New York: Routledge, 2015).
  21. F. W. Riggs, "Modernity and Bureaucracy," *Public Administration Review*, Vol.57 No.4, Wiley (Jul-Aug, 1997)

juga dapat dijadikan sebagai “instrumen” bagi elit kuasa untuk melakukan dominasi, eksploitasi, dan marginalisasi kelompok yang tersubordinat.

Sedangkan marginalisasi dalam tulisan ini ditempatkan sebagai dampak atau sebagai outcome dari proses pembangunan yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi, mengabaikan SDM, dan kebudayaan OAP. Sebagai akibatnya, OAP semakin terpinggirkan secara ekonomi, sosial, budaya selama integrasi dengan Indonesia. Kondisi tersebut ikut memperkuat identitas politik OAP sebagai anti-tesis dari keindonesiaan. Dalam hal ini pembangunan memunculkan marginalisasi yang kemudian secara tidak langsung memperkuat keinginan untuk disintegrasi.

Konsep ‘marginalisasi’ atau ‘terpinggirkan’ secara sederhana bisa dipahami sebagai status untuk menunjuk seseorang atau kelompok yang menempati posisi secara relatif tidak berdaya dan tidak penting. Marginalisasi juga bisa dipahami bila seseorang atau kelompok secara politik tidak penting, atau mereka yang menolak untuk berpartisipasi secara nyata dalam politik, termasuk dalam hal-hal yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Jika marginalisasi dilabelkan pada seseorang atau kelompok maka golongan tersebut secara politis sosial dan ekonomi tidak penting, dikecualikan atau tidak berdaya dibandingkan dengan kelompok yang lainnya. Marginalisasi juga bisa dipahami sebagai kelompok yang tidak mendominasi, biasanya mereka tunduk dan ditundukkan, atau terpinggirkan dari penduduk atau masyarakat lain yang mendominasi.<sup>22</sup>

22. Victor Conde, *A Handbook of International Human Rights Terminology* (Nebraska: University of Nebraska-Lincoln, 2004), 124 dan 156.

Marginalisasi juga bisa mendapatkan pemahaman mereka yang tidak dapat menyesuaikan diri dan melibatkan diri dalam suatu proses sosial. Dalam konteks pembangunan misalnya mereka yang terpinggirkan masih berjuang melawan penderitaan, kelaparan ketidakadilan, keterasingan, dan diskriminasi.<sup>23</sup>

Dalam tulisan ini, konsep marginalisasi yang dimaksud adalah proses terpinggirkan OAP dalam hal ekonomi, menurunnya jumlah OAP sebagai akibat migrasi dari luar Papua, dan terkikisnya budaya Papua sebagai akibat dari modernisasi. Marginalisasi juga muncul dari adanya penolakan terhadap budaya minoritas yang dianggap tidak sesuai dengan konsep modernitas seperti etos kerja yang tinggi. Dalam mencari dasar penjelasan mengenai keterkaitan ekonomi dengan disintegrasi (konflik), terdapat tiga pandangan yang sudah dikembangkan.

Pertama, pandangan bahwa konflik akan mengalami penurunan seiring dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita. Argumentasi di sini nampak sangat sederhana dengan mengandalkan pada penjelasan sejarah dimana suatu komunitas yang tidak memiliki rekam jejak pembangunan ekonomi akan memiliki konflik yang beragam, begitu juga sulit untuk meragukan bahwa pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat konflik yang beragam juga akan memiliki hambatan dalam pembangunan ekonominya.<sup>24</sup>

Pandangan kedua mengatakan bahwa pembangunan ekonomi saja tidak cukup, konflik akan tetap terjadi pada saat

---

23. Y. Argo Twikromo, *Pemulung Jalanan Yogyakarta: Konstruksi Marginalitas dan Perjuangan Hidup dalam Budaya-Budaya Dominan* (Yogyakarta: Media Pesindo, 1999), 7.

24. Paul Collier, *The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It*, (New York: Oxford University Press, 2007); dan David Backer, Ravinder Bhavnani, dan Paul Huth eds., *Peace and Conflict 2016*, (New York: Routledge, 2016).

pembangunan tidak bisa dinikmati oleh semua kelompok atau hanya dinikmati kelompok tertentu dalam komunitas. Piketty, melakukan studi dan mendokumentasi beberapa kecenderungan bahwa terjadinya ketidakmerataan pembangunan ekonomi akan melahirkan kesadaran masing-masing kelompok yang ada dalam suatu komunitas tentang perbedaan status ekonomi mereka dengan membandingkan dengan kelompok yang lainnya.<sup>25</sup> Kemudian Piketty juga menemukan bahwa ketidakmerataan pembangunan ekonomi memiliki keterkaitan dengan terjadinya kerusuhan dan maraknya aksi-aksi kekerasan. Juga ditegaskan di sini bahwa sebuah komunitas yang memiliki pemerataan ekonomi memiliki kecenderungan yang semakin kecil timbulnya konflik dan kekerasan sementara dalam komunitas yang memiliki garis perbedaan ekonomi akan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi akan terjadinya konflik dan kekerasan.

Pandangan ketiga mengatakan bahwa konflik yang terjadi di negara berkembang dikarenakan perbedaan sosio-ekonomi yang terjadi dalam masyarakat juga diikuti oleh perbedaan garis kesukuan (*ethnicity*).<sup>26</sup> Argumentasinya di sini bahwa jika terjadi perbedaan kesejahteraan ekonomi yang dimiliki kelompok masyarakat dan diikuti oleh garis perbedaan dalam kesukumannya, maka hal ini akan semakin memperkuat garis pemisah *in group* dan *out group* dari mereka yang memperkuat identitas kesukuan masing-masing kelompok dan akhirnya membuat mereka

25. Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-first Century* (Cambridge: Harvard University Press, 2014).

26. James D. Fearon, *Ethnic Mobilization and Ethnic Violence*, (Oxford: The Oxford Handbook of Political Economy, 2006), lihat juga Donald L. Horowitz, *Ethnic Groups in Conflict*, (London: University of California Press, 1985).



menyalahkan kelompok dengan status ekonomi dari suku yang lainnya dan konflik tidak bisa dihindari.

Agar tiga pandangan tentang keterkaitan ekonomi dengan konflik yang sudah disampaikan di atas semakin jelas aplikasinya dalam menjelaskan dampak buruk dari terjadinya marginalisasi sosio-ekonomi terhadap semakin tereskalasinya konflik dan menguatnya disintegrasi, maka berikut ditelusuri beberapa teori yang sudah dikembangkan dalam studi konflik dan perdamaian. Marginalisasi dan ketidakberdayaan suatu masyarakat adalah akibat dari persoalan yang biasanya bersifat struktural.

Tiga teori yang dijadikan tuntunan dalam penelitian ini yakni: *Human Needs Theory*, *Relative Deprivation Theory*, dan Kolonialisme Internal.

HNT yang dikembangkan oleh John Burton, memberi penjelasan bahwa marginalisasi dan ketimpangan ekonomi akan membuat masyarakat yang mengalami semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dimana pada akhirnya konflik dan kekerasan tidak akan bisa dihindari. Argumentasinya adalah rasa frustrasi, marah, dan pemberontakan akan terjadi apabila adanya perasaan tertekan dan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Pemikiran utama dari teori ini mengasumsikan bahwa kebutuhan adalah sesuatu yang tidak bisa dinegosiasi dan harus dipenuhi karena manusia pada hakikatnya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dan hanya pemenuhanlah yang akan melahirkan kestabilan dan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Rasa frustrasi jika kebutuhan tidak terpenuhi akan melahirkan sikap

agresif serta melahirkan konflik atau pemberontakan.<sup>27</sup> Sama seperti yang lainnya, OAP juga memiliki kebutuhan seperti keamanan, keadilan, dan pengakuan terhadap eksistensinya.<sup>28</sup> HNT menjawab betapa kondisi sosial dan ekonomi mengambil semua rasa keadilan, merusak tatanan keamanan dan menggerus semua bentuk pengakuan terhadap OAP, yang akhirnya memperkuat disintegrasi.

Dua teori berikutnya mendasari penjelasan adanya keterkaitan antara kinerja ekonomi pemerintah dengan kebangkitan kelompok dan terjadinya konflik-konflik dalam masyarakat, yakni *Relative Deprivation Theory* dan Kolonialisme Internal. *Relative Deprivation Theory* seperti yang dikembangkan oleh Ted Robert Gurr, memandang bahwa pertumbuhan ekonomi dalam waktu yang pendek dan sementara hanya akan meningkatkan terjadinya konflik sosial dan kerusuhan.<sup>29</sup> Argumentasi berikutnya bahwa segala bentuk disintegrasi mengakar pada rasa frustrasi (keluhan) dari pencapaian tujuan satu atau lebih aktor. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa agresi atau pemberontakan memiliki keterkaitan yang erat dengan sejauh mana terpenuhinya tujuan dari kelompok yang tidak tercapai.

Jika perasaan *relative deprivation* ini terkombinasi dengan garis kesukuan dalam masyarakat yang terpecah, maka tidak ayal lagi akan menjadi sumber disintegrasi. Kelompok yang mengalami

---

27. Alan C. Tidwell, *Conflict Resolved? A Critical Assessment of Conflict Resolution* (Continuum, New York, 1998), 77-91.

28. Tidwell, *Conflict Resolved? A Critical*, 79; dan Abdollah Ramezanzadeh, *Internal and International Dimension of Ethnic Conflict: The Case of Iran* (Leuven: Catholic University of Leuven, 1995), 25.

29. Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel* (New Jersey: Princeton University Press, 1970).

kekurangan cenderung menyalahkan lawannya dan menuduhnya sebagai pihak yang mengambil segalanya. Kemudian bagi pihak yang satunya mereka mengatakan bahwa tuntutan dari kelompok yang mengalami kekurangan adalah tidak rasional dan berargumentasi bahwa apa yang mereka dapat adalah hasil dari kerja keras. Dengan demikian dalam masyarakat yang belum memiliki keselarasan hubungan antar etnis maka pembangunan ekonomi tidak menjadi jaminan terjadinya perdamaian malah sebaliknya menjadi sumber disintegrasi.

Teori berikutnya adalah Kolonialisme Internal. Sebelum dikembangkan oleh Hechter dengan pembuktian yang dilakukan di Inggris Raya, kemunculan istilah kolonialisme menarik banyak peminat studi konflik dan perdamaian. Beberapa di antaranya adalah Pablo Gonzales Casanova yang menerbitkan artikel "*National Colonialism and Development*."<sup>31</sup> Tesis yang dimunculkan di sini adalah pada saat masyarakat mengalami nasib yang sama baik waktu penjajahan maupun sejak kemerdekaan yakni mengalami hubungan kolonialisme internal dengan kelompok mayoritas maka pemberontakan akan terjadi. Selanjutnya seorang sosiolog Robert Blauner mengaplikasikan konsep kolonialisme internal ini dalam menganalisis kelompok minoritas di Amerika. Dalam artikelnya "*Internal Colonialism and Ghetto Revolt*," Blauner menggunakan terminologi ini untuk melihat terjadinya penindasan yang dilakukan oleh orang kulit putih terhadap masyarakat kulit hitam di Amerika yang juga melahirkan pemberontakan oleh masyarakat kulit hitam.<sup>32</sup>

- 
31. Pablo Gonzalez Casanova, "Internal Colonialism and National Development," *Studies in Comparative International Development*, Vol. 1. No. 4 (1965).
  32. Robert Blauner, "Internal Colonialism and Ghetto Revolt," *Social Problems*, Vol. 16, No. 4 (Spring, 1969): 393-408. <https://www.jstor.org/stable/799949>

Michael Hechter dalam bukunya *“Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development 1536-1966.”*<sup>33</sup> Ia mengusung tema utama adanya faktor ekonomi yang tidak adil merata akan menggerakkan orang memilih jalan pemberontakan. Argumentasinya bahwa semakin meningkatnya interaksi antar kelompok (etnik) tidak akan menjamin terjadinya harmonisasi dan kesatuan hubungan, melainkan sebaliknya hanya akan melahirkan konflik antar mereka.

Intensitas hubungan antar kelompok dalam suatu masyarakat jika tidak diikuti oleh distribusi yang adil, merata, dan dinikmati seluruh masyarakat, akan menggerakkan perasaan pemberontakan karena dalam masyarakat akan lahir strata sosial yang oleh Hechter diistilahkan sebagai “pembagian kerja secara (etnik) budaya” yang nantinya akan meningkatkan kesadaran dan perasaan subordinat sebagai akibat adanya dominasi dari satu kelompok terhadap yang lainnya.<sup>34</sup> Di sini muncul logika penjelasan bahwa kelompok yang mengalami dominasi (subordinat/termarginalisasi), nantinya akan merasa tersingkir dan mengeluh (*relative deprivation*), sehingga akan menggerakkan mereka untuk membuka permusuhan terhadap kelompok yang dianggap mendapatkan prioritas. Dalam situasi seperti ini, kalau ada perbedaan masyarakat (atas garis etnik) hal yang terjadi selanjutnya adalah peningkatan identitas etnik yang nantinya bermuara pada disintegrasi.

33. Michael Hechter, *Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, 1536-1966* (London: Routledge and Kegan Paul, 1975).

34. Hechter, *Internal Colonialism: The Celtic Fringe*.

## 1.8 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, studi dokumen, dan media sosial. Berbagai data kualitatif yang dikumpulkan telah diolah menjadi sebuah data set, dan kemudian dikembangkan untuk mendukung lahirnya makna baru bagi penelitian. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena yang terbangun dari interaksi sosial. Creswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif sangat bergantung pada informasi yang diperoleh dari objek/partisipan pada ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data yang sebagian besar terdiri atas kata-kata/teks dari partisipan, menjelaskan dan melakukan analisa terhadap kata-kata, dan melakukan penelitian secara subjektif.<sup>35</sup> Tim peneliti telah mengumpulkan informasi dengan menggunakan wawancara, baik secara langsung maupun secara daring. Adapun informan yang diwawancarai adalah: DAP, Tokoh Adat Papua, Tokoh Masyarakat Papua, Cendekiawan, LSM, NGOs, Tokoh Agama, Anggota Dewan, dan Birokrat. Selain wawancara, tim peneliti telah melakukan studi dokumen dimana berbagai data yang berkaitan dengan topik penelitian dikumpulkan, kemudian dipelajari hingga diperoleh informasi yang diperlukan. Sejumlah hasil penelitian telah dikonsultasikan dengan *stakeholder* seperti FAPD pada tanggal 20 Mei 2020 dan telah di-*review*. Hasil konsultasi dan *review* telah ditindaklanjuti dengan penyuntingan hasil laporan penelitian.

---

35. John W. Creswell, *Educational Research : Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, 4th ed. (Boston: Pearson Education, 2012), 16.

## 1.9 SISTEMATIKA PEMBAHASAN DALAM PENELITIAN

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam enam bab dengan kesimpulan pada bagian terakhir. Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagian pertama mendeskripsikan rancangan penelitian yang mencakup permasalahan konsep teori dan metode penelitian. Di dalamnya juga dinarasikan desain penelitian termasuk pemikiran utama urgensi dan rasionalisasi penelitian, penetapan permasalahan, tujuan dari penelitian, serta argumentasi konseptual dan teoritis yang digunakan.

Bagian kedua didedikasikan untuk membahas mengenai kondisi sosio-ekonomi dan politik Otsus Papua yang telah mengakibatkan terbentuknya polarisasi dalam hubungan antar kelompok masyarakat dan negara di Papua. Dua hal yang mengakibatkan Otsus Papua menciptakan polarisasi etnis ialah: ketidakhadiran *State of Imagination* dan tidak adanya sejarah pemerintahan modern di Papua.

Pada bagian ketiga mengungkapkan proses marginalisasi dan semakin terbatasnya ruang partisipasi OAP untuk menikmati sumber-sumber ekonomi, sosial, dan budaya. Perhatian utama analisis di sini ada 4 poin, yakni gambaran persoalan pembangunan, marginalisasi dan depopulasi OAP, serta upaya mencegah marginalisasi.

Pada bagian keempat didedikasikan untuk menjelaskan relasi antara pembangunan, identitas, dan resistansi. Bagian awal menarasikan sejarah integrasi Papua, representasi negatif Papua, serta nasionalisme Papua. Kemudian dilanjutkan dengan

analisis mengenai Indonesianisasi pembangunan, kebijakan ekstraktif pasca reformasi, negara korporasi dan militer sebagai alat pembangunan, serta resistansi dan aspirasi merdeka.

Bagian kelima menganalisis keterkaitan marginalisasi dengan rasionalisasi tindakan kekerasan dan menguatnya disintegrasi. Beberapa poin utama yang dinarasikan dan dianalisis adalah pendekatan pemerintah yang selama ini *top-down* sehingga berakibat terjadinya marginalisasi; perlunya dialog sektoral antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tokoh-tokoh OAP; serta hasil dialog sektoral ini adalah pembangunan berbasis kebudayaan.

Bagian akhir ini ditarik kesimpulan yang diambil dengan berpegangan pada teori yang sudah dibangun, memperhatikan data-data yang sudah dikumpulkan, serta memanfaatkan analisis yang telah dilakukan.





## BAB 2

# KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI TANAH PAPUA: STUDI KASUS PERJALANAN OTSUS PAPUA TAHUN 2002-2020

### 2.1 PENGANTAR

PROSES reformasi yang sedang berlangsung di dalam sistem tatakelola pemerintahan Indonesia pasca rezim otoriter membutuhkan adanya *dealing* antara pemerintah pusat dan elit lokal. Salah satu produk dari *dealing* tersebut adalah mengubah sistem tatakelola pemerintahan yang terkonsentrasi pada desentralisasi dan otonomisasi. Tuntutan terselenggaranya proses desentralisasi diharapkan mampu mentransformasikan sistem pemerintahan daerah yang berorientasi pada percepatan pembangunan, tatakelola pemerintahan yang baik, dan proses pendemokratisasian wilayah yang mampu menyaring visi dan misi pembangunan daerah yang berakar dari 'aspirasi rakyat.'<sup>36</sup> Dalam konteks yang lebih

---

36. Aspinall dan Fealy eds., *Local Power and Politics in Indonesia*.; lihat juga M. Turner, et al., *Decentralisation in Indonesia: Redesigning the State* (Canberra: Asia Pacific Press, 2003); lihat juga D. Roth, "Many Governors, No Province," dalam *Renegotiating Boundaries: Local*

instrumentalis, proses otonomisasi daerah dibutuhkan dalam rangka meredam potensi konflik etnisitas dan elit lokal terhadap negara.<sup>37</sup>

Dalam konteks Papua, tuntutan otonomisasi daerah tidak hanya berhenti pada proses desentralisasi, melainkan juga menuntut diberlakukannya status Otsus dalam rangka melakukan akselerasi pembangunan dan percepatan pemenuhan pelayanan publik bagi OAP. Tuntutan Otsus tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat melalui implementasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Setidaknya, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Papua pemberian status Otsus Papua dimaknai dalam tiga hal, di antaranya;

- 1) Sebagai “penebus kesalahan” otoritarianisme masa lalu yang pernah dilakukan pemerintah pusat terhadap tanah Papua;
- 2) Mempercepat proses pembangunan di Papua yang selama ini tertinggal dengan daerah lain;
- 3) Sebagai *bentuk politic of recognition*, penghormatan dan pengakuan terhadap eksistensi unsur dasar dan struktur OAP yang dikerangkai dalam kesatuan NKRI. Hasil dari pemberlakuan status Otsus ini adalah diberikan kelonggaran dalam perubahan

*Politics in Post-Soeharto Indonesia*, eds. H. S. Nordholt dan G. A. van Klinken (Leiden: KITLV Press, 2007); dan lihat juga Christopher Meckstroth, *The Struggle for Democracy*.

37. Timo Kivimaki dan Rubern Thorning, “Democratization and Regional Power Sharing in Papua/Irian Jaya: Increased Opportunities and Decreased Motivations for Violence,” *Asian Survey*, Vol. XLII, No. 4 (Juli/Agustus 2002): 651-672; lihat juga Rodd McGibbon, *Plural Society in Peril: Migration, Economic Change, and the Papua Conflict* (Washington D.C.: East-West Center, 2004). <https://www.jstor.org/stable/resrep06523>; dan lihat juga Jacques Bertrand, “Autonomy and Stability: The Perils of Implementation and “Divide-and-Rule” Tactics in Papua, Indonesia,” *Nationalism and Ethnic Politics*, Volume 20 Issue 2 (2014): 174-99. <https://doi.org/10.1080/13537113.2014.909157>.

struktur pemerintahan tingkat daerah, pemberian wewenang yang cukup besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta mobilisasi dana yang ekstensif merupakan warna dominan dalam *landscape* politik pemerintahan di Papua saat ini.

Berangkat dari tiga hal tersebut, setidaknya terdapat tiga *privilege* yang luar biasa sejak diberlakukannya UU Otonomi Khusus No. 21 tahun 2001 tersebut, di antaranya ialah;

**1) Papanisasi birokrasi** yang meliputi penetapan MRP yang terdiri dari anggota masyarakat adat, organisasi masyarakat adat, serta lembaga keagamaan yang ditentukan secara demokratis oleh OAP;

**2) Otonomisasi kebijakan** dimana melalui Otsus pemerintah provinsi Papua berhak menentukan kebijakan yang diperuntukkan bagi OAP di seluruh sektor, kecuali sektor urusan internasional, pertahanan, kebijakan moneter dan fiskal, agama dan keadilan;

**3) Dana bagi hasil yang besar** dibandingkan daerah lain, dimana provinsi Papua menerima 80% *revenue* dari sektor kehutanan, perikanan, pertambangan, dan 70% *revenue* dari sektor minyak dan gas bumi hingga tahun 2026, dan 50% *revenue* di tahun setelahnya di tengah provinsi lain yang penerimaannya tidak mencapai 20% *revenue* di setiap sektor kecuali sektor perikanan dan reboisasi.

**4) Dana Otsus yang besar** yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Papua sebesar 2% dari total DAU Nasional hingga tahun 2021.<sup>38</sup> Berbagai hak keistimewaan yang

---

38. International Crisis Group, "Indonesia: Ending Repression in Irian Jaya," *ICG Asia Report*, No. 23 (2001), <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/indonesia/indonesia-ending-repression-irian-jaya>; lihat juga Alistair D. B. Cook, "Investing in Papua: The Dual Challenges of Governance and Development," *NTS Perspectives Issue*, No. 2 (Aug 2010), <https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/nts/2537-investing-in-papua-the-dual-c/>; dan lihat juga B. Resosudarmo, et al, "Development in Papua After Special Autonomy," dalam Hal Hill, ed., *Regional Dynamics in a Decentralized Indonesia*, (Singapore: ISEAS, 2014).

diberikan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah Papua merupakan *ikhtiar* untuk membangun Papua melalui *prosperity approach*.<sup>39</sup>

Sejak diberlakukannya kebijakan Otsus tersebut, selain bertambah besarnya dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Provinsi Papua dalam menjalankan pemerintahan, salah satu perubahan terbesar lainnya juga terjadi di sektor birokrasi, di mana dari yang awalnya kalangan non-Papua menduduki 60% posisi eselon tertinggi di birokrasi pemerintahan Papua, satu tahun sejak Otsus tersebut diberlakukan posisi itu berubah, dimana 80% posisi eselon tertinggi di birokrasi pemerintahan Papua di isi oleh OAP. Hingga 2010, Papuanisasi Birokrasi berlangsung di wilayah tersebut telah menonaktifkan 4.242 birokrat non-Papua dari posisi struktural dan non-struktural pemerintahan.<sup>40</sup>

Sayangnya, di tengah banyaknya keistimewaan Otsus, hingga 18 tahun Otsus tersebut berjalan, apa yang diharapkan daripada capaian Otsus masih jauh panggang daripada api. Besarnya dana Otsus yang mencapai Rp84,19 triliun (provinsi Papua) dan Rp33,81 triliun (provinsi Papua Barat) yang telah dicairkan oleh pemerintah pusat hingga tahun 2019 ini belum juga memberikan dampak yang signifikan bagi OAP.<sup>41</sup> Hal tersebut terbukti, hingga

39. A. Ruhyanto, "The Perils of Prosperity Approach in Papua," *Peace Review*, 28:4 (2016), 490-498.

40. M. S. Widjojo, ed., *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerjasama dengan KITLV, 2010).

41. Kemenkeu, *Ringkasan APBD 2018: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018). <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA-2018.pdf>; lihat juga Kementerian Dalam Negeri, Pengelolaan Dana OTSUS di Provinsi Papua (Dirjen OTDA Kemendagri, 2018) [http://fmb9.id/document/1522114027\\_Paparan\\_Materi\\_Data\\_Ossus\\_Papua.pdf](http://fmb9.id/document/1522114027_Paparan_Materi_Data_Ossus_Papua.pdf); dan lihat juga *BPKAD Provinsi Papua, Pengalokasian Dana OTSUS Papua Tahun 2006 s/d 2019* (BPKAD Provinsi Papua, 2019) <https://bpkad.papua.go.id/dana-otsus/22/pengalokasian-dana-otsus-papua-tahun-2006-sd-2019.htm>

tahun 2019, IPM provinsi Papua dan provinsi Papua Barat selalu berada di posisi terendah, yaitu hanya 60,84 dan 64,70 di tengah rata-rata IPM setiap provinsi Indonesia mencapai angka 71,92.<sup>42</sup>

Rendahnya IPM tersebut juga dapat dikaitkan dengan fakta minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah ini. Hingga tahun 2020, hanya 21,08% dan 34,83% angkatan muda provinsi Papua dan Papua Barat yang menikmati fasilitas pendidikan tinggi di tengah 20,21% dan 1,53% angkatan muda provinsi Papua dan Papua Barat masih buta huruf.<sup>43</sup> Perihal ini juga memengaruhi kualitas angkatan kerja OAP hari ini. Hingga tahun 2019, terdapat 58,27% dan 30,11% pekerja provinsi Papua dan Papua Barat hanya menamatkan pendidikan SD (Papua dalam Angka 2020; Papua Barat dalam angka 2020). Dampaknya, hingga tahun 2019 kegiatan pertumbuhan perekonomian rakyat bergerak sangat lambat dimana tingkat kemiskinan di provinsi Papua maupun Papua Barat adalah yang tertinggi di Indonesia mencapai 27,53% dan 22,17%, jauh di antara rata-rata jumlah penduduk miskin Indonesia yang hanya mencapai 9,22%.<sup>44</sup>

Berdasarkan paparan data di atas, maka kita dapat mengambil benang merah bahwa apa yang menjadi cita-cita dan tujuan dari pelaksanaan Otsus di wilayah Papua masih amatlah jauh panggang daripada api. Bahkan cita-cita Otsus Papua yang ingin menghadirkan akselerasi pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik, justru terjadi sebaliknya. Pengimplementasian Otsus Papua hari ini justru telah mengakibatkan terjadinya defisit akuntabilitas dan transparansi akibat tingginya

---

42. Badan Pusat Statistik, *Presentasi Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur 2011-2019* (Badan Pusat Statistik, 2020) <https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/12/22/1056/persentase-penduduk-buta-huruf-menurut-kelompok-umur-2011-2019.html>.

43. Badan Pusat Statistik, *Presentasi Penduduk Buta Huruf*.

44. Badan Pusat Statistik, *Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2010-2018 (Metode Baru)* (Badan Pusat Statistik, 2020) <https://www.bps.go.id/dynamictable/2019/04/16/1615/peringkat-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi-2010-2018-metode-baru-.html>

tingkat korupsi yang terjadi di internal pemerintahan Papua, serta konflik yang terjadi di antara sub-etnis lokal dalam memperebutkan akses dana. **Dalam konteks akuntabilitas dan transparansi**, hingga saat ini BPK mengindikasikan bahwa banyak dana Otsus Papua yang pendistribusiannya masih perlu diawasi. Dimana masih terdapat penyelewengan dana sebesar 40% oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat 60% dana yang diselewengkan. Lebih lanjut, berdasarkan laporan pemeriksaan BPK Papua, setidaknya terdapat beberapa temuan penyelewengan dana Otsus Papua tahun 2018-2019. Di antaranya penyelewengan sebesar Rp556 miliar pengeluaran yang tidak didukung bukti valid, Rp29 miliar penggunaan dana Otsus fiktif atau dana dicairkan tanpa ada kegiatan, hingga Rp1,85 triliun yang didepositokan oleh Pemerintah Daerah tanpa alasan yang jelas dan dianggap bertentangan dengan peraturan penggunaan dana Otsus.<sup>45</sup>

**Dalam konteks konflik sub-etnis**, fakta bahwa maraknya pemekaran daerah yang terjadi di Papua (dari 9 kabupaten/ kota di tahun 2000 meningkat menjadi 29 kabupaten/ kota di tahun 2015 dan terdapat 30 proposal pemekaran daerah Papua yang terdaftar di Kemendagri tahun 2015) yang diharapkan dapat mempercepat akses pemenuhan pelayanan dasar bagi OAP (khususnya di daerah pedalaman) justru yang terjadi adalah sebaliknya. Pusat-pusat pemerintahan baru tersebut telah menjadi ruang konflik baru yang diperebutkan oleh setiap elit sub-etnis lokal untuk berkuasa dengan cara memanfaatkan momentum *papuanisasi birokrasi* sebagai kesempatan untuk membangun patronase politik etnik.

---

45. Mutia Fauzia, "Kemenkeu: Ada Dana OTSUS Papua Rp. 1,85 Triliun yang Didepositokan," *Kompas.com*, 26 Februari 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/02/26/051800626/kemenkeu--ada-dana-otsus-papua-rp-1-85-triliun-yang-didepositokan>

Sepanjang tahun 2018-2019, provinsi Papua Barat merupakan daerah yang paling rawan konflik pemilihan kepemimpinan dan jabatan daerah tertinggi (52,83) dengan indeks kebebasan hak-hak politik terendah (40,11) di Indonesia.<sup>46</sup> Dalam konteks provinsi Papua, konflik elit sub-etnis lokal dalam proses pemilihan walikota/bupati di Pilkada juga telah memicu terjadinya eskalasi militerisasi dan gerakan separatisme yang tinggi –seperti yang pernah terjadi di kabupaten Waisor, kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, dan kabupaten-kabupaten di daerah Papua pegunungan yang lain– yang digunakan oleh elit untuk meredam suara lawan politiknya.<sup>47</sup>

Secara generalis, implikasi dari berbagai realitas di atas adalah pelaksanaan roda pemerintahan di hampir seluruh wilayah Papua tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan Indeks Tata-Kelola Pemerintahan Indonesia tahun 2012, provinsi Papua dan Papua Barat masuk menempati peringkat ke-29 dengan nilai 4,88 jauh di bawah nilai rata-rata nasional yang mencapai 5,70. Rendahnya peringkat Tata-Kelola Pemerintahan provinsi Papua dipengaruhi oleh prinsip partisipasi (2,87) dan keadilan (2,26) di birokrasi provinsi Papua cenderung rendah. Rendahnya keadilan di arena birokrasi dipengaruhi oleh rendahnya indeks kualitas hidup, tingginya jumlah

46. Badan Pusat Statistik, *Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Aspek dan Provinsi 2009-2018* (Badan Pusat Statistik, 2018) <https://www.bps.go.id/dynamic/2017/05/04%2000:00:00/1242/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-aspek-dan-provinsi-2009-2018.html>; dan lihat juga Timothy Loen, "INFOGRAFIS: Peta Kerawanan Pemilu 2019," CNN Indonesia, 15 Desember 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181214205357-35-353814/infografis-peta-kerawanan-pemilu-2019>
47. J. Wing dan P. King, *Genocide in West Papua? The Role of the Indonesian State Apparatus and a Current Needs Assessment of the Papuan People* (Sydney: CPACS University of Sydney, 2005); lihat juga J. Timmer, "Erring Decentralization and Elite Politics in Papua," dalam *Renegotiating Boundaries: Local Politics in post-Suharto Indonesia*, eds. H. Schulte Nordholt dan G. van Klinken (Leiden: KITLV Press, 2007); lihat juga IPAC, *Carving Up Papua: More Districts, More Trouble*. IPAC, Report No. 3, (9 Oktober 2013). <https://www.jstor.org/stable/resrep07786>; lihat juga B. Anderson, *Papua's Insecurity: State Failure in the Indonesian Periphery* (Washington: East-West Center, 2015); dan lihat juga Ruhyanto, "The Perils of Prosperity," 490-498.

penduduk miskin yang diakibatkan oleh tidak adanya kebijakan pemerintah yang pro terhadap agenda pengentasan kemiskinan, serta tidak tersedianya saluran pengaduan yang dapat digunakan oleh masyarakat di sektor pelayanan dasar, seperti: pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.<sup>48</sup>

Hingga 2018, di tengah jumlah penduduk provinsi Papua dan Papua Barat hanya 1,2% dan 0,3% dari jumlah populasi penduduk Indonesia, namun jumlah korban kekerasan dan kejahatan di wilayah tersebut adalah terbanyak di Indonesia, dimana provinsi Papua mencapai 0,23 dan Provinsi Papua Barat mencapai 0,25 dari jumlah penduduk di wilayah tersebut. Di saat yang bersamaan, lantaran tingginya tingkat korban kekerasan dan kejahatan di wilayah Papua telah mengakibatkan indeks kebahagiaan di provinsi Papua tersebut terburuk di Indonesia (67.52), sedangkan untuk provinsi Papua Barat (71.73) jauh lebih baik dimana indeks kebahagiaan di wilayah tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat kebahagiaan Provinsi Indonesia yang mencapai 70.69.<sup>49</sup>

Sudah barang tentu, realitas ini menjadi sebuah tanda tanya besar tentang faktor determinan apa yang paling mendasari gagalnya pembangunan dan tata-kelola pemerintahan di Tanah Papua? Padahal, di luar daripada Otsus, guna mempercepat proses pembangunan di Papua Pemerintah RI juga telah menstimulasi pembentukan UP4B dan pengerahan berbagai Kementerian dan Lembaga RI melalui Inpres Nomor 5/2007, Perpres Nomor 66/2011,

48. Kemitraan, *Menuju Masyarakat yang Cerdas dan Pemerintah yang Responsif*, Kemitraan, September 2018, <https://www.igi.kemitraan.or.id/report/menuju-masyarakat-yang-cerdas-pemerintah-yang-responsif>

49. Badan Pusat Statistik, *Indeks Kebahagiaan Menurut Provinsi 2014-2017*, (BPS, 2018). <https://www.bps.go.id/dynamic/table/2017/05/04/1243/indeks-kebahagiaan-menurut-provinsi-2014-2017.html>



maupun Inpres Nomor 9/2017, namun sayangnya hasilnya belum berdampak signifikan.

Berangkat dari realitas tersebut, setidaknya terdapat tiga tesis penelitian yang telah berkembang dalam menjawab pertanyaan tersebut, yaitu;

- a) Sebagian penelitian yang bersifat positivistik menilai bahwa kegagalan pemerintahan di Tanah Papua dipengaruhi oleh minimnya IPM di wilayah tersebut yang diakibatkan oleh tidak meratanya ketersebaran fasilitas pendidikan yang memadai;
- b) Sebagian penelitian yang lain menilai bahwa kegagalan pemerintahan di Tanah Papua dipengaruhi oleh tidak linearnya sistem kelembagaan pemerintahan modern yang dikembangkan di Papua dengan kultur sosio-budaya tradisional OAP.
- c) Sebagian penelitian yang lain menilai bahwa kegagalan pemerintahan di Tanah Papua dipengaruhi oleh etnonasionalisme dan *momoria passionis* yang terjadi di era integrasi Papua ke pangkuan Indonesia di masa lalu.<sup>50</sup>

Meskipun begitu, tim peneliti menilai bahwa ada persoalan utama yang belum diangkat dan menjadi tesis penting dari para peneliti sosial-politik di Papua bahwa sejatinya hingga saat ini Papua belum mengalami *hegemony* dan *counter-hegemony* kuasa sepenuhnya, baik yang terjadi di era kolonial maupun era integrasi Indonesia. Salah satu faktor pemicu terjadinya fenomena tersebut adalah lantaran lantaran mayoritas OAP hidup di area terisolir

50. M. S. Widjojo, "Etnonasionalisme Papua Dalam Era Demokratisasi" dalam *Nasionalisme, Demokratisasi, dan Sentimen Primordial di Indonesia: Problematika Etnisitas versus Keindonesiaan* (Studi Kasus Aceh, Papua, Riau dan Bali), ed. Firman Noor (Jakarta: LIPI Press, 2008); lihat juga Widjojo ed., *Papua Road Map.*; dan lihat juga Richard Chauvel, *Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaption* (Washington: East-West Center, 2005)

dengan kondisi topografi yang curam. Setidaknya, faktor kondisi geografis tersebut telah berimplikasi terhadap tiga hal;

**1)** mayoritas OAP hidup dalam kelompok sosial yang kecil yang menghasilkan kultur sosial yang beragam serta terfragmentasi dalam kepemimpinan sub-etnis tingkat distrik;

**2)** kondisi geografis yang curam telah mengakibatkan sulitnya OAP dalam mengakses pelayanan publik, sumber pengetahuan maupun sumber informasi;

**3)** kondisi geografis yang curam, terfragmentasi dalam kultur sosial dan bahasa yang beragam telah mengakibatkan imajinasi nasionalisme masyarakat terbatas pada nasionalisme kesukuan tingkat distrik yang terbentuk secara eksklusif dan sulit dalam meregionalisasi nasionalisme secara kolektif. Dari tiga faktor ini dapat dipastikan bahwa kesadaran negara-bangsa, *state of imagination* dan transfer pengetahuan masyarakat tentang nilai kepublikan dan konsep tata-kelola masyarakat melalui pendekatan sistem pemerintahan yang modern cenderung minim.

Melalui gambaran di atas, setidaknya ada dua hal yang akan di ulas lebih jauh dalam tulisan ini, di antaranya ialah;

1) tentang sejauh mana *state of imagination* berkembang di dalam lanskap kultur birokrasi Papua semasa era pemberlakuan Otsus?

2) Sejauh mana *politic of recognition* melegitimasi aktivisme politik etnik OAP dalam Otsus mampu menjadi solusi alternatif dalam mengoptimalisasikan kinerja birokrasi daerah yang berupaya meningkatkan kualitas hidup OAP? Berangkat dari dua pertanyaan tersebut, tim peneliti berupaya mengulasnya melalui pendekatan sosio-historis dan politik-pemerintahan.

## 2.2 STATE OF IMAGINATION DAN HISTORISITAS BIROKRASI PAPUA: MENGURAI PROBLEM AWAL

Secara geografis, Papua yang merupakan bagian kepulauan Guinea Baru merupakan bagian dari kepulauan terbesar kedua di dunia.<sup>51</sup> Secara historis, besarnya kepulauan tersebut telah menjadikan tanah Papua diperebutkan oleh Raja-Raja Maluku di abad ke-16 dan bangsa-bangsa Eropa di abad ke-19.<sup>52</sup> Meskipun pada dasarnya tanah Papua pernah menjadi bagian dari dominasi Kesultanan Tidore pada 1453-1890, lalu penguasaan Belanda terhadap tanah Papua melalui *London Treaty* tahun 1824, namun harus diakui bahwa barulah pada 1898, sistem pemerintahan kolonial pertama di Tanah Papua –tepatnya dimana saat ini Manokwari– berdiri.<sup>53</sup>

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan konteks historisitas birokrasi di Tanah Papua, meskipun Kesultanan Tidore-Kepanjangangan tangan Kolonial Belanda-telah menguasai tanah Papua selama lebih dari tiga abad, namun kekuasaan kesultanan Tidore tidak lebih dari Kepulauan Raja Ampat (Waigeo, Salawati, Waigama dan Misool), Biak, Supiori, Soweik, Yapen, dan sembilan negeri yang dikenal dengan nama Amka, Wakare, Wardon, Usba, Beser, Warfandu, Mansemer, Mar dan Warsai serta empat kampung: Rumberpur, Rumberpon, Rumansarai, Angkaradifu atau Anggradifu yang berada di wilayah pesisir New Guinea Barat.<sup>54</sup> Kamp perwakilan Kesultanan Tidore di wilayah-wilayah tersebut hanya berorientasi pada penarikan upeti dari penduduk setempat dibandingkan

51. K. Müller, *Indonesian New Guinea: West Papua/ Irian Jaya* (Singapore: Periplus, 2001).

52. R. Sinaga, *Masa Kuasa Belanda di Papua 1898-1962* (Depok: Komunitas Bambu, 2013), 3-35.

53. P2Politik-LIPI, *Updating Papua Road Map*.

54. Sinaga, *Masa Kuasa Belanda*, 3-35.

membangun sistem pemerintahan maupun mendirikan pelayanan publik.<sup>55</sup>

Meskipun koloni Belanda secara tidak langsung menjadi penguasa atas Guinea Baru melalui simbol Kesultanan Tidore, namun Belanda baru mendirikan *Fort du Bus* sebagai pos pemerintahan administratif di Tanah Papua pada 24 Agustus 1828. Dalam perkembangannya, pendirian Benteng *Fort du Bus* tidak diikuti dengan pendirian pos-pos pemerintahan koloni Belanda lainnya karena wilayah tanah Papua yang meraka duduki ketika itu tidaklah memberikan keuntungan. Pada tahun 1836 *Fort du Bus* ditinggalkan karena mengganasnya penyakit malaria yang menyerang para serdadu Belanda di benteng tersebut.<sup>56</sup>

Pada 1898, Kolonial Belanda kembali membentuk pemerintahan di Guinea Baru dengan membentuk membentuk *Afdeling Nieuw Guinea* Utara (daerah yang terdiri atas bagian utara NNG di sebelah timur Tanjung Goede Hoop dan pulau-pulau sekitarnya) dan *Afdeling Nieuw Guinea* Barat dan Selatan (yang terdiri atas sebagian dari NNG dan pulau-pulau lain sekitarnya, termasuk gugusan Kepulauan Raja Ampat, di bawah seorang kontrolir pemerintahan). Hingga 1959, koloni Belanda telah membagi pemerintahan administratif Papua ke dalam enam *Afdeeling*, di antaranya;

- 1) *Afdeling Hollandia* ( meliputi Onderafdeling: Hollandia (Jayapura), Nimboran, Oost Bergland (Wamena), Sarmi);
- 2) *Afdeling Geelvink-Baai* (meliputi Onderafdeling: Schouten

---

55. Sinaga, *Masa Kuasa Belanda*, 44-45.

56. Meskipun begitu, walau pun belum dibangun kembali pos pemerintahan Belanda di Papua, para zending tetap berusaha mengabarkan injil di NNG sejak 5 Februari 1855 dengan tibanya Carl Wilhelm Ottow dan Johann Gottlob Geissler di Mansinam, Teluk Doreh, Manokwari. Lihat Sinaga, *Masa Kuasa Belanda*, 3-4.

Einlanden (Biak), Yapen, Waropen, Wandammen);

**3) Afdeling Centraal Nieuw Guinea** (meliputi onderafdeeling: Wisselmeren, Midden Bergland, West Bergland);

**4) Afdeling Zuid Nieuw Guinea** (meliputi onderafdeling: Merauke, Mappi, Boven-Digoel, Muju, Asmat);

**5) Afdeling Fak Fak** (meliputi Onderafdeling: Fak-Fak, Kaimana, Mimika);

**6) Afdeling West Nieuw Guinea** (meliputi Onderafdeling: Sorong, Raja Ampat, Manokwari, Ransiki, Teminaboean, Bintuni).<sup>57</sup>

Dalam konteks historis, sebelum adanya pembangunan pemerintahan kolonial, OAP tidak mengenal konsep kepemimpinan/pemerintahan dan perbedaan kelas yang jelas. Seorang yang ikut terlibat dalam pemenggalan kepala dianggap orang yang paling utama di dalam masyarakat. Para kepala kampung yang diangkat pemerintah umumnya tidak mampu bertindak dan menegakan kekuasaan sebagai pemimpin atas penduduk. OAP hidup dalam kelompok-kelompok suku/klan yang otonom dan saling bersaing antarsuku serta hidup dalam praktik-praktik adat perang suku, perbudakan dan saling balas dendam.<sup>58</sup> Adapun *Afdeling Centraal Nieuw Guinea* merupakan wilayah yang paling sedikit menerima dampak dari kebijakan pemerintahan kolonial, sebab pembangunan pemerintahan *Afdeling Centraal Nieuw Guinea* baru dilaksanakan menjelang berakhirnya kekuasaan Belanda di NNG.<sup>59</sup> Kebijakan politik etis yang diberlakukan oleh Koloni terhadap Hindia Belanda tahun 1901 turut berdampak terhadap modernisasi

---

57. J. H. F. Sollewijn Gelpke, "On the Origin of the Name Papua," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Deel 149, 2de Afl (1993): 318-332, 318. <https://www.jstor.org/stable/27864458>; dan lihat juga Sinaga, *Masa Kuasa Belanda*, 320.

58. Sinaga, *Masa Kuasa Belanda*, 175.

59. Sinaga, *Masa Kuasa Belanda*, 270.

sistem birokrasi kolonial di Tanah Papua yang bukan hanya sekadar melakukan eksploitasi SDA dan penarikan pajak terhadap masyarakat lokal, melainkan juga menerapkan sistem ketertiban dan keamanan, membangun infrastruktur transportasi, institusi pendidikan, maupun pelayanan kesehatan yang juga diperuntukkan bagi OAP. Pada era inilah, Kolonial Belanda mulai berorientasi mendirikan sistem pemerintahan di Tanah Papua yang lebih berorientasi *development administration* dengan mengedepankan konsep-konsep *civil servant* dibandingkan *colonial government* sebagaimana sebagaimana selama ini mereka terapkan di sebagian besar wilayah Indonesia.<sup>60</sup>

Richard Chauvel dalam *Papuan political imaginings of the 1960s: International Conflict and Local Nationalisms* menggambarkan bahwa sebelum kehadiran koloni Belanda di Tanah Papua, kondisi topografi yang sulit serta heterogenitas sub-etnis Papua menyebabkan tingkat kesadaran nasionalisme kepapuaan di kalangan OAP rendah.<sup>61</sup> Melalui sistem pendidikan, koloni Belanda berusaha membangkitkan *new nation* di tengah-tengah OAP, keluar dari tribalisme menuju nasionalisme dan rasialisme Papua yang berbeda dengan nasionalisme Indonesia.<sup>62</sup> Hingga 1949, telah terdapat 1700 OAP yang terdidik dan mulai menduduki posisi sebagai kepala sekolah di desa-desa, pejabat

60. Lihat C. L. M. Penders, *The West New Guinea Debacle: Dutch Colonization and Indonesia, 1945-1962* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2002) dalam review buku oleh Brad Simpson, "Power, Politics, and Primitivism: West Papua's Struggle for Self-Determination" *Critical Asian Studies*, Vol. 35: 3 (2003): 469-475. <https://doi.org/10.1080/1467271032000109944>; dan lihat juga Liontine Visser ed., *Governing New Guinea: An Oral history of Papuan Administrators, 1950-1990* (Leiden: KITLV Press, 2012).

61. Chauvel, *Constructing Papuan Nationalism*, 39-43.

62. Kivimäki dan Thorning, "Democratization and Regional Power," 653.; lihat juga Chauvel, *Constructing Papuan Nationalism*.; lihat juga Visser ed., *Governing New Guinea*.

pemerintah, para medis, pejabat pertanian, pedagang, maupun polisi, sekaligus menjadi *broker* yang menjadi kepanjangan tangan Kolonial dan berperan menerjemahkan kepentingan politik Koloni kepada masyarakat lokal.<sup>63</sup>

Meskipun begitu, harus diakui bahwa persebaran tenaga terdidik Papua bukan berarti tanpa permasalahan. Mengingat berdasarkan hasil sensus penduduk 1959, terdapat 700.000 total populasi OAP dimana 94,2% dari mereka masih tinggal di daerah pedalaman dan terisolir dengan mayoritas setiap pemukiman di huni oleh kurang dari 150 orang.<sup>64</sup> Lebih daripada itu, hingga 1950, Kolonial Belanda hanya mampu mengelola 40% wilayah Papua.<sup>65</sup> Sudah barang tentu, angka ini menunjukkan bahwa kesatuan hidup penduduk OAP cenderung berciri kecil atau bersifat segmentaris sekaligus menunjukkan bahwa sistem *development administration* yang dikembangkan oleh Kolonial Belanda di wilayah tersebut tidak berjalan dengan baik. Hingga 2001, di tengah gagasan perumusan UU Otsus, kondisi OAP sangatlah memprihatinkan, di mana 75% OAP tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang layak, 50% tidak pernah mendapatkan pendidikan formal atau tidak lulus dari

63. Chauvel, *Constructing Papuan Nationalism*, 40.; lihat juga Visser ed., *Governing New Guinea*; dan lihat juga Laksmi A. Savitri, "State Actor Brokerage in Large-scale Agricultural Investment in Indonesia," dipresentasikan dalam *konferensi internasional Land Grabbing, Conflict and Agrarian-Environmental Transformations: Perspectives from East and Southeast Asia*, Chiang Mai University, Thailand, 5-6 Juni 2015. [https://www.iss.nl/sites/corporate/files/CMCP\\_77-Savitri.pdf](https://www.iss.nl/sites/corporate/files/CMCP_77-Savitri.pdf).
64. Johsz R. Mansoben, "Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya, Indonesia: Studi Perbandingan," Disertasi Doktorat, Leiden University and the Indonesian Institute of Sciences, 2014, 28-29; dan lihat juga Richard Chauvel, "Papuan Political Imaginings of the 1960s: International Conflict and Local Nationalisms," dipresentasikan dalam *Seminar on the Act of Free Choice*, 2008: 39-59, 41. [http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkings1945-1969/DekolonisatieVanIndonesieEnHetZelfbeschikingsrechtVanDePapoea/papers\\_pdf/chauvel](http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkings1945-1969/DekolonisatieVanIndonesieEnHetZelfbeschikingsrechtVanDePapoea/papers_pdf/chauvel).
65. Simpson, "Power, Politics, and Primitivism," 470.

sekolah dasar, 22% hanya lulus dari sekolah dasar, 10% lulus dari sekolah menengah umum, dan 2% lulus dari universitas.<sup>66</sup>

Sudah barang tentu, problem limitasi jangkauan birokrasi di masa lalu, sistem kesatuan hidup OAP yang bersifat segmentaris, serta minimnya OAP telah mengakibatkan pembentukan *state of imagination* -sebuah imajinasi bernegara abad ke-20 yang dalam pendakatan Hobbesian dimaknai sebagai sebuah representasi *volonté generale*, sebuah kesatuan dan kemauan dari masyarakat untuk membentuk sebuah seperangkat peraturan dan pemerintahan bersama- di wilayah Papua tidak dapat terbentuk dengan baik. Lebih lanjut, dalam perspektif Gramscian, yang terjadi justru adalah sebaliknya, akses-akses kuasa negara di tengah tidak terbentuknya *state of imagination* hanya akan memberikan angin segar bagi setiap elit lokal dalam mengakumulasi kekayaan pribadi yang dihasilkan dari sumber daya negara, yang hanya menciptakan paradoks ketidakcukupan dan ketidakberadaan -*the paradox of inadequacy and dispensibility*- fungsi sebuah negara di wilayah itu sendiri.<sup>67</sup>

### 2.3 SISTEM POLITIK MASYARAKAT ETNIK PAPUA: MENGURAI PROBLEM LANJUTAN

Di sisi lain, hal yang juga merintang pembentukan *state of imagination dan nation-state* ialah berkait dengan polarisasi masyarakat etnis Papua yang begitu besar. Setidaknya terdapatnya

66. Yulia Sugandi, *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua* (Frederich Ebert Stiftung: Jakarta, 2008), 5.

67. T. B. Hansen dan F. Stepputat eds., *States of Imagination: Ethnographic Explorations of the Postcolonial State* (Durham dan London: Duke University Press, 2001)



1.100 bahasa yang berbeda di dalam lanskap masyarakat sub-etnis lokal Papua, atau seperlima dari seluruh total bahasa dunia ada di Tanah Papua.<sup>68</sup> Tentu saja, besarnya keanekaragaman bahasa telah mengakibatkan terhambatnya proses *transfer of knowledge* dan interkoneksi informasi antar etnis di Papua.

Lebih lanjut, dalam pertautannya antara masyarakat etnis Papua dengan politik, Mansoben<sup>69</sup> mengungkapkan bahwa karakter politik etnis OAP terbagi ke dalam empat karakteristik dan sangat ditentukan oleh kondisi dan zona ekologis di setiap wilayah, di antaranya;

- 1)** Zona ekologi 'Rawa' (*Swampy Areas*) seperti: Suku Asmat dan orang Mimika, 'Daerah Pantai' dan 'Muara Sungai' (*Coastal & Riverine*);
- 2)** Zona 'Dataran Pantai' (*Coastal Lowland Areas*);
- 3)** Zona 'Kaki-kaki Gunung' serta Lembah-lembah Kecil' (*Foothills and Small Valleys*) seperti: Suku Muyu, Geyem, dan Arso;
- 4)** Zona 'Pegunungan Tinggi' (*Highlands*) seperti: Suku Dani dan Me. Karakteristik lingkungan ekologi ini berpengaruh terhadap pola-pola adaptasi yang tercermin di dalam sistem mata pencaharian hidup meliputi sistem teknologinya, juga berpengaruh terhadap aspek-aspek budaya lain seperti misalnya budaya politik, organisasi sosial, dan sistem ideologi atau sistem kepercayaannya.

Selanjutnya, dari perbedaan karakteristik kondisi dan zona ekologis tersebut telah melahirkan empat karakteristik sistem kepemimpinan dan politik tradisional yang berbeda-beda di Tanah Papua, di antaranya;<sup>70</sup>

---

68. Chris Hugh Ballard, "Synthetic Histories: Possible Futures for Papuan Pasts," *Reviews in Anthropology*, Vol. 39, Issue 4 (2010).

69. Mansoben, "Sistem Politik Tradisional," 26.

70. Mansoben, "Sistem Politik Tradisional," 34-36

**1) Sistem Pria berwibawa (*Big-Man*)** dianut oleh: Suku Asmat, Me, Ngalum, Dani, Meybrat, dan Muyu.

**2) Sistem Kerajaan** berkembang di daerah: Kepulauan Raja Ampat, Semenanjung Onim (Fak-Fak), Teluk MacCluer (Teluk Berau), dan Daerah Kaimana.

**3) Sistem Ondoafi** dianut oleh: orang Sentani, Genyem (Nimboran), Tabla, Yaona, Yakari-Skou, Arso-Waris, penduduk Teluk Jayapura dan Teluk Humboldt (Yos Sudarso).

**4) Sistem Kepemimpinan Campuran** yang merupakan sistem percampuran dalam penentuan kedudukan kepemimpinan yang diperoleh melalui pewarisan dan pencapaian dianut oleh: penduduk Teluk Cenderawasih, seperti orang Biak, Wandamen, Waropen, Yawa, dan Maya. Meskipun begitu, harus dipahami bahwa gambaran sistem politik tradisional yang dipaparkan oleh Mansoben sangat bersifat lokalitas dan seringkali hanya terdomestifikasi di tingkat distrik dan tidak memiliki struktur fungsional yang jelas sebagai lembaga sosial masyarakat yang baik. Faktor klanisasi, kondisi geografis, dan banyaknya tradisi hidup OAP yang nomaden menyebabkan kekuasaan komunal yang *ter-inter-connected* antara satu daerah dengan daerah lain cenderung tidak terjadi.

Meski pun begitu, di era kontemporer sistem politik tradisional yang paling mendominasi di wilayah Papua ialah sistem kepemimpinan *Big-Man*. Dalam tradisi politik OAP, sosok *Big-Man* merupakan sosok pemimpin *klan* yang mampu memainkan sentimen etnis, serta mengalokasi dan merealokasi “kekayaan” yang dimilikinya untuk didistribusikan kepada klan dalam rangka membangun sekaligus menjaga stabilitas patronase politik. Ketika memasuki era demokratisasi-birokratisasi, model kepemimpinan *Big-Man* yang selama ini diterapkan dalam sistem kepemimpinan

*klan* juga diterapkan ke dalam sistem Pilkada dan kepemimpinan pemerintahan daerah.<sup>71</sup> Dampaknya adalah muncul pemahaman dasar bahwa pejabat pemerintah daerah harus mampu “membagi-bagi uang dan kekuasaan” terhadap *klan* mereka. Dalam konsep kepemimpinan *Big-Man*, penentuan seseorang untuk menduduki posisi Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Eselon II, hingga Eselon III tidak ditentukan berdasarkan profesionalisme kinerja, kapasitas, maupun keahlian seseorang dalam menjalankan fungsi setiap dinas, melainkan ditentukan berdasarkan patronase kesukuan.<sup>72</sup>

Lebih lanjut, realitas *Big-Man* dalam praktik berdemokrasi dan menjalankan fungsi birokrasi memiliki beberapa implikasi, di antaranya;

- 1) konsep kepemimpinan *Big-Man* telah memperkuat perpecahan suku dalam politik lokal;
- 2) pendistribusian aset negara menjadi instrumen terpenting dalam membangun patronase dan loyalitas kesukuan;
- 3) Tidak adanya stabilitas sistem pemerintahan yang ditetapkan dalam konsep kepemimpinan *Big-Man* lantaran karakteristik pemerintahan secara otoritatif ditentukan dan disesuaikan dengan kepentingan politik para “Pemimpin Berwibawa.”

Melekatnya tradisi kepemimpinan *Big-Man* dalam OAP merupakan tradisi yang selama ini berkembang di dalam struktur masyarakat Bangsa Melanesia yang tersebar di wilayah Indonesia Timur, Indo-Pasifik, Afrika, maupun Amerika Selatan. Secara

71. Mansoben, “Sistem Politik Tradisional”; lihat juga *Kemitraan, Menuju Masyarakat yang Cerdas.*; dan lihat juga McGibbon, *Plural Society in Peril*, 37.

72. McGibbon, *Plural Society in Peril*, 37; dan lihat juga Fitria Fitriani, Bert Hofman, dan Kai Kaiser, “Unity in Diversity? The Creation of New Local Governments in a Decentralising Indonesia,” *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 41:1 (2005):57-79, 66. <https://doi.org/10.1080/00074910500072690>

komparatif, realitas *Big Man* dalam tradisi pemerintahan Papua tidak jauh berbeda dengan tradisi pemerintahan Afrika yang mengindikasikan bahwa *state of imagination* dan *sense of publicness* di dua wilayah tersebut masih tergolong lemah. Sebagaimana di Afrika, *state* dan *bureaucracy* yang terdapat di Papua tidak di susun dengan dengan sistem yang menghubungkan antara pemimpin pemerintah daerah dengan 'publik', melainkan dengan *patron* dan *client*. Aset negara bukanlah diperuntukkan bagi kepentingan publik, melainkan menjadi imbalan yang diperuntukkan bagi *patron* dan *client* yang selalu menjaga loyalitas terhadap pimpinan pemerintah daerah.<sup>73</sup>

Di Kota Sorong misalnya, suku Maybrat selalu memenangkan kursi Walikota, Ketua DPRD, hingga Ketua Umum Partai di wilayah tersebut selama tiga puluh tahun. Guna mempertahankan kekuasaannya dari bayang-bayang suku Moi yang ingin merebut kursi nomor satu di kota tersebut, suku Maybrat memberikan banyak *privilege* terhadap orang-orang Bugis -baik di bidang pendidikan, perdagangan, maupun proyek-proyek pemerintahan- yang selama tiga dekade selalu menjadi garda terdepan dalam mendukung kepemimpinan suku Maybrat di kota tersebut.<sup>74</sup> Lebih lanjut, imbas daripada konflik yang terus menerus berlangsung antara suku

73. Victoria J. Baker, "Elders in the Shadow of the Big-Man," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 139, no: 1, Leiden (1983): 1-17; lihat juga A. Strathern, "Violence and political change in Papua New Guinea," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Politics, Tradition and Change in the Pacific*, 149, no: 4 (1993): 718-736; lihat juga L. R. Arriola, "Patronage and Political Stability in Africa," *Comparative Political Studies*, 42 no. 10 (2009): 1339-1362, 1344.; lihat juga K. Utas ed., *African Conflict and Informal Power: Big Men and Networks* (New York: Zed Books, 2012); dan lihat juga G. Hyden, *African Politics in Comparative Perspectives (Second Edition)* (New York: Cambridge University Press, 2013).

74. F. L. Snanfi, et.al., "Politik Identitas Etnik Asli Papua Berkontestasi dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sorong," *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 20, No. 2 (Juli 2018): 122 - 131.

Maybrat dan suku Moi di wilayah Sorong ialah dimekarkannya DOB baru melalui pembentukan kabupaten berdasarkan wilayah etnis, seperti kabupaten Maybrat yang telah diresmikan sejak 2009 dan rencana pembentukan kabupaten Malamoi (Moi) yang hingga saat ini masih dalam kajian pembentukan.

Sejatinya, di wilayah Papua, ide tentang pemekaran DOB berdasarkan marginalisasi etnis mayoritas terhadap etnis tertentu bukanlah suatu hal yang baru. Sejak 2002 hingga tahun 2015, dari 29 kabupaten dan kota yang ada di provinsi Papua, terdapat 8 kabupaten yang dinamakan berdasarkan nama etnis mayoritas, seperti; Kabupaten Asmat (Suku Asmat), Lanny Jaya (Suku Lani), Yalimo (Suku Yali), Nduga (Suku Nduga), Biak Numfor (Suku Biak), Yahukimo (akronim dari Suku Yali, Hubla, Kimyal, dan Momuna), Sarmi (akronim dari Suku Sobey, Armi, Rumbuai, Manierm, dan Isirawa), Dogiyai (nama gunung, sebuah simbol pemersatu suku Mapia dan Kamu). Di Provinsi Papua Barat, terdapat 2 kabupaten yang penamaannya berdasarkan nama etnis mayoritas, seperti kabupaten Meybrat itu sendiri, dan kabupaten pegunungan Arfak (Suku Arfak).<sup>75</sup> Hingga 2016, dari 31 usulan kabupaten/kota di wilayah Papua, 5 nama usulan kabupaten tersebut berasal dari nama etnis dominan di wilayah tersebut, seperti; kabupaten Moni (Suku Moni), Muyu (Suku Muyu), Yalimek (Suku Yalimek), Ketengban (Suku Ketengban), Byak Napa Swandiwe (Suku Biak).

Sudah barang tentu, realitas ketergantungan elit lokal terhadap loyalitas patron-client kelompok etnis untuk mempertahankan status kepemimpinannya justru telah meradikalisasi

75. PAC, *Carving Up Papua*.

kelompok etnis lain yang terdiskriminasi oleh budaya nepotisme tersebut untuk melakukan perlawanan, baik dengan cara yang *soft*, yaitu mengajukan proposal pemekaran DOB, menghadirkan calon pemimpin tandingan di Pilkada yang akan datang maupun dengan menggunakan dengan cara yang *hard*, langsung melakukan konfrontasi dan tindak kekerasan.

Dalam konteks DOB, hal tersebut terbukti di mana mayoritas pengusung pemekaran DOB adalah para eks-Bupati, anggota parlemen daerah, pemimpin etnis, maupun para pengusaha lokal yang ingin mempertahankan atau mendapatkan kekuasaan di DOB, contohnya ialah; di 2003 Herman Monim dan Abraham Atururi yang sempat wakil gubernur provinsi Papua berupaya untuk memecah Provinsi Papua ke dalam beberapa Provinsi guna memberikan ruang bagi mereka untuk menduduki posisi Gubernur di Provinsi tersebut, Johannes Gluba Gebze, mantan Bupati Merauke yang menggagas ide pembentukan Provinsi Papua Selatan selepas ia meninggalkan masa jabatannya selama dua periode. Di Kabupaten Jayawijaya, ide tentang pemekaran DOB Kabupaten Okikha dari Kabupaten tersebut digagas oleh mereka yang kalah dari Pilkada Jayawijaya. Di Sorong, sebuah kelompok yang di pimpin oleh Yosafat Kambu, tokoh etnis Meybrat menggagas pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Di kemudian hari, gagasan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya tersebut mendapatkan pertentangan dari Jimmy Demianus Ijie, yang saat itu tengah menjabat wakil ketua DPRD provinsi Papua Barat, yang mana dirinya juga sedang mempersiapkan pengusulan pembentukan provinsi Sorong Raya di daerah yang sama. Kondisi yang sama juga terjadi di kabupaten Biak, di mana sekelompok elit lokal menuntut pembentukan

Provinsi Papua Tengah dengan menjadikan kabupaten tersebut sebagai ibukotanya, serta mengusung Laksamana Purn. Dick Henk Webiser selaku tokoh asli Papua sebagai Gubernur di Provinsi yang di usulkan tersebut. Sementara, sekelompok elit lokal lain yang terdiri dari perwakilan 16 Kabupaten mengusulkan pembentukan provinsi Papua Tengah dengan menjadikan Nabire sebagai ibukota provinsi, dan sekelompok elit lokal dari wilayah Mimika juga menuntut kabupaten Mimika sebagai ibukota provinsi Papua Tengah, serta menuntut agar Kabupaten Biak, Supiori, Serui, dan Waropen tidak masuk ke dalam provinsi yang tengah di usulkan tersebut.<sup>76</sup> Jika ditelisik lebih jauh, penolakan penggabungan kabupaten Biak, Supiori, Serui, dan Waropen disinyalir lantaran adanya perbedaan status wilayah adat, di mana kabupaten-kabupaten tersebut di dominasi oleh suku Biak yang masuk kategori wilayah adat Saireri, sedangkan kabupaten Mimika dan tujuh kabupaten di sekelilingnya merupakan wilayah adat Mee-Pago yang di dominasi oleh suku Mee.

Kentalnya pertautan antara status DOB dengan etnis dominan juga seringkali berujung pada konflik etnis yang berakibat pada tindak kekerasan. Pada periode 2010-2017, tercatat beberapa DOB seringkali terjadi "konflik" antar suku maupun antar pendukung kontestan ketika Pilkada, seperti; kota Jayapura, kota Manokwari, kabupaten Puncak, Yahukimo, Lanny Jaya, Tolikara, Dogiyai, Nabire, Waropen, Memberamo Raya, Boven Digoel, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Intan Jaya, maupun kabupaten yang sudah lama

76. Timmer, "Erring Decentralization and Elite."; dan lihat juga Nino Viartasiwi, "Autonomy and Decentralization as Remedies? Counterinsurgency Tactics for the West Papua Conflict in Democratic Indonesia," *The Institute of International Relations and Area Studies (IIRAS)*, 27-1 (June 2014), 294.

berdiri seperti Jayawijaya.<sup>77</sup> Lebih lanjut, konflik-konflik tersebut tidak hanya telah memakan korban jiwa, melainkan juga telah menghancurkan banyak infrastruktur dan gedung pemerintahan.

Di kabupaten Puncak, pemerintahan sempat diberhentikan sementara setelah terjadinya insiden berdarah yang menelan 57 korban jiwa dan puluhan kantor pemerintahan rusak parah lantaran konflik Pilkada tahun 2011 silam. Di 2012, pemerintah Kabupaten Puncak akhirnya terpaksa harus menyalurkan dana dari APBD Kabupaten Puncak Rp17 miliar untuk membayar apa yang disebut 'uang darah' (kompensasi) untuk para korban insiden berdarah tersebut, Rp300 juta untuk setiap orang yang terbunuh, dan Rp1 juta untuk setiap orang yang luka-luka.<sup>78</sup>

Secara umum, harus diakui bahwa bertambahnya jumlah DOB di wilayah Papua telah meningkatkan PDB di wilayah tersebut, namun belum berimplikasi secara signifikan terhadap tingkat pertumbuhan PAD di Papua. Hal tersebut dibuktikan hingga 2018, PAD provinsi Papua dan Papua Barat hanya berkontribusi 7,4% dan 5,8% terhadap APBD kedua provinsi tersebut. Lebih lanjut, sepanjang tahun 2017-2018, 7 Kabupaten di provinsi Papua dan Papua Barat dinominasikan sebagai kabupaten dengan tingkat PAD terendah di Indonesia, di antaranya; kabupaten Mamberamo Tengah (0,1%), Maybrat (0,2%), Tambrau (0,2%), Diyai (0,3%), Dogiyai (0,3%), Pegunungan Arfak (0,4%), dan Tolikara (0,4%), di tengah maraknya perusahaan dan industri baru tumbuh di antara DOB-DOB tersebut.<sup>79</sup>

---

77. K. Pasaribu, *Noken dan Konflik Pemilu: Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua* (Jakarta: Perludem, 2016).

78. IPAC, *Carving Up Papua*; dan lihat juga Viartasiwi, "Autonomy and Decentralization."

79. Resosudarmo, et al., "Development in Papua"; lihat juga Anderson, *Papua's Insecurity*; dan lihat juga Kemenkeu, *Ringkasan APBD 2018*.



Berangkat dari gambaran di atas, *politic of recognition* yang meligitimasi sistem politik etnik OAP melalui Otsus justru menjadi *critical junctures* yang mana tuntutan akan pemekaran DOB dalam rangka mengakomodasi *positioning* dan *placing* kelompok etnis dominan yang berada dalam suatu letak geografis tertentu hanya akan menjadi 'lingkaran setan' yang terus menerus mereproduksi konflik etnis, *chaotic government*, korupsi yang kian terlokalisasi, tuntutan disintegrasi, serta munculnya 'dinasti kerajaan' baru di tingkat lokal, serta perasaan 'alienasi' bagi etnis yang terpinggirkan.<sup>80</sup>

80. V. R. Hadiz, "Decentralisation and Democracy in Indonesia; A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives," *Southeast Asia Research Centre, Working Paper Series 47* (2003); lihat juga D. Kingsbury dan H. Aveling eds., *Autonomy and Disintegration in Indonesia* (London: Routledge Curzon, 2003); lihat juga Jacques Bertrand, *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004); lihat juga T. Ju Lan et.al., *Klaim, Kontestasi & Konflik Identitas: Lokalitas vis-à-vis Nasionalitas* (Jakarta: LIPI Press, 2006); lihat juga Eva-Lotta Hedman ed., "Dynamics of Conflict and Displacement in Papua, Indonesia," *Refugee Studies Centre, Working Paper No. 42* (2007); dan lihat juga F. Heiduk, "Two Sides of the Same Coin? Separatism and Democratization in Post-Suharto Indonesia," dalam *Democratization in Post-Suharto Indonesia*, M. Bunte dan A. Ufen eds. (London: Routledge, 2009).



## BAB 3

# MARGINALISASI DALAM NARASI OAP

### 3.1 PENGANTAR

MARGINALISASI dalam tulisan ini berupa proses-proses sosial OAP menjadi terpinggirkan dalam pembangunan sosial ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah. Juga termasuk semakin terbatasnya ruang partisipasi OAP baik dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan maupun untuk menikmati sumber-sumber ekonomi dan sosial- budaya. Beberapa kajian mengenai persoalan ini sudah banyak ditulis, misalnya oleh Tania Li yang menuliskan bahwa strategi pembangunan Indonesia seringkali melanjutkan kebijakan Belanda yaitu memindahkan OAP dari daerah terpencil atau terisolasi ke daerah yang dapat dikontrol oleh Pemerintah. Kebijakan ini memunculkan kritik karena telah melemahkan kultur komunitas etnis yang menjadi target dan memindahkan mereka dari tanah leluhurnya dan tempat bekerjanya ke dalam suatu tempat baru. Kampung baru tersebut dalam perkembangannya ditandai

dengan kemiskinan, pelayanan kesehatan yang kurang, kekurangan gizi, dislokasi budaya, ketergantungan dan keputusasaan.<sup>81</sup>

Aspek lain yang banyak dikaji dari pembangunan di Tanah Papua disampaikan oleh Jim Elmslie pada 2010, bahwa salah satu dampak pembangunan oleh Pemerintah Indonesia adalah depopulasi OAP.<sup>82</sup> Elmslie memprediksikan bahwa pada 2050, penduduk Tanah Papua akan lebih didominasi oleh pendatang dari luar Papua daripada orang asli, yakni sebanyak 60%. Bahkan, dalam artikel lainnya, Elmslie dan Webb-Ganon mengatakan bahwa fenomena depopulasi ini dapat disebut sebagai *slow motion genocide* terhadap OAP.<sup>83</sup> Terlepas kita tidak sepakat dengan pandangan ini, perlu kajian yang lebih mendalam apakah benar ada depopulasi OAP pada masa kini. Salah satu kajian terbaru, mengenai perubahan sosial demografi dilaksanakan oleh Tim Penelitian Prioritas Nasional Papua LIPI, dengan bersumber dari Sensus Penduduk 2010, mengambil kasus Provinsi Papua Barat, menunjukkan bahwa sekitar 51% penduduk Papua Barat memiliki ayah atau ibu atau kedua-duanya yang berasal dari luar Papua.<sup>84</sup> Artinya di daerah ini proporsi OAP yang kedua orang tuanya benar-benar dari rumpun ras Melanesia hanya mencapai 49%.

Marginalisasi dan depopulasi yang dijelaskan oleh hasil penelitian di muka terjadi sebelum 2010, tulisan ini akan melakukan *update*, apakah marginalisasi OAP tersebut sudah mengalami

---

81. T. M. Li, "Compromising power: Development, culture, and rule in Indonesia," *Cultural Anthropology*, 14 (3), (1999): 295-322.

82. Jim Elmslie, "West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: "Slow Motion Genocide" Or Not?" *Centre for Peace and Conflict Studies*, working paper no. 11/1 (2010).

83. Jim Elmslie dan Camellia Webb-Gannon, "A slow-motion genocide: Indonesian rule in West Papua," *Griffith Journal of Law & Human Dignity* 1, no. 2 (2014).

84. Tim Prioritas Nasional Papua-LIPI, *Policy Paper Strategi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak untuk OAP di Papua Barat* (Jakarta: Kedeputusan IPSK-LIPI, 2019).

perbaikan berubah mengingat pemerintah terutama pada masa pemerintahan presiden Jokowi sudah banyak melakukan pembangunan baik di Papua maupun Papua Barat.

### 3.2 GAMBARAN PERSOALAN OAP

Persoalan OAP dalam bab ini memfokuskan pada aspek-aspek ekonomi dan sosial budaya, terutama pada persoalan pendidikan dan kesehatan. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan adalah IPM. Kalau dilihat dari 2010 sampai 2018, IPM Provinsi Papua dan Papua Barat terus mengalami kebaikan tetapi masih jauh di bawah rata-rata IPM nasional. Sebagai catatan, di kabupaten-kabupaten yang masih didominasi penduduknya oleh OAP, rata-rata IPM nya cukup rendah. Misalnya Kabupaten Nduga, Kab Tambrauw, dan Pegunungan Arfak memiliki angka IPM 56 pada 2018. Sebaliknya, di kota atau kabupaten yang penduduknya terdapat pendatang dalam jumlah yang dominan atau signifikan, angka IPM nya rata-rata tinggi seperti Kota Sorong dan Kota Jayapura. Berikut data lengkap IPM Papua dan Papua Barat.<sup>85</sup> Perlu dicatat bahwa kabupaten-kabupaten yang memiliki IPM rendah dan tingkat kemiskinan tinggi biasanya pada kabupaten pemekaran. Daerah-daerah tersebut masih mencari model pembangunan yang tepat dan memiliki kapasitas yang terbatas dalam memberikan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Sedangkan IPM di kabupaten induk yang pada umumnya memiliki jumlah pendatang secara signifikan memiliki IPM lebih tinggi.

---

85. LIPI dan TAF, *Jalan untuk Komunitas: Membangun Infrastruktur Konektivitas Jalan untuk Penghidupan OAP dan Lingkungan Hidup (Laporan hasil penelitian Dampak Infrastruktur terhadap Kehidupan dan Penghidupan OAP)* (Jakarta: LIPI dan TAF, 2018).

Tabel 3. 1 Indeks Pembangunan Manusia di Papua dan Papua Barat

IPM	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Papua	59,6	59,9	60,30	60,91	61,28	61,73	62,21	62,99	63,74
Papua Barat	54,45	55,01	55,55	56,25	56,75	57,25	58,05	59,09	60,06
Indonesia	66,53	67,70	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81	71,30

Sumber: BPS Papua Dalam Angka (2010-2018), Papua Barat dalam Angka (2010-2018)

Persoalan kesehatan paling substansial di antaranya adalah tingkat kematian bayi di beberapa wilayah. Sebagai contoh, pada 2006, di Kabupaten Jayawijaya menurut SKPKC, tingkat kematian bayi sebanyak 78 dari 2.292 atau 34 bayi mati per 1.000 kelahiran, bersumber dari BPS Provinsi Papua. Ternyata data ini tidak ditemukan di Kabupaten Jayawijaya, mereka hanya mencatatnya di kertas. Pada tahun yang sama, harian Sinar Harapan memberitakan bahwa lima orang meninggal setiap hari di Wamena, ibukota kabupaten Jayawijaya akibat pelayanan kesehatan yang buruk. Data 2017 menunjukkan kondisi pada 2016, dimana angka kematian bayi mencapai 30 dan balita mencapai 17 per 1000 kelahiran di kabupaten ini. Data provinsi menunjukkan bahwa angka kematian bayi per 1000 kelahiran di Provinsi Papua dari 2007 ke 2012 meningkat dari 41 ke 54.<sup>86</sup>

86. Dinas Kesehatan Provinsi Papua, *Profil Kesehatan Provinsi Papua 2017* (Jayapura: Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 2018).

Penelitian terbaru Tim Peneliti Prioritas Nasional Papua menggambarkan kondisi kesehatan ibu dan anak di Papua Barat pada periode 2012-2018 sebagai berikut.<sup>87</sup> Angka kematian bayi di Provinsi Papua Barat mencapai 74 per 1000 kelahiran pada 2012, sedangkan angka kematian balita mencapai 109 per 1000 jiwa pada tahun yang sama. Angka kematian bayi tersebut jauh tinggi dari angka nasional sebesar 34 per 1000 kelahiran dan angka kematian balita lebih tinggi dari angka nasional 43 per 1000 jiwa pada tahun yang sama. Gambaran lengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

*Tabel 3.2 Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Papua Barat*

<b>Gambaran Kesehatan Ibu dan Anak</b>	<b>Papua Barat</b>	<b>Indonesia</b>
Angka Kematian Bayi	74/1000 kelahiran (2012)	34/1000 kelahiran (2012)
Angka Kematian Balita	109/1000 (2012)	43/1000 (2012)
Angka Kematian Ibu	233/100.000 (2017)	305/100.000 (2015)
Prevalensi Balita dan Gizi Buruk dan kurang	19,2% (2018)	17,7% (2018)
Prevalensi Balita Stunting	27,8% (2018)	30,8% (2018).

Sumber: BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF (2013), Kemnekes RI (2019), Dinas Kesehatan Papua Barat (2018).

Hasil penelitian tersebut, menyebutkan beberapa catatan yang menunjukkan masih kentalnya tradisi budaya dalam kesehatan yang dianggap belum sesuai dengan perilaku kesehatan modern.<sup>88</sup> Misalnya, perempuan asli Papua, yang menetap di daerah terpencil dan terisolir atau yang belum memiliki akses ke pelayanan kesehatan, ketika melahirkan anaknya cenderung

87. Tim Prioritas Nasional Papua-LIPI, *Policy Paper Strategi Peningkatan*.

88. Tim Prioritas Nasional Papua-LIPI, *Policy Paper Strategi Peningkatan*, 22-23.

meminta tolong ke dukun karena tenaga kesehatan dianggap sebagai orang luar. Hal ini terkait dengan masih adanya pantangan membuka bagian tubuh yang sensitif di hadapan orang yang tidak dikenal kecuali anggota keluarga atau dukun yang sudah dikenal, sehingga tenaga kesehatan menjadi alternatif jika sudah tidak ada lagi dukun. Pandangan lain ialah persalinan sebagai sesuatu proses natural sehingga tidak perlu dipersoalkan siapa yang membantu kelahirannya karena setiap bayi sudah memiliki kepastian dari Yang Maha Kuasa apakah lahir selamat atau tidak. Kemudian, selama dua bulan, ibu yang melahirkan dan bayinya tidak diperbolehkan keluar kamar, sehingga jarang memeriksa bayinya ke pusat kesehatan masyarakat. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa perempuan Papua yang hamil kebanyakan masih bekerja di ladang karena mereka tetap bertanggung jawab dalam pengadaan dan pengolahan makanan sehari-hari sehingga tidak memeriksakan kehamilan secara rutin. Sebagai catatan bahwa deskripsi ini tidak menggambarkan kondisi kesehatan di Tanah Papua secara umum karena ditemukan di Tambrau, daerah pemekaran kabupaten Sorong. Kondisi ini berbeda tentunya dengan kabupaten Sorong dan kota Sorong yang relatif lebih maju dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar.

Kemudian terkait dengan pendidikan, Afriansyah dkk, merujuk pada sejumlah laporan menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan pendidikan di Tanah Papua cukup rumit dan kompleks.<sup>89</sup> Pelayanan pendidikan yang berkualitas dengan memperhitungkan kondisi kesulitan geografis, demografi, sosial budaya OAP

89. Anggi Afriansyah, Dini D. Kusumaningrum, Andhika A. Baskoro, dan P.S. Prasojito Ari, Policy Paper: Alternatif Pendidikan Bagi Orang Asli di Provinsi Papua Barat (Jakarta: Kedepuitan IPSK-LIPI, 2019), 9.



belum dilaksanakan. Hal ini diperlihatkan oleh ketidakhadiran guru, sulitnya akses ke sekolah, kurikulum yang belum sesuai dengan kondisi sosial budaya, kualitas pembelajaran yang tidak memadai, manajemen sekolah yang buruk. Selain itu, masih banyak keterbatasan anak-anak untuk belajar dan mengembangkan diri, pendidikan di sekolah tidak mendukung imajinasi anak-anak Papua Barat dan ketersediaan lapangan pekerjaan.<sup>90</sup> Di samping itu, kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah belum menunjukkan konteks sosial-budaya dan belum sesuai dengan kesempatan pasar kerja serta kehidupan siswa sehari-hari.

Namun, di daerah perkotaan, OAP sudah mengalami perubahan dalam kepedulian terhadap pendidikan anak sebagaimana dilakukan oleh pendatang. Sejak Otonomi Khusus diberlakukan, Pemerintah Papua telah memberikan berbagai skema beasiswa anak-anak Papua untuk menempuh pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di kota-kota di luar Papua, seperti Makassar, Manado, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan lain-lain. Juga untuk menempuh pendidikan magister di luar negeri seperti di negara-negara Eropa, Amerika, dan Republik Rakyat Tiongkok. Salah satu hasil pendidikan ini misalnya, Gracias Mambrasar, lulusan Harvard University, diangkat menjadi salah satu staf khusus Presiden Jokowi pada 2019.

Selain itu, terdapat beberapa nama seperti Samuel Tabuni, direktur Papua Language Institute, dan Geroge Saa yang merupakan generasi muda Papua lulusan pendidikan luar negeri. Sekarang ini, sudah banyak generasi muda Papua terdidik yang bekerja profesional dan masuk ke dalam berbagai sektor pemerintahan

90. Afriansyah, et.al., *Policy Paper: Alternatif Pendidikan*, 14.

baik sipil maupun militer. Kuota rekrutmen polisi dan tentara juga dilakukan terhadap OAP dengan pertimbangan mereka lebih mengerti kultur Papua dibandingkan mereka yang dari luar Papua.

### 3.3 MARGINALISASI OAP DALAM PEMBANGUNAN

Pembangunan secara historis telah berjalan di Papua sejak masa pemerintahan kolonial Belanda yang kemudian diteruskan setelah integrasi dengan Indonesia. Pada masa Gubernur Jenderal J. Van Baal (1952-1957), yang juga seorang antropolog Pemerintah Belanda, melalui Dinas Kesehatan melakukan kunjungan ke kampung-kampung untuk mengidentifikasi penyakit-penyakit yang berkembang dan memberikan pengobatan. Setelah itu, Pemerintah membangun rumah sakit khusus untuk penderita Malaria di Abepura.<sup>91</sup> Pada waktu itu, ekspor sagu ke luar negeri dilakukan dari NNG atau *West Papua*.<sup>92</sup> Pada 1960, Belanda sudah memulai kebijakan papuanisasi, untuk mempersiapkan sumber daya OAP dalam birokrasi, politik, dan militer.<sup>93</sup> Jauh sebelum Perang Dunia II dimulai, Pemerintah Belanda mengirimkan berbagai ekspedisi penelitian dan mengawal ekspedisi misionaris sebelum membentuk pos-pos pemerintahan di daerah-daerah yang pada waktu itu belum terbuka untuk dunia luar. Strategi pembangunan yang dilakukan oleh Belanda didahului oleh penelitian antropologi dan banyak

91. Bernard Lagowan, "Upaya Belanda Membangun Kesehatan Papua," *Suara Papua*, 25 Oktober 2017. <https://suarapapua.com/2017/10/25/upaya-belanda-membangun-kesehatan-papua/> dan Cahyo Pamungkas, "Building Social Resilience on Asmat People: Social and Cultural Perspective," *Kapata Arkeologi* 14, no. 1. (2018): 111-122.

92. Wawancara P di Jayapura 15 Januari 2020

93. Chauvel, *Constructing Papuan Nationalism*.

bekerja sama dengan para misionaris, sehingga pembangunan dilaksanakan pada skala terbatas tetapi tepat sasaran pada OAP.

Salah seorang dosen di Uncen (PR) mengemukakan bahwa dari 1969 sampai dengan 2001, akses terhadap pembangunan tidak pernah diberikan pada OAP karena yang terjadi pada masa tersebut adalah transmigrasi, pembangunan infrastruktur, dan operasi militer.<sup>94</sup> Masa orde baru ia sebut sebagai periode yang hilang, yang seharusnya digunakan untuk membangun manusia Papua. Pembangunan yang dilaksanakan lebih berorientasi pada pendatang sehingga kehilangan kepercayaan dari OAP. Sebaliknya, Pemerintah menuding bahwa masyarakat adat sebagai penghalang dari pembangunan karena persoalan ganti rugi hak ulayat dan membeirkan stigma separatis terhadap mereka yang melawan kebijakan Pemerintah.

Pembangunan pada masa Indonesia memang telah dilaksanakan dengan lebih intensif dengan mendatangkan tenaga kerja dari luar Papua dalam skala besar ketika OAP belum disiapkan. Hal ini menjadikan ketimpangan sosial yang cukup tajam dan perampasan tanah adat atas nama pembangunan. Setelah Reformasi 1998, pembangunan lebih bersifat kapitalistik dan masif dari sebelumnya, seperti sejumlah pusat perbelanjaan modern, ratusan ruko, restoran mewah. Kota Jayapura, Sorong dan Sentani, misalnya memiliki penampakan yang hampir sama dengan kota-kota di Jawa, lengkap dengan sarana dan prasarana serta pemukiman modern. Mereka yang bekerja dan membeli di pusat-pusat pembelanjaan, kebanyakan ialah warga dari komunitas

94. Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan PR, Dosen Uncen, di Jayapura, 17 Januari 2020.

pendatang daripada OAP. OAP memang memiliki uang dari skema Dana Otsus dan Dana Kampung tetapi karena tidak ada tata kelola keuangan yang baik, tidak didampingi oleh pihak yang kompeten, hingga akhirnya membelanjakan dana tersebut untuk konsumsi daripada kegiatan produktif.<sup>95</sup>

Diakui bahwa Pemerintah sudah banyak melakukan pembangunan ekonomi di Papua dalam konsep ekonomi kapitalistik, seperti membuka daerah terisolasi, membangun infrastruktur transportasi, rumah sakit, sekolah, pasar, perumahan, energi, dan telekomunikasi. Pemerintah juga telah menarik investasi swasta dalam perkebunan kelapa sawit, perikanan, pertambangan, dan perhutanan. Jika dilihat secara statistik, pertumbuhan ekonomi di Papua lebih banyak mengalami kenaikan sejak 2015 sampai 2018 yakni antara 2,79% sampai 7,17% dan Papua Barat antara 1,51% dan 3,74%.<sup>96</sup> Namun, pertanyaannya adalah untuk siapa pembangunan tersebut dilaksanakan dan apa konsekuensinya terhadap kehidupan dan penghidupan OAP termasuk keberlanjutan habitat ekologi mereka. Pertanyaan ini menjadi pokok persoalan dalam melihat masa depan OAP pada masa kini yang berhimpitan dengan persoalan konflik kekerasan pada sisi lain.

Jika kita telusuri model-model pembangunan sejak masa Orde Baru sampai sekarang, pola dasar yang digunakan tidak jauh berbeda dengan pola pembangunan nasional, yaitu menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan politik penyeragaman tanpa

95. Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan VT, Dosen Uncen, di Jayapura, 15 Januari 2020.

96. BPS. *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi, 2011-2018* (BPS, 2018). <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/964>

memberi ciri khusus untuk OAP. Hal tersebut dapat dilihat dalam hal pengembangan pertanian padi dan budaya konsumsi beras, transmigrasi, dan sejenisnya. Strategi pembangunan di Tanah Papua ini, menurut McGibbon, telah meminggirkan OAP karena menciptakan kesenjangan ekonomi.<sup>97</sup> Terutama kebijakan transmigrasi yang telah mengambil tanah-tanah ulayat OAP secara paksa. Daerah-daerah transmigrasi, seperti Merauke, Sorong, Keerom, Nimbongkrang, dan lain-lain, kemudian berkembang pesat secara bertahap sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Papua. Sedangkan di perkotaan, sektor-sektor bisnis dikuasai oleh etnis-etnis dari luar Papua yang lebih siap dengan kapital, sumber daya manusia, dan menguasai kultur ekonomi modern. Pengalaman marginalisasi pada masa Orde Baru, ditambah dengan kekerasan politik, justru memperkuat identitas kepapuaan setelah berintegrasi dengan Indonesia.

Setelah rejim Orde Baru jatuh, meskipun Pemerintah telah menerapkan Otonomi khusus sejak 2002 dengan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua, namun peraturan ini tidak mengubah pola-pola dasar pembangunan sebelumnya. Hal ini menjadikan pembangunan belum menyentuh kebutuhan OAP.<sup>98</sup> Pada 2017, Bappenas mulai memasukkan rencana pembangunan berbasis pada tujuh wilayah adat, namun sampai saat ini tidak diikuti oleh program riil yang sungguh-sungguh memperkuat masyarakat adat karena yang terjadi adalah pembangunan yang berbasis pada formasi kapitalisme, berakibat pada dekulturnasi dan rekulturasi

97. Rodd McGibbon, *Pitfalls of Papua: Understanding the Conflict and its Place in Australia-Indonesia Relations* (New South Wales: Lowy Institute for International Policy, 2006).

98. Wawancara dengan PK, 16 Januari 2020

budaya OAP atau disebut sebagai *ethnocide*.<sup>99</sup> Pembangunan berbasis budaya sebenarnya dapat dipelajari dari praktik-praktik kultural masyarakat adat yang sampai kini masih hidup, terutama di pegunungan. Sayang sekali, konsep ini belum diadopsi Pemerintah sehingga OAP menjadi tersisih dari pembangunan terutama yang ada di perkotaan, mereka menjual tanahnya dan hidup di daerah yang lebih jauh dari perkotaan. Selain itu, pembangunan juga berdampak pada pola hidup OAP yang semakin konsumtif dengan memanfaatkan skema Dana Respek atau Dana Desa.

Menurut salah seorang akademisi dari Uncen (ER), pembangunan di Tanah Papua memiliki dua wajah.<sup>100</sup> Pada satu sisi terdapat kemajuan yang bersifat fisik seperti membangun jalan, pelabuhan, dan infrastruktur yang megah; namun di sisi lain terjadi marginalisasi OAP di atas tanahnya sendiri. Menurutnya, merujuk pada observasi terhadap masyarakat adat di Depapre, sejak 1970-an setiap jalan selesai dibangun oleh pemerintah, kelompok pendatang dari luar Papua datang untuk berbisnis dan memanfaatkan jalan tersebut.

Dengan kata lain, pembangunan seperti jalan memunculkan paradoks bagi OAP dalam hal manfaat. Pada satu sisi mempermudah akses ke dunia luar dari keterisolasian geografis yang selama ini menjadi penghambat bagi pembangunan, namun pada sisi lain jalan tersebut juga akan lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat pendatang daripada OAP.

---

99. J. D. Eller, *Cultural Anthropology: Global Forces, Local Lives* (New York and London: Routledge, 2009) dan lihat juga G. Clarke, "From Ethnocide to Ethnodevelopment? Ethnic Minorities and Indigenous Peoples in Southeast Asia," *Third World Quarterly* 22.3 (2001): 413-436.

100. Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan ER, Dosen Uncen, di Jayapura, 15 Januari 2020.

Selain pada aspek manfaat, pembangunan juga memunculkan masalah yang terus menerus belum dapat diselesaikan hingga kini, yakni persoalan hak ulayat, terutama ganti rugi lahan yang dibebaskan untuk pembangunan. Dengan demikian, selain marginalisasi secara sosial ekonomi, pembangunan juga mendatangkan pelanggaran hak-hak ulayat dalam bentuk perampasan tanah adat seperti dalam kasus lahan transmigrasi dan penambangan. Hal ini menjadikan wajah pembangunan di Papua adalah marginalisasi dalam bentuk peminggiran OAP oleh komunitas pendatang, terutama di daerah transmigrasi dan kawasan perkotaan.<sup>101</sup> Pandangan ini didukung oleh salah seorang tokoh DAP (FA), yang menyampaikan pada tim peneliti bahwa pembangunan di Tanah Papua telah menampilkan wajah buruk yaitu marginalisasi dan diskriminasi di segala bidang termasuk dalam penanganan hukum.<sup>102</sup>

Untuk menghindari marginalisasi dan ketimpangan, seharusnya, pemerintah memperhatikan narasi-narasi tentang pembangunan berbasis kebudayaan atau masyarakat adat. Menurut salah satu tokoh pemerintahan adat Papua, FA, strategi pembangunan sebaiknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan kebudayaan masing-masing kelompok etnis.<sup>103</sup> Secara kultural, OAP bukanlah suatu entitas yang bersifat tunggal, namun terdiri dari lebih dari 253 etnis. Kategori lain yang dapat digunakan untuk melihat keragaman etnis ialah kedudukan

---

101. Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan ER, Dosen Uncen, di Jayapura, 15 Januari 2020.

102. Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan FA, tokoh adat, di Jayapura, 16 Januari 2020.

103. Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan FA, tokoh adat, di Jayapura, 16 Januari 2020.

geografis, yakni masyarakat yang mendiami pantai, rawa-rawa, lembah, dan pegunungan.<sup>104</sup> Pembangunan untuk kelompok masyarakat yang tinggal di gunung mungkin saja berbeda dengan untuk etnis yang tinggal di pantai. FA menceritakan pada saya bahwa OAP yang berasal dan tinggal di pegunungan tengah belum lama berinteraksi dengan dunia luar. Komunitas ini pertama kali bertemu dengan para misionaris dari Eropa yang tinggal dan hidup bersama mereka. Para misionaris mempelajari bahasa mereka sambil mengenalkan pendidikan, kesehatan, serta agama Kristiani. OAP di pegunungan merasa sangat dihargai dan dimanusiawikan oleh para misionaris ini yang bersedia hidup bersama mereka. Namun tidak lama kemudian, integrasi dengan Indonesia membawa perubahan yang mendasar. Operasi militer pada 1970-an di wilayah ini menjadikan kehidupan mereka mengalami lompatan dari relasi damai ke siklus kekerasan.

Fenomena ini membentuk *memoria passionis*, ingatan kolektif OAP yang tidak tertulis mengenai sejarah penderitaan dan kekerasan yang mereka alami. Sebagian ingatan ini tertulis dan sebagian lainnya tidak tertulis. Misalnya, 'di bawah pohon ini, saudara saya disiksa sampai mati dan badannya digantung oleh aparat, di pantai itu saudara perempuan saya diperkosa aparat.'<sup>105</sup> Pengalaman dan ingatan tentang kekerasan ini ikut mempengaruhi cara pandangan orang pegunungan dalam melihat Indonesia, termasuk persepsi terhadap etnis dan agama dari luar Papua.

104. Mansoben, "Sistem Politik Tradisional."

105. Arnold Belau dan Yosef Rumaseb, "Saya Siap Mati: Revitalisasi Perjuangan Uskup Muninghoff dalam Advokasi HAM di Tanah Papua," *Suara Papua*, 17 Februari 2018. <https://suarapapua.com/2018/02/17/saya-siap-mati-untuk-papua-perjuangan-uskup-muninghoff-dalam-advokasi-ham-di-tanah-papua-bagian-kedua-habis/>



Misalnya, ketika mereka melihat sebagian besar pasukan Indonesia orang Melayu dan beragama Islam, mereka menganggap semua orang Islam dan ras Melayu memiliki perilaku yang sama seperti yang dibawa oleh tentara.<sup>106</sup>

DAP, sebagaimana disampaikan oleh FA, mengatakan bahwa pembangunan bukan sesuatu yang baru, OAP dari dahulu menyadari bahwa dunia terus berkembang, perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik merupakan keniscayaan.<sup>107</sup> Namun demikian, mereka menghendaki bahwa pembangunan tersebut harus tumbuh pada manusia yang utama atau manusia Papua sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Hal ini berarti tujuan dari berbagai kebijakan dan program pembangunan harus mengarah pada penghargaan dan keberpihakan pada manusia. Dalam realitasnya, pembangunan justru menjadikan manusia Papua sebagai objek sehingga mereka terasing, tergusur dan terpinggirkan dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Sebagai contohnya ialah pembangunan jalan Trans-Papua yang dipacu oleh pemerintahan presiden Jokowi. OAP menyambut baik pembangunan jalan tersebut dan menyadari bahwa mereka membutuhkan jalan. Akan tetapi kalau yang membangun jalan adalah TNI, maka mereka tidak akan bertanya pada masyarakat: jalan harus melalui jalur mana, dimana tempat-tempat keramat, masyarakat adat mana yang dilalui jalan ini.

106. C. E. Farhadian, *Christianity, Islam, and Nationalism in Indonesia* (London: Routledge, 2005); dan Cahyo Pamungkas, "Papua Islam dan Otonomi Khusus: Kontestasi Identitas di Kalangan Orang Papua," Tesis Magister Sosiologi FISIP UI, Depok, 2008.

107. Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan FA, tokoh adat, di Jayapura, 16 Januari 2020.

Pertanyaan kalangan DAP adalah pembangunan ini untuk siapa. Mereka membutuhkan pembangunan, namun ia harus diletakkan pada manusia Papua yang utama. Menarik investasi asing sebagaimana ditulis dalam RPJMN 2020-2024 untuk pembangunan wilayah Papua adalah suatu yang kontradiktif. OAP sudah kehilangan tanah, budaya, dan bahkan jiwanya karena pembangunan. Pembangunan tidak boleh merampas tanah, menghancurkan tradisi kebudayaan bahkan menghilangkan nyawa manusia Papua. Sebaliknya, pembangunan berdasarkan kebudayaan ialah harus bertumpu pada kemanusiaan. OAP tidak menolak pembangunan karena mereka menyadari membutuhkan sekolah dan rumah sakit, namun mereka harus dijaga harkat dan martabat kemanusiaannya.

Untuk mencegah marginalisasi OAP, Pemerintah seharusnya melakukan analisis siapa yang akan menerima manfaat pembangunan di Tanah Papua. Salah seorang aktivis kemanusiaan di Jayapura (YL)<sup>108</sup> memaparkan pandangan OAP di Depapre terkait jalan yang mereka butuhkan sebagai berikut:

*Pemerintah bangun jalan raya tapi yang mereka butuhkan jalan yang mampu mengangkut hasil hutan, ladang, kebun ke pasar agar mampu memperbaiki ekonomi keluarganya. Juga jalan yang dapat mempermudah anak-anak pergi ke sekolah. Masyarakat merindukan jalan raya dan listrik, ada kesadaran agar mereka gampang pergi ke kota. Gereja*

108. Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan YL, Aktivis HAM, di Jayapura, 18 Januari 2020

*melihat betapa polosnya masyarakat di kampung, tidak memiliki gambaran bahwa jalan memudahkan migran masuk dan membawa barang-barang yang dijualnya. Mereka yang memiliki kesadaran akan eksistensi orang Papua mungkin hanya 0,000%, hanya satu atau dua orang yang akan bicara, nanti pendatang masuk bikin kios, kita kasih tahu dampaknya. Seharusnya sebelum ada jalan, kapasitas mereka OAP kita tingkatkan, dengan cara duduk dan berita-cerita.*

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa jalan yang dibutuhkan OAP bukanlah jalan dalam skala besar tetapi jalan dalam skala terbatas yang mampu memudahkan perjalanan mereka dari kampungnya ke pasar di ibu kota distrik atau ibukota kabupaten. Jalan dalam skala terbatas yang memudahkan anak-anak Papua pergi ke sekolah dengan mudah. Dengan kata lain jalan yang dibutuhkan lebih pada jalan dari kampung ke kota-kota yang selama ini masih terisolasi, dan bukan jalan yang menghubungkan antara pegunungan dan pantai seperti sekarang. Walaupun jalan tersebut juga diperlukan tetapi kalau manusia Papua belum siap sumber dayanya justru akan membuat mereka terancam karena memicu persaingan dengan kelompok-kelompok pendatang dari luar Papua. Dengan jalan semakin bagus, maka kelompok pendatang akan semakin mudah menjual komoditasnya dari kota ke kampung-kampung atau membeli kayu dan hewan buruan dari kampung dibawa ke kota.

Sayangnya kesadaran seperti ini masih belum kuat untuk sebagian masyarakat di pantai karena mereka akan percaya sesudah melihat dampaknya terjadi di depan mata. Hal yang sering

dilupakan sebelum membangun infrastruktur adalah penyiapan sumber daya manusia sehingga mereka siap dalam menyambut perubahan sebagai akibat dari pembangunan infrastruktur. Berbeda dengan OAP di daerah pesisir, OAP di pegunungan terutama orang Mee dan Hubula bersikap lebih kritis dalam menyambut jalan Trans-Papua. Mereka sejak awal menyatakan bahwa jalan Trans-Papua merupakan salah satu ancaman bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat karena mereka belum siap dengan membanjirnya berbagai komoditas yang membawa dampak negatif seperti miras dan narkoba, atau komoditas yang menyaingi seperti babi ternak.<sup>109</sup> Pengalaman menunjukkan bahwa ketika pembangunan jalan trans, tenaga kerja yang digunakan lebih banyak orang dari luar Papua termasuk kontraktornya, meskipun beberapa OAP juga terlibat.

Menurut YL, senada dengan VT, bahwa desain pembangunan yang dipraktikkan Indonesia di Tanah Papua selama ini telah melebarkan kesenjangan.<sup>110</sup> Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan adalah membatasi jumlah pendatang ke Tanah Papua. Logika yang dibangun adalah OAP memerlukan waktu sesaat untuk memberikan kesempatan pada mereka menjadi pelaku, pemilik, dan penerima manfaat dari pembangunan. OAP menyadari bahwa pembangunan tidak bisa ditolak, atau orang akan meninggal jika tidak ada rumah sakit yang berkualitas di sekitarnya, atau jika tidak ada transportasi yang memudahkan mereka berobat, atau jika tidak tersedia obat-obatan yang dibutuhkan. Pemerintah

109. Pamungkas, "Building Social Resilience."

110. Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan YL, Aktivist HAM, di Jayapura, 18 Januari 2020; dan Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan VT, Dosen Uncen, di Jayapura, 15 Januari 2020.

berkewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan, pendidikan termasuk membangun jalan. Jika diserahkan pada swasta, maka pihak perusahaan cenderung memiliki motif penguasaan sumber daya OAP. Sebagai contoh kasus di Arso, pihak perkebunan bersedia membangun jalan 2,5 km di Arso Kota tetapi meminta lahan OAP untuk kelapa sawit seluas 18.339 Ha sebagai kompensasinya. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah membangun jalan tidak sampai ke pemukiman OAP hanya sampai ke Satuan Pemukiman Transmigran. Perusahaan sawit tersebut kemudian meminta masyarakat untuk menjual tanahnya dengan harga yang sangat rendah. Kemungkinan eksploitasi ada di setiap pembangunan, maka pembatasan pendatang menjadi suatu kebutuhan. Kalau pun tidak dapat, langkah lain adalah melarang penjualan tanah pada pendatang cukup hak guna saja. Strategi ini pernah dicoba oleh MRP, dengan mengusulkan Perdasu pembatasan pendatang tetapi gagal disahkan oleh Pemerintah Papua karena menuai kontroversi dan juga tekanan dari Jakarta karena Papua sebagai bagian dari Indonesia maka Pemerintah tidak boleh membatasi kebebasan bergerak warga Indonesia dari luar Papua ke Tanah Papua.

Pengendalian penduduk, terutama penduduk dari luar Papua yang masuk ke Tanah Papua, perlu dilakukan sehingga mereka yang datang ke Papua harus memiliki tujuan dan kontribusi yang jelas untuk OAP serta diberi waktu berapa lama tinggal. Hal ini dilakukan agar pendatang di daerah ini tidak menjadi beban pembangunan yang semakin berat. Sejumlah Perdasus terkait pembatasan penduduk dari luar dapat diimplementasikan setelah didiskusikan dengan berbagai pihak termasuk pemerintah pusat dengan pertimbangan perlunya jeda sesaat memberikan

kesempatan agar OAP dapat berkembang dan mengembangkan dirinya.

Pembangunan yang dibutuhkan OAP ialah pembangunan yang mampu memperkuat posisi masyarakat adat menjadi tuan di tanahnya sendiri. Salah seorang tokoh dan pendiri DAP menyebutkan bahwa indikator pembangunan bagi OAP seharusnya diukur dari sejauh mana mereka merasakan perdamaian dan kebebasan sehingga menikmati kehidupan secara layak. Secara komunal ialah, masyarakat adat harus menjadi sentral dalam perencanaan, pelaksanaan dan penerima manfaat dari pembangunan dengan menggunakan sumber daya yang melekat pada mereka, terutama di kampung-kampung. Sebagai contoh, setiap kampung di Papua memiliki sejumlah cerita rakyat, sumber alam, dan potensi ekonomi, apakah Pemerintah telah mengakui pembangunan yang dijalankan telah memberi ruang untuk pengembangan berbasis masyarakat adat, atau apakah telah memberikan ruang bagi hak kepemilikan masyarakat adat yang semakin kuat. Pada praktiknya justru pembangunan menyebabkan masyarakat adat kehilangan hak atas tanah atau tanah secara paksa atau sukarela diberikan oleh masyarakat adat pada pihak lain yang tidak dapat bertanggung jawab dan memberikan dampak negatif. Pembangunan dimanipulasikan sehingga tidak memberikan tempat yang layak bagi masyarakat adat.<sup>111</sup> Informan ini kemudian mengatakan sebagai berikut:

111. Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan Leonard Imbiri, tokoh adat, di Jayapura, 18 Januari 2020.

*Pada tahun 2005, ketika saya pulang [ke Serui], saya menikmati suasana masa kecil yang indah seperti pergi ke laut bersama om saya untuk memancing. Inilah satu suasana yang luar biasa. Kami mendapatkan banyak sekali ikan kakap. Saya membayangkan kalau ikan ini dijual pasti harganya 100,000-250,000 per ekor. Tapi saya tidak berpikir untuk itu dijual. Saya mau menikmati hasil pancingan saya yang segar itu. Ketika saya membutuhkan ubi sudah tersedia di depan rumah. Karena berkecukupan dengan ikan kakap dan ubi yang segar dan sehat. Ada satu ubi yang ditanam yang cukup besar yang dapat dimakan oleh satu keluarga. Ketika saya tidur di hotel berbintang lima, saya tidak merasakan makanan yang enak seperti ketika saya di Kampung dan mengalami suasana cuaca dan udara yang segar. Nilai kehidupan seperti ini tidak pernah dihargai, dalam proses pembangunan karena dollar menjadi standard penilaian dan pusat-pusat ekonomi membawa persaingan dan memotong cara hidup masyarakat adat. Pembangunan cenderung merusak alam, dampak dari proses pembangunan yang berdasarkan nilai dolar. Dari PTFI negara menggusur masyarakat adat karena itu pembangunan mendorong marginalisasi masyarakat adat.*

Informan ini mengilustrasikan bahwa pembangunan seharusnya menciptakan suasana kedamaian seperti yang dialami oleh masyarakat adat tidak hanya menekankan pada dimensi ekonomi semata. Suasana damai seperti anak-anak kecil yang berbaring di perahu pada intinya ialah tujuan pembangunan yakni mencapai kebahagiaan, yang dilakukan dengan tanpa

menggusur tanah ulayat atau memindahkan tempat hidup mereka atau memaksa perubahan cara hidup mereka. Juga terkait dengan ketahanan pangan, pembangunan tidak boleh melakukan standarisasi dan penyeragaman dalam konsumsi. Kalau OAP memilih memakan sagu, patatas, keladi, dan sejenisnya, tidak perlu dipaksa untuk menjadikan beras sebagai makanan pokok. Aspek terakhir yang paling penting ialah pembangunan di Papua tidak boleh merusak habitat ekologis, karena alam tersebut merupakan tempat hidup manusia Papua. OAP hidup tergantung dengan alam, mencerabut mereka dari habitatnya ekologisnya seperti yang dialami oleh Suku Amungme di Mimika berarti merendahkan harkat dan martabat mereka sebagai manusia Papua.<sup>112</sup>

Penyeragaman adalah kata kunci dalam pembangunan di Indonesia, pembangunan ekonomi dan sosial-budaya tidak dilakukan dengan menyesuaikan konteks sosial dan budaya masyarakat setiap provinsi. Leonard Imbiri menceritakan bahwa ketika dirinya berkunjung ke negara-negara Melanesia seperti Solomon dan Vanuatu, ia melihat nuansa yang berbeda.<sup>113</sup> Misalnya konsep transportasi, bukan berarti infrastruktur yang mewah tetapi sarana transportasi tersedia sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan harga yang relatif murah. Begitu ada orang tenggelam di lepas pantai, tim patroli penjaga pantai dengan cepat memberikan pertolongan. Pembangunan di Melanesia berarti bukan mengejar sesuatu melampaui kapasitasnya. Kondisi di Papua

112. Harry Surjadi & Angel Manembu, "Arti Tanah bagi Orang Papua," *Kompas*, 25 September 1995. Dimuat kembali dalam <http://www.sastrapapua.com/2017/02/arti-tanah-bagi-suku-amungme.html>

113. Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan Leonard Imbiri, tokoh adat, di Jayapura, 18 Januari 2020.



cukup berbeda, banyak puskesmas atau rumah sakit dibangun dengan mewah tetapi hanya ada satu atau dua dokter yang menangani pasien; jalan dibangun dimana-mana tetapi OAP tidak dapat lewat karena biayanya mahal karena harus menyewa mobil *double gardan*. Pembangunan hanya menyenangkan imajinasi tetapi belum menyentuh persoalan yang nyata dihadapi oleh masyarakat adat Papua.

Menurut Leonard Imbiri, pembangunan jalan Trans-Papua ini cenderung akan memarginalkan masyarakat adat Papua.<sup>114</sup> Menurut pengamatannya di sepanjang Trans-Papua di Jayapura, ia mengamati ada 100 kendaraan roda empat dimana 92% dikemudikan oleh pendatang dan sisanya orang asli. Juga terdapat 100 sepeda motor yang dikemudikan oleh pendatang 50% dan orang asli 50%. Kalau dilihat dari jenis motornya, motor yang dikendarai OAP rata-rata lebih baik, sedangkan motor yang dikendarai pendatang digunakan untuk mengangkut barang dagangan. Informan dari Uncen (PR) mengatakan bahwa tidak semua OAP setuju dengan Jalan Trans-Papua karena penerima manfaatnya lebih banyak pendatang.<sup>115</sup> Pengguna jalan trans akan membayar Rp15 juta per mobil *double gardan* untuk membawa barang-barang industri dan berjalan beiringan antara 5 atau 6 mobil dari Jayapura ke Wamena. Masyarakat menganggap jalan ini untuk menguasai sumber daya OAP, memperlancar aktivitas ilegal, dan memfasilitasi pendatang untuk menembus dan menguasai ekonomi pelosok-pelosok Papua dengan mudah.

---

114. Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan Leonard Imbiri, tokoh adat, di Jayapura, 18 Januari 2020.

115. Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan PR, Dosen Uncen, di Jayapura, 17 Januari 2020.

Pembangunan Trans-Papua, ketika melalui daerah pemekaran belum ada penyiapan sosial masyarakat yang dilalui jalan ini. Sebagai akibatnya, partisipasi masyarakat adat di sepanjang jalan Trans-Papua masih minim kecuali hanya jualan pinang dan bensin dalam skala kecil dan terbatas. Seharusnya pemerintah pusat mengadakan dialog dengan gubernur, bupati, dan masyarakat adat sebelum membangun jalan trans ini untuk menyusun perencanaan. Masyarakat adat membutuhkan jalan dalam skala kecil karena jalan dengan skala besar dibangun dengan kerangka kepentingan pemodal besar untuk membawa logistik dengan kendaraan-kendaraan besar. Hal ini mengakibatkan para pemodal yang menjadi penerima manfaat terbesar dari jalan Trans-Papua. Pandangan Leonard Imbiri diperkuat oleh SW, salah seorang aktivis Gereja dari Timika:<sup>116</sup>

*Soalnya saya lihat dan alami bahwa semua infrastruktur yang dibangun tidak pernah menjawab kepentingan OAP. Kalau mau bilang suatu pembangunan itu berhasil maka juga harus membangun orang asli daerah tersebut, pemanfaatannya dirasakan juga oleh orang asli. Orientasi pembangunan di Papua yang terpusat di daerah transmigrasi telah memangkas pertumbuhan kampung dan warga asli. Jika orientasi ini tidak diubah, maka selalu akan menjadi pembangunan orang Bugis di Papua, orang Jawa di Papua, orang Batak di Papua, dan lain-lain. Lantas di mana posisi OAP? Kami ada di tempat yang tidak terjamah oleh pembangunan.*

116. Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan SW, Aktivis Gereja di Timika, 30 Januari 2020.

Strategi pembangunan yang belum berpusat pada manusia dan kebudayaan ini telah mengasingkan OAP dari pembangunan itu sendiri. Menurut Leonard Imbiri, sebagian OAP mengalami disorientasi identitas sebagai akibat dari disorientasi pembangunan.<sup>117</sup> Kalau dulu mereka bekerja di kebun sekarang memilih membuat proposal dan meminta dana ke Pemerintah Daerah atau menjual tanahnya pada pendatang. Contoh lainnya adalah menjual pisang mentah untuk membeli pisang goreng atau menjual ikan segar untuk membeli ikan sarden. Disorientasi budaya ialah pembangunan telah mencabut masyarakat adat dari akar-akar budayanya, sehingga menjadikan mereka kebingungan antara meninggalkan nilai yang lama atau menganut nilai baru yang belum ada pegangannya.<sup>118</sup> Fenomena yang paling sering terjadi masa kini ialah pemekaran kampung tanpa melalui penyiapan sosial sehingga tidak semua kampung mampu berkembang walaupun berada di sepanjang jalan Trans-Papua.

### 3.4 DEPOPULASI OAP DAN AKIBATNYA

Marginalisasi yang berkelanjutan terhadap OAP di atas tanahnya sendiri menjadikan mereka secara berkala terdepulasi oleh pendatang di kawasan yang menjadi lokasi pembangunan. Namun jika ditelusuri lebih jauh, persoalan pendatang di Papua pada masa kini merupakan masalah yang diwariskan oleh Orde Baru. Pada 1971 terdapat 5.000 orang yang bertransmigrasi, kemudian terjadi peningkatan di 1972 yang mencapai 10.000 orang.<sup>119</sup> Data

---

117. Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan Leonard Imbiri, tokoh adat, di Jayapura, 18 Januari 2020.

118. R. K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (New York: Free Press, 1968).

119. McGibbon, *Plural Society in Peril*, 20.

menunjukkan hingga 1979, total transmigran mencapai 560.000 orang. Kebijakan transmigrasi terus dilaksanakan sampai 2000 ketika aspirasi Papua merdeka meluas dalam ruang publik. Selain transmigrasi, migrasi spontan juga terjadi di Papua, terutama dari masyarakat BBM.

Baik transmigrasi dan migrasi spontan telah mengubah komposisi penduduk Papua. Jika tahun 1971 jumlah pendatang mencapai 4% dari total penduduk, maka pada 2000 mencapai 35% dari seluruh penduduk di Tanah Papua. Pada 1980, total jumlah pendatang dibandingkan dengan jumlah penduduk kota-kota di Papua telah mencapai 30% dan meningkat menjadi 66% pada 2000. Elmslie menyebutkan bahwa penduduk Papua pada 1971 sebanyak 887,000 jiwa meningkat menjadi 1,505,405 pada 2000 atau rata-rata pertumbuhan 1,84% pertahun.<sup>120</sup> Sedangkan penduduk pendatang meningkat dari 36,000 jiwa pada 1971 menjadi 708,425 pada 2000 atau tumbuh 10,82% rata-rata per tahun. Pada tahun yang sama, jumlah penduduk Papua asli menempati posisi minoritas pada kota-kota besar terutama di Jayapura, Manokwari, Sorong, dan Biak Numfor.<sup>121</sup> Pada tahun ini juga, mayoritas (sekitar 86%) OAP menetap di daerah pedesaan dan pegunungan-pegunungan. Michael Rumbiak, seorang peneliti dari Papua yang tinggal di Australia, sebagaimana dikutip mengatakan bahwa kebijakan transmigrasi oleh Orde Baru bertujuan untuk "*depopulation*" OAP.<sup>122</sup>

Meningkatnya jumlah pendatang dapat dilihat dari tempat ibadah seperti masjid dan mushola yang menjamur di kota-kota besar

120. Elmslie, "West Papuan Demographic Transition."

121. Elmslie, "West Papuan Demographic Transition," 26.

122. McGibbon, *Pitfalls of Papua: Understanding*, 19.

di Tanah Papua. Juga banyaknya denominasi gereja yang berasal dari luar Papua. Salah seorang *informan* mengatakan jumlah pendatang dapat dilihat pada jemaah gereja-gereja di kota Jayapura yang hampir 80% merupakan warga pendatang. Selain itu juga dapat dilihat dari penghuni perumahan-perumahan yang dibangun seperti di Sentani yang sebagian besar dimiliki dan ditempati pendatang.<sup>123</sup>

Berdasarkan penelitian Ananta dkk. pada 2016 mengenai tingkat fraksionalisasi dan tingkat polaritas penduduk provinsi Papua dan Papua Barat, dapat diidentifikasi bahwa tingkat heterogenitas etnis (EFI) di provinsi Papua sangat tinggi (0,91), namun tingkat polaritas etnis (EPOI) masih cukup rendah (0,29).<sup>124</sup> Etnis dengan jumlah penduduk terbesar di provinsi ini adalah Dani (23,32%) dan proporsi OAP di tingkat provinsi masih cukup besar (76,31%). Proporsi pendatang yang lebih besar dari OAP dapat ditemukan di Kabupaten Merauke, Nabire, Mimika, Keerom, dan Kota Jayapura. Sedangkan di kabupaten lain rata-rata proporsi OAP masih cukup tinggi seperti di wilayah adat La Pago, Saireri, Anim Ha kecuali Merauke, Mee Pago (kecuali Nabire dan Mimika). Sedangkan sejumlah kabupaten di wilayah adat Pegunungan Tengah atau La Pago, rata-rata memiliki tingkat homogenitas etnis yang cukup tinggi atau heterogenitas yang cukup rendah, dengan angka EFI yang di bawah 0,33 seperti Kabupaten Jayawijaya, Puncak Jaya, Tolikara, Nduga, Lanny Jaya, dan Memberamo Tengah.

123. Wawancara dengan P, Jayapura 15 Januari 2020

124. A. Ananta, D. R. W. W. Utami, dan N. B. Handayani, "Statistics on Ethnic Diversity in the Land of Papua, Indonesia," *Asia & the Pacific Policy Studies*, 3(3), (2016): 458-474.

Tabel 3.3 EFI dan EPOI Provinsi Papua hasil Sensus Penduduk 2010

No.	Provinsi/Kab/Kota	EFI	EPOI	Etnis Terbesar	%	O A P %
	Provinsi Papua	0,91	0,29	Dani	23,32	76,31
1.	Merauke	0,84	0,46	Jawa	34,32	37,27
2.	Jayawijaya	0,32	0,49	Dani	82,02	90,79
3.	Jayapura	0,92	0,27	Sentani	18,15	61,48
4.	Nabire	0,89	0,36	Jawa	22,21	47,54
5.	Kepulauan Yapen	0,74	0,58	Yapen	47,86	78,09
6.	Biak Numfor	0,50	0,62	Biak Numfor	69,89	73,82
7.	Paniai	0,11	0,20	Auwye	94,50	97,58
8.	Puncak Jaya	0,11	0,20	Dani	94,31	98,24
9.	Mimika	0,93	0,24	Mimika	12,95	42,51
10.	Boven Digul	0,88	0,41	Mandobo	21,48	66,95
11.	Mappi	0,65	0,74	Asmat	53,58	88,62
12.	Asmat	0,29	0,45	Asmat	84,26	89,59
13.	Yahukimo	0,71	0,66	Ngalik	48,60	98,58
14.	Pegunungan Bintang	0,66	0,81	Ngalum	42,61	95,31
15.	Tolikara	0,03	0,07	Dani	98,31	99,05
16.	Sarmi	0,94	0,22	Biga	14,56	70,25
17.	Keerom	0,85	0,42	Jawa	34,34	41,33
18.	Waropen	0,71	0,62	Waropen	51,32	79,59
19.	Supiori	0,11	0,20	Dauwa	94,55	96,48
20.	Memberamo Jaya	0,86	0,42	Dani	31,74	93,07
21.	Nduga	0,04	0,08	Dani	97,90	99,16
22.	Lanny Jaya	0,05	0,09	Ngalik	97,62	99,90
23.	Memberamo Tengah	0,34	0,63	Dani	78,98	99,47
24.	Yalimo	0,07	0,13	Ngalik	96,55	99,20
25.	Puncak	0,52	0,74	Dani	65,99	99,26
26.	Dogiyai	0,03	0,06	Auwye	98,35	99,01
27.	Intan Jaya	0,42	0,66	Moni	74,29	99,81
28.	Deiyai	0,04	0,08	Auwye	97,83	98,94
29.	Kota Jayapura	0,93	0,24	Jawa	19,17	34,91

Sumber: Aris Ananta dkk. (2016).

Pada tingkat provinsi, Penduduk Papua Barat tampak sangat heterogen (EFI=0,95) tetapi tidak terpolarisasi ke dalam dua atau tiga kelompok etnis, atau dapat dikatakan sangat terfragmentasi (EPOI 0,19). Kelompok etnis terbesar di provinsi ini adalah Jawa (14,76%) dan proporsi penduduk non-Papua adalah 51,49% di Papua Barat. Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat heterogenitas etnis sangat tinggi, lebih dari 0,90 ialah Kaimana, Teluk Bintuni, dan Kota Sorong. Dari ketiga daerah tersebut proporsi OAP yang paling besar adalah di Bintuni, yakni kelompok etnis Aikwakai (20,33%) lebih tinggi dari Irarutu di Kaimana (15,50%). Sedangkan kelompok etnis terbesar di Kota Sorong ialah Jawa (13,79%). Namun, kehadiran pendatang di Fak-fak, Kaimana, dan Raja Ampat merupakan kasus lain karena mereka telah berinteraksi dengan OAP sejak abad ke-17 melalui perdagangan dan ekspedisi Sultan Tidore.<sup>125</sup> Etnis terbesar di Kota maupun Kabupaten Sorong ialah Jawa. Hal ini karena Kabupaten Sorong merupakan penerima transmigrasi terbesar di Papua Barat, sedangkan Kota Sorong dan Kabupaten Bintuni merupakan pusat industri yang menarik tenaga kerja dari luar Papua.

*Tabel 3.4 Derajat Fraksionalisasi dan Polarisasi Etnis di Provinsi*

*Papua Barat Hasil Sensus Penduduk 2010*

No.	Provinsi/ Kab/Kota	EFI	EPOI	Etnis terbesar	%	O A P %
	Papua Barat	0,95	0,19	Jawa	14,76	51,49
1.	Fak-fak	0,86	0,41	Baham	32,39	47,61

125. M. S. Widjojo, "Cross-Cultural Alliance-Making and Local Resistance in Maluku during the Revolt of Prince Nuku c. 1780-1810," Disertasi Doktoral TANAP (Towards A New Age of Partnership), IGEER, Department of History, Faculty of Arts, Leiden University, 2007.; lihat juga Pamungkas, "Papua Islam dan Otonomi."

2.	Kaimana	0,94	0,23	Irarutu	15,50	51,56
3.	Teluk Wondama	0,85	0,44	Wandamen	34,22	73,57
4.	Teluk Bintuni	0,91	0,30	Aikwakai	20,33	52,97
5.	Manokwari	0,86	0,44	Arfak	29,90	56,59
6.	Sorong Selatan	0,85	0,46	Tehid	30,87	83,08
7.	Sorong	0,80	0,52	Jawa	41,46	36,07
8.	Raja Ampat	0,79	0,52	Biak-Numfor	42,49	73,4
9.	Tambrauw	0,43	0,70	Karon	73,19	94,99
10.	Maybrat	0,41	0,71	Ayfat	74,05	95,4
11.	Kota Sorong	0,94	0,22	Jawa	13,79	29,93

Sumber: Aris Ananta dkk. (2016)

Depopulasi juga disebabkan karena OAP belum dapat efektif memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Menurut informasi dalam salah seorang akademisi Uncen (ER), pendatang lebih siap dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan karena masih ada kebijakan yang bersifat diskriminatif yang mengutamakan atau memprioritaskan kelompok migran seperti dalam penerimaan PNS dan dukungan politik terhadap anggota DPRD terutama di Kabupaten Keerom.<sup>126</sup> Wilayah ini menyerupai sebuah kabupaten Jawa di Tanah Papua, dimana sebagian besar penduduknya merupakan bekas transmigran. Sedangkan Kota Jayapura yang perlahan-lahan didominasi oleh pendatang terutama Bugis, Buton, Makassar, Jawa, dan Sumatera, juga mengalami pengalaman yang

126. Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan ER, Dosen Uncen, di Jayapura, 15 Januari 2020.



sama. Banyak rekrutmen PNS dan calon-calon anggota DPRD diisi oleh pendatang. Hal ini salah satunya karena mereka memiliki jaringan dan sumber daya yang cukup kuat.

Faktor lainnya ialah proses adaptasi masyarakat pendatang terhadap perubahan cukup cepat, sedangkan orang asli tidak siap dengan dampak investasi dan pembangunan skala besar yang masuk ke wilayah masyarakat adat. Di hampir seluruh pelosok Papua, komunitas pendatang dari luar Papua terkenal memiliki kelebihan dalam modal dan SDM sehingga mampu menguasai sektor ekonomi. Pada umumnya mama-mama Papua, sebagai pelaku ekonomi di *grass root*, belum memiliki orientasi *profit* sehingga tidak cocok dengan ekonomi pasar. Mereka lebih memiliki orientasi nilai sosial budaya karena harus menanggung kebutuhan anggota *klannya* seperti membiayai sekolah, berobat ke rumah sakit, acara-acara adat, dan lain sebagainya.

Pasca kerusuhan rasial di Jayapura 2019, muncul sedikit ketegangan antara komunitas OAP terutama yang berasal dari pegunungan dengan komunitas pendatang yang tergabung dalam Paguyuban Nusantara. Kelompok ini terdiri dari berbagai suku, termasuk Jawa, Sumatra, Bugis, Buton, Makassar, juga Maluku, Timor, Minahasa, Toraja dan Batak. Orang Thabi, yang merupakan penduduk asli Kota Jayapura misalnya justru terdesak dalam konflik antara kedua kelompok ini. Pasca kerusuhan rasial, identitas OAP baik gunung dan pantai mulai menguat melalui ekspresi simbol-simbol budaya untuk membedakan dengan pendatang. Misalnya simbol Bintang Kejora, slogan '*spirit Melanesia*,' memakai noken, berrambut gimbal, lagu rege atau musik hip-hop, dan sejenisnya. OAP membutuhkan sebuah identitas kolektif yang berfungsi menjadi daya hidup atau memberikan energi dan mengarahkan

agar komunitas besar OAP dapat berjalan melangkah ke depan. Pada masa lalu Arnold Ap berusaha mengumpulkan lagu-lagu OAP dan membentuk grup musik Mambesak yang sering pentas di RRI Jayapura. Namun kemudian Arnold Ap dibunuh oleh TNI pada 1982 karena dugaan menjadi anggota kelompok OPM. Pada 1999-2000, Theys H. Eluay memobilisasi simbol-simbol Papua dengan menyelenggarakan Musyawarah Besar dan Kongres II Rakyat Papua pada 2000. Namun ia juga dibunuh oleh anggota Kopasus pada 2002. Setelah Theys terbunuh, nasionalisme Papua tidak hilang tetapi bertransformasi menjadi kebudayaan yang menyebar ke seluruh Papua terutama di kalangan generasi muda.

Menurut keterangan dari salah satu dosen Uncen (VT), dari segi SDM, komunitas pendatang memiliki sifat bekerja keras, tidak mudah patah semangat, dan fokus pada bisnis, serta dapat bertahan hidup di mana saja.<sup>127</sup> Sebagai contoh, setelah kerusuhan rasial dimana ruko mereka dibakar, pendatang segera membuka kembali bisnisnya dan tidak menyerah pada situasi, bahkan mereka menerima ganti rugi walaupun tidak besar. Hal ini berbeda dengan OAP yang mengalami trauma pasca kerusuhan. Orang asli mengalami kesulitan untuk mencontoh semangat pendatang dalam kerja keras karena beberapa hal sebagai berikut. Pertama, OAP terbiasa hidup relatif lebih enak pada masa Belanda yang menyediakan keju, mentega, dan kebutuhan lain dengan gratis setiap minggu; sehingga mereka tidak perlu bekerja keras. Kedua, alam yang menyediakan OAP bergantung hidupnya seperti hewan buruan dan sagu. Namun, pada masa Orde Baru dengan alih fungsi

127. Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan VT, Dosen Uncen, di Jayapura, 15 Januari 2020.

lahan, OAP menjadi tergusur perlahan-lahan dari habitatnya. Dengan demikian, OAP belum siap menghadapi perubahan yang sangat cepat ini karena sudah terbiasa hidup bergantung pada alam.

Kondisi OAP yang 'termarginalkan secara ekonomi oleh pembangunan modern' menyebabkan mereka sulit untuk berkembang. Salah seorang informan dari Uncen (PR) menceritakan OAP semakin lama semakin terpinggirkan dalam kehidupan modern.<sup>128</sup> Tanah yang seharusnya menjadi hak ulayat dan bersifat komunal kini dibagi-bagi per keluarga dan dijual ke pendatang. Misalnya tanah di sekitar jembatan hotel kamp, dijual satu petak: 8x12 meter dengan harga Rp12 juta. Sebaliknya pendatang hampir di semua tempat di Papua memiliki daya tahan yang cukup tinggi, sedangkan orang asli cenderung menjual tanahnya kepada mereka. Penjualan tanah dimungkinkan jika ada persetujuan dari pemilik tanah dan kepala suku. Selain itu, terdapat pelepasan adat ditandatangani oleh kepala lingkungan dan kepala kampung serta Kepala Kantor BPN setempat.

Menurut YL, seorang aktivis HAM di Sentani, perlawanan terhadap dominasi ekonomi pendatang telah muncul di Manokwari dan Jayapura<sup>129</sup> misalnya mama-mama asli Papua memprotes pendatang dan minta proteksi pemerintah daerah, yaitu pendatang tidak boleh menjual komoditas khas OAP: noken, pinang/sirih, serta sagu. Menurut keterangan dosen Uncen (VT), mama-mama

128. Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan PR, Dosen Uncen, di Jayapura, 17 Januari 2020.

129. Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan YL, Aktivis HAM, di Jayapura, 18 Januari 2020

Papua sebetulnya ialah pelaku perekonomian OAP yang riil dalam kehidupan sehari-hari.<sup>130</sup> Mereka membuat noken karena hanya memiliki uang yang terbatas untuk modal membeli benang. Sayang sekali pemerintah belum memberdayakan mereka dengan sungguh-sungguh, sehingga dengan modal yang terbatas mereka hanya mampu menjual pinang atau membeli benang noken. Mereka memiliki beban ganda baik bekerja di kebun, membuat noken, atau menjual pinang sambil tetap melakukan pekerjaan rumah tangga. Oleh karena itu, noken, pinang/sirih, dan sagu harus dijual oleh OAP sebagai bagian dari proteksi ekonomi paling mendasar. Pengamatan saya juga menunjukkan bahwa protes mama-mama Papua seperti ini terdapat di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Saosapor, ibu kota Kabupaten Tambrauw pada bulan Juli 2019.

Selain itu, terdapat gerakan dari anak-anak muda yang kembali dari kota ke kampung. Mereka melakukan refleksi dan mengakui adanya krisis identitas OAP yang mulai tercerabut dari akar kebudayaannya. Mereka tidak menolak, bahkan ikut pembangunan karena ingin hidup lebih sehat, menginginkan agar angka harapan hidup tinggi, dan dapat bekerja kebun walaupun jarak ke kebun cukup jauh. Seusai sekolah, sebagian anak-anak muda sudah banyak yang kembali kampung. Mereka membuat media film dan diskusi-diskusi dengan komunitas di Papua dan Papua Barat. Mereka mengadakan festival film untuk mengembalikan manusia Papua yang memiliki akar kebudayaannya seperti orang Hubula di lembah Baliem. Salah seorang aktivis Fransiscan Papua, BK mengatakan

130. Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan VT, Dosen Uncen, di Jayapura, 15 Januari 2020.

*"Kami sebagai pendatang walau kerja di SKPKC, saya ini pendatang, suatu saat akan pulang, jadi kamu yang teruskan, jadi masing-masing harus aktif, kita harus berjuang ruang ini harus direbut, ruang ini harus kamu rebut kembali, jangan biarkan perampasan lahan oleh orang dari luar."*<sup>131</sup> Gerakan ini juga membangun kesadaran bahwa anak-anak muda setelah selesai sekolah di kota harus kembali ke kampungnya masing-masing membangun daerahnya dengan memanfaatkan SDM dan SDA yang ada serta mengelola tanah agar tidak dijual ke pendatang atau proyek-proyek pembangunan lainnya. Hal ini penting karena tanpa tanah, OAP akan semakin terpinggirkan dan tidak akan memiliki masa depan di Papua.

Menurut YL, pendatang menggunakan strategi budaya untuk mendekati OAP sehingga mereka dapat dipengaruhi secara ekonomi atau politik.<sup>132</sup> Misalnya, mereka sering mengantar bahan makanan dan minuman seperti beras, gula, kopi, indomie, dan sarden. Setelah itu, mereka minta untuk menyewa tanahnya dibangun ruko dengan dibayar sesuai harga yang berlaku. Setelah beberapa tahun karena hutang budi pada pendatang tersebut, pemilik tanah sering kali menjual tanah yang dipakai ruko pada pendatang. Cerita lain mengisahkan seorang pendatang yang menang dalam Pemilu DPR di Kabupaten Jayapura pada 2019, sebagai berikut:

*Seorang calon anggota DPR RI dari pendatang menang di Sentani, ibu kota kabupaten Jayapura. Ia kalau ada duka*

131. Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara BK, pada 17 Januari 2020.

132. Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan YL, Aktivist HAM, di Jayapura, 18 Januari 2020

*selalu melayat dan membantu yang sedang duka, kalau ada hajatan selalu datang, kasih sumbangan, kita ini susah bilang ke orang kampung, bahwa mereka sedang dieksploitasi untuk kepentingan politik. Orang kampung tulus, kalau ada yang sakit dikasih uang, dibantu mobil ambulans, dibayari rumah sakitnya. Kemudian, mereka dieksploitasi habis-habisan tanahnya dibeli dan suranya juga dibeli.*

Pendatang lebih siap dengan pembangunan, menurut informasi pimpinan DAP, Leonard Imbiri, karena konsep pembangunan adalah konsep pendatang.<sup>133</sup> OAP tidak memiliki pikiran untuk bertempat tinggal di ruko, akan tetapi tinggal di rumah bersama keluarga. Sedangkan pendatang terbiasa tinggal di ruko, tempat hidup sekaligus tempat berdagang. Fenomena seperti ini, untuk menghindari marginalisasi dan depopulasi, perlu penyiapan sosial OAP dengan menggunakan konsep pembangunan yang berorientasi pada masyarakat adat. Leonard Imbiri dalam wawancaranya mengatakan sebagai berikut.

*Contoh lagi, anda datang ke sini bangun jalan, coba suruh OAP kerja jalan, OAP tidak akan kerja, malah akan meminta ganti rugi atas tanah yang dibuat untuk jalan. OAP memiliki pandangan yang berbeda. Kalau Pemerintah ingin bangun lapangan terbang, maka jadikan lapangan terbang itu milik mereka, sehingga mereka akan ikut kerja dan merelakan tanahnya. Kalau jalan itu milik Pemerintah,*

---

133. Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan Leonard Imbiri, tokoh adat, di Jayapura, 18 Januari 2020.

*kau harus bayar kitorang punya tanah. Hari ini Pemerintah bangun jalan Pemerintah, gedung, kau bayar saja. Jadi kalau mau membangun jalan, jangan jalan negara tetapi jalan milik masyarakat. Pemerintah mengawasi saja, bagaimana mekansime kerjanya serahkan pada masyarakat, mereka akan jaga, intinya adalah bagaimana menciptakan masyarakat setempat menjadi bagian dari proses pembangunan, mereka disiapkan untuk memasuki pembangunan, siap inetraksi dengan pihak lain.*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa strategi pembangunan selama ini tidak menempatkan OAP sebagai pemilik pembangunan. Argumentasinya, semua tanah di Papua ialah milik OAP secara komunal, sehingga apapun proyek infrastruktur Pemerintah, baik jalan, bandara, maupun pelabuhan harus menempatkan OAP seolah-olah sebagai proyeknya dan miliknya, bukan proyek negara. Kalau dikatakan, semuanya adalah proyek negara dan dilaksanakan oleh orang non-Papua, maka OAP akan menuntut pembebasan tanah sebelum pembangunan dilaksanakan. Sebaliknya, kalau dikatakan ini adalah proyek untuk masyarakat atau OAP dan dilaksanakan dengan memanfaatkan tenaga kerja dari OAP di dalamnya, maka mereka akan memberikan tanahnya secara sukarela. Inti dari sejumlah pernyataan di atas adalah Pemerintah dan pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan di Tanah Papua harus melibatkan orang asli sebagai bagian dari proses pembangunan dan memastikan bahwa penerima manfaat adalah orang asli. Bahkan kalau perlu menyiapkan mereka, termasuk melatih SDM mereka agar dapat bekerja dalam pembangunan infrastruktur tersebut.

Mengapa tanah tersebut nilainya sangat penting bagi OAP? Karena tanpa tanah dan sumber daya alam di dalamnya atau di atasnya, OAP tidak akan memiliki kemampuan untuk bertahan dalam kehidupan. Misalnya masyarakat asli di Merauke tidak semuanya dapat belajar pada transmigran untuk menanam padi, meskipun sebagian mereka dapat beradaptasi. Orang Marind terbiasa hidup dari berburu dan mengkonsumsi sagu, perlu waktu untuk penyiapan sosial yang cukup lama untuk mengubah mereka jadi petani seperti para transmigran. Demikian juga dengan proyek *Merauke Integrated Food and Estate* (MIFE), orang Marind tidak dapat dipaksa untuk bekerja di perkebunan sawit. Sebagai akibatnya, transmigrasi dan MIFE membuat orang Marind semakin terasing dari tanahnya sendiri, sebagian terpaksa menyerahkan tanah yang merupakan tempat hidup dan berburu, kemudian mereka tinggal ke tempat yang lebih jauh.

Pengambilalihan tanah dari OAP baik secara legal maupun ilegal oleh perusahaan perkebunan sawit merupakan fenomena yang sekarang ini berlangsung di sejumlah tempat di Papua termasuk Merauke, Boven Digul, Nabire, dan Teluk Wondama.<sup>134</sup> Bahkan di Jayapura, pembangunan pelabuhan kargo di Depapre juga sedang bermasalah terkait dengan hak ulayat perairan yang belum diatur ketentuan perundang-undangannya. Sedangkan penguasaan tanah adat Papua oleh TNI terjadi di Biak oleh Angkatan Udara, di Manokwari oleh angkatan Darat, dan sejumlah tempat lainnya. Berbagai bentuk *land grabbing*, depopulasi, dan

134. Pusaka, *Setahun Moratorium: Mendesak Negara, Memulihkan Hak Masyarakat, Laporan Pusaka 2019* (Jakarta: Yayasan Pusaka, 2019).



kerusuhan rasial menjadikan kerangka penentuan nasib sendiri menguat dalam konteks perjuangan untuk bertahan hidup OAP di kalangan aktivis politik Papua.

OAP yang jumlahnya semakin sedikit dan berada di pinggiran dalam perekonomian ekonomi juga mengalami marginalisasi dalam nilai adat karena lembaga adat telah dilemahkan oleh Pemerintah. Sebagai contoh Pemerintah hanya mengakui LMA dan memberikan stigma terhadap DAP yang dibentuk dari bawah. LMA dibentuk oleh Pemerintah pada masa Orde Baru, pertama kali diketuai oleh Theys H Eluay. Kemudian pada 2000, pasca Kongres II Rakyat Papua, Theys Hiyo Eluay sebagai Ketua LMA menerbitkan SK Panitia KBMAP pada tahun 2001. SK ini dikeluarkan karena ada kesadaran bahwa LMA hanya menjadi bantal stempel pembangunan dan arena itu perlu dibentuk satu kelembagaan yang mendapat mandate rakyat. KBMAP I baru dilaksanakan pada 2002 setelah Theys terbunuh. Pada 2011, dilaksanakan KBMAP II di Gor Cenderawasih Jayapura, di mana Forkorus Yaboisembut, S.Pd terpilih menjadi Ketua DAP. DAP di bawah kepemimpinan Forkorus Yaboisembut cenderung menjadi salah satu faksi politik dengan mendeklarasikan diri menjadi Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), dimana Forkorus sebagai Presiden dan Edison Waromi menjadi Perdana Menteri. Forkorus kemudian memecat beberapa tokoh DAP yang dianggap tidak sejalan, seperti Leonard Imbiri, Fadhal Al-Hamid, dan Jakob Kasimat. Mereka yang dipecat berpandangan bahwa DAP bukan sebuah gerakan politik seperti Presidium Dewan Papua (Papua) tetapi harus fokus pada perjuangan hak-hak dasar OAP terutama hak atas SDA dan kebudayaan. Selanjutnya pada 2015, dilakukan KBMAP III di Biak dan memilih Mananwir (ketua suku) Yan Pieter Yarangga sebagai ketua DAP dan Leonard Imbiri sebagai

Sekretaris Umum DAP. Persoalan yang muncul ialah sebagian pendukung Forkorus terutama dari DAP La Pago tidak mengakui kepemimpinan Yarangga dan mendeklarasikan diri sebagai DAP di bawah Dominikus Surabut. Kelompok ini juga menyatakan sebagai DAP La Pago. Perpecahan internal dan kurangnya rekognisi terhadap DAP mejadikan upaya pelestarian dan perlindungan nilai adat menjadi kurang efektif, sehingga tidak ada upaya sistematis untuk melakukan revitalisasi nilai adat OAP. Bahkan, nilai tersebut sengaja dilemahkan karena dianggap sebagai penghambat pembangunan.<sup>135</sup>

Namun demikian, tidak semua lembaga pemerintah bersikap antipati terhadap DAP yang merupakan representasi gerakan kebudayaan OAP. Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada masa Yohanna Yembise, meminta masukan DAP untuk memberdayakan perempuan asli Papua. Kemudian, DAP membentuk Kelompok Kerja Perempuan Adat dan membantu program kementerian ini di tujuh wilayah adat seperti: Jayapura, Manokwari, Wamena, Biak, Kaimana, Dogiyai, dan Merauke. Pokja Perempuan membantu program ini dengan dialog dengan mama-mama asli Papua yang bekerja di pasar, program apa yang mereka inginkan dari Pemerintah. Kemudian hasil dialog tersebut direkomendasikan pada Kementerian dan ditindaklanjuti seperti penanganan pasar mama-mama, dukungan bagi kerajinan noken, dan pembuatan kelompok kerja perempuan adat.

135. Bahkan, selain lembaga adat, pengaruh gereja juga dilemahkan sehingga masyarakat tidak memiliki panduan nilai kebudayaan dan agama karena beberapa pimpinan denominasi gereja telah menyatakan sikap kritis terhadap ketidakadilan di Papua terutama Gereja Kingmi, Gereja Baptist, Gereja Injili di Indonesia (GIDI), dan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKIT).

Identitas kesukuan di Papua masih cukup kuat dimana setiap suku memiliki sistem pemerintahan adat, bahasa, dan wilayah beserta tradisi kebudayaannya. Hak kepemilikan sumber daya di wilayahnya ada pada setiap suku. Program-program pembangunan pemerintah seharusnya dibicarakan oleh pemerintah dengan setiap suku yang menjadi lokasi program tersebut. Keputusan MK No 35/2018 mengatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Oleh karena itu, prinsip *Free Prior and Informed Consent* (FPIC) harus dipraktikkan dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua. Kepala suku dan komunitasnya harus diinformasikan dan dimintai izin atau persetujuan dan diberikan hak-haknya.

Menurut FA, seorang tokoh DAP, Pemerintah dan/ pihak swasta harus berbicara dengan para pihak atau tokoh yang representatif dari suku tersebut sebelum pembangunan dimulai. Kemudian sebelum proyek dijalankan harus dilakukan penataan masyarakat adat terlebih dahulu, misalnya dengan pemetaan partisipatif untuk mengidentifikasi siapa pemilik lahan dan sampai mana batasnya, serta siapa saja yang berhak menerima kompensasi. Wilayah-wilayah hak ulayat dan pemiliknya harus dipetakan jelas baru program pembangunan dilaksanakan. Namun, persoalan juga muncul dari kalangan internal masyarakat asli di Papua. Misalnya ketika tanah dalam bentuk hutan biasanya OAP tidak akan membicarakannya atau menuntut klaim, tetapi begitu ada pemukiman berkembang di suatu wilayah adat, mereka baru berebut klaim atas nilai tanah tersebut.

Menurut FA, strategi lain untuk mencegah marginalisasi dan depopulasi OAP sekaligus mendorong pembangunan berbasis

masyarakat adat ialah mengkonfirmasi kebutuhan masyarakat adat.<sup>136</sup> Memang harus diakui masih ada beberapa praktik adat yang menghambat pembangunan tetapi secara perlahan akan dilupakan dan ditinggalkan oleh masyarakat seperti memotong jari tangan satu ruas ketika saudaranya meninggal, atau tradisi mas kawin yang mahal, serta pengekangan terhadap perempuan. Sekarang ini banyak perempuan dari pegunungan yang menjadi anggota DPRD, DPRD, dan DPR RI. Perempuan dari pegunungan yang dulu masih sedikit menempuh pendidikan tinggi sekarang sudah banyak yang sekolah lanjut seperti halnya orang pesisir. Program-program pembangunan semua harus terkonfirmasi dengan adat istiadat. Contoh lain adalah pengalaman Steven Abraham, seorang pengusaha dari Merauke yang membangun jalan di Nduga sebelum PT Istaka Karya. Pengusaha ini telah membangun jalan di Nduga selama sepuluh tahun sejak pemekaran. Setelah memenangkan tender, dia pergi menemui ketua-ketua suku Ndugama dan membuat kesepakatan bahwa tidak ada tentara yang dilibatkan dalam proyek konstruksi jalan tersebut. Kemudian, ia mengadakan upacara bakar batu sebagai tanda masuk dengan mengundang masyarakat pemilik hak ulayat di lokasi yang akan dibangun. Selama pembangunan berjalan, ia menyediakan dua dapur umum untuk melayani konsumsi karyawannya dan juga masyarakat di sekitar lokasi yang akan dibangun.

136. Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan FA, tokoh adat, di Jayapura, 16 Januari 2020.

### 3.5 MENCEGAH MARGINALISASI DAN DEPOPULASI OAP

Marginalisasi dan depopulasi beserta dampaknya merupakan persoalan besar yang dialami oleh OAP pada masa kini selain kekerasan politik. Keduanya bersumber dari konsep pembangunan yang tidak mengangkat harkat dan martabat manusia Papua dan tidak memberikan tempat pada kebudayaan OAP. Pater Neles Tebay dalam ceramahnya di LIPI pada 2014 menjelaskan relasi antara praktik pembangunan dan kebudayaan sebagai berikut. *Pertama*, OAP dipandang sebagai makhluk primitif, belum maju, masih berada pada taraf awal perkembangan manusia. Semua kehidupan berlangsung menurut hukum adat. Segala permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan diselesaikan menurut praktik dan tradisi kebudayaan. Pandangan ini diperkuat dengan minimnya pendidikan formal di tengah OAP. OAP masih terbelakang karena tidak memiliki pengetahuan modern. Pandangan di atas terungkap jelas ketika orang non-Papua melihat OAP yang menggunakan koteka. Koteka dipandang sebagai simbol keterbelakangan dan keprimitifan yang memalukan bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah mengira bahwa orang masih mengenakan koteka karena tidak mempunyai pakaian, maka diluncurkan operasi koteka dimana pakaian dibagikan secara gratis agar dipakai. Jadi koteka tidak dipandang sebagai hasil dari local genius tetapi simbol keterbelakangan dan kemiskinan, OAP yang mengenakan koteka dipandang sebagai primitif, terbelakang, dan belum tahu banyak tentang modernitas.

*Kedua*, ketika semua unsur kebudayaan Papua dipandang bercorak primitif dan terus-menerus mendengarkan pernyataan tentang keprimitifan kebudayaan ini, maka salah satu akibatnya

adalah OAP sendiri tidak menghargai nilai kebudayaannya sendiri. Sebagai akibatnya mereka merasa malu menggunakan bahasa daerahnya, terutama di hadapan orang dari luar sukunya karena takut dipandang sebagai primitif atau masih kuno. Anak-anak muda kini lebih lincah berbahasa Indonesia daripada berbahasa daerah karena bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar di rumahnya.

*Ketiga*, sebagai konsekuensi dari pandangan, maka kebudayaan Papua dipandang sebagai penghambat pembangunan. OAP belum bisa berkembang karena hidupnya masih terikat kuat dengan tradisi kebudayaannya. Tim peneliti biasa mendengar kalimat seperti ini, "orang di sini masih terikat pada adat sehingga sulit maju." Pandangan ini melahirkan suatu stereotip bahwa "OAP tidak mampu atau tidak bisa." Dengan demikian tradisi kebudayaannya pun tidak diperhitungkan sama sekali dalam membuat kebijakan pembangunan di Papua. Bagi Pemerintah Indonesia, tidak ada hal menarik yang dapat dipelajari dari kebudayaan tradisional Papua. Maka bisa dimengerti apabila tidak banyak orang Indonesia yang melakukan penelitian terhadap kebudayaan Papua. Keinginan orang Indonesia mempelajari kebudayaan Papua dapat dipahami karena orang biasanya ingin mempelajari sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang primitif. Studi tentang budaya Papua tidak ada gunanya karena tidak ada yang bisa dipelajari untuk hidup dan mengembangkan diri. Kebudayaan Papua tidak diperlukan demi kemajuan sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Oleh karena itu kebudayaan Papua tidak diajarkan di sekolah-sekolah, termasuk di Tanah Papua.

Oleh karena itu, dapat dimengerti apabila kebudayaan Papua, selain ukiran Asmat dan sejumlah lagu Papua, kurang dipromosikan dan karena itu pula tidak dikenal di Indonesia.

Akibatnya, Pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak mengenal karakter OAP serta nilai fundamental yang menopang hidup OAP sejak dahulu hingga kini. Ketika kebudayaan Papua dipandang primitif, maka OAP pun dilihat sebagai orang yang masih primitif. Ketika kebudayaan Papua dipahami sebagai penghambat kemajuan dan pembangunan, maka para penganut kebudayaannya masih dipandang sebagai “orang yang tidak bisa atau mampu” dan karena itu tidak dapat dilibatkan dalam pembangunan.

Pada tingkatan praktis, praktik-praktik ekonomi di Papua juga tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan OAP. Perekonomian di Papua tidak hanya meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi tetapi juga mencakup rangkaian tradisi kultural seperti perkawinan, duka, pertukaran barang berharga, dan lain-lain. Sebagaimana ekonomi etnis Melanesia, OAP melihat perekonomian yang baik mencakup relasi harmoni dengan leluhur, alam, dan sesama. Misalnya usaha membuka kebun akan berjalan dengan baik jika dikaitkan dengan leluhur, alam, dan sesama manusia berlangsung dengan baik. Pandangan ini berbeda dengan sistem ekonomi modern yang menekankan pada individualisme dan keuntungan sebesar-besarnya. Perbedaan lain ialah ekonomi Papua lebih ditunjukkan pada kesempatan dan kemampuan untuk menghasilkan makanan seperti ubi, petatas, keladi, dan lain-lain. Hasil kebun yang melimpah akan meningkatkan kedudukan seseorang dalam komunitas kulturalnya.<sup>137</sup>

137. SKPKC, “Rekam Jejak, Perjuangan Mama-Mama Pedagang Asli Papua untuk Mendapatkan Pasar di Tengah Kota Jayapura,” SKPKC, Seri Memoria Passionis No. 23 (2011), hlm. 71.

Kita juga harus memahami bahwa nilai akhir dari ekonomi Papua bukanlah akumulasi kapital atau komoditas, akan tetapi hidup baik dengan kerabat dan leluhur, sehingga tercipta relasi harmonis dengan keluarga inti dan klan sesuai dengan norma. Misalnya hasil kebun atau hasil buruan tidak hanya dimakan oleh keluarganya sendiri tetapi dibagi pada keluarga yang lain, sehingga antarkeluarga saling memberi dan menerima. Produksi, distribusi, dan konsumsi selalu bersifat komunal. Relasi kekerabatan baik di dalam klan maupun antarklan jauh lebih penting daripada menyimpan hasil kebun untuk dikonsumsi sendiri. Dengan demikian, asas resiprositas merupakan inti dari perekonomian Papua yang berciri khas komunal.<sup>138</sup>

Selain melakukan revitalisasi kebudayaan OAP, kita harus lebih memperhatikan upaya memperbaiki sumber daya manusia OAP. Marginalisasi dan depopulasi yang terjadi dimungkinkan karena rendahnya sumber daya manusia Papua. Bagian ini akan memaparkan sedikit kondisi pembangunan pendidikan di Kota Jayapura yang paling maju di Provinsi Papua. Pendidikan di Tanah Papua dapat dibedakan antara di daerah kota, pesisir, terisolasi, dan terpencil. Misalnya kegiatan belajar mengajar dapat berjalan setiap hari di daerah kota dan sebagian pesisir. Contoh di daerah perkotaan, misalnya Kota Jayapura, Sentani, Kota Sorong, dan Manokwari. OAP yang tinggal di kawasan perkotaan dapat dikatakan sudah memiliki tradisi pendidikan modern. Namun, kegiatan belajar mengajar tidak dapat berjalan setiap hari di daerah terpencil. Sedangkan di daerah yang masih terisolasi yang berjalan adalah pendidikan adat yang

138. SKPKC, "Rekam Jejak, Perjuangan Mama-Mama," 73.



hanya diterima oleh laki-laki. Di daerah terpencil seperti Wamena, tingkat kehadiran guru masih menjadi persoalan.<sup>139</sup>

Hasil penelitian Afriansyah merekomendasikan perlunya pendekatan pendidikan di Tanah Papua berbasis geografis, sosial budaya, dan demografi.<sup>140</sup> Diharapkan sistem pendidikan yang khas Papua mampu membentuk karakter OAP yang mampu menggerakkan birokrasi ekonomi, sistem politik, dan budaya, sehingga mampu menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Selain itu, relevansi pendidikan adat yang hidup, tumbuh, dan berkembang pada masa lalu menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan nilai budaya OAP pada masa kini sehingga tetap memiliki pegangan dalam perubahan sosial yang berjalan dengan cepat. Di daerah yang didominasi pendatang, sistem pendidikan perlu menyiapkan anak Papua untuk dapat bertahan hidup ketika mereka terhubung dengan dunia luar. Di wilayah yang didominasi OAP, pendidikan harus lebih didesain pada upaya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya.

139. Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan AK, Guru SMA, di Jayapura, 17 Januari 2020.

140. Afriansyah, et.al., *Policy Paper: Alternatif Pendidikan*, 15.



## BAB 4

# PEMBANGUNAN, IDENTITAS, DAN RESISTANSI

### 4.1 SEJARAH PANJANG PENAKLUKAN PAPUA

PAPUA sering dianggap oleh kalangan akademisi, baik Barat maupun Indonesia, sebagai suatu masyarakat yang sejarahnya tidak diketahui dengan jelas.<sup>141</sup> Bahkan, mereka menamakannya tanah yang tidak bertuan atau *terra incognita*. Representasi dan narasi Papua dibangun dengan perspektif pihak luar (*outsider*) yang membuat hanya ada tafsir dominan para penguasa terhadap siapa dan bagaimana Papua itu. Padahal ada sejarah panjang identitas Papua sebelum terintegrasi dengan Indonesia.

Belum terlalu jelas bagaimana istilah “Papua” itu muncul, namun ada beberapa dokumentasi yang dapat digunakan. Dalam penelitian Gelpke, istilah Papua pertama kali dicantumkan oleh

141. Wawancara Ade Yamin, Antropolog dan Dosen IAIN Fattahul Muluk Jayapura, April 2020.

eksplorasi Portugis pada abad ke-16.<sup>142</sup> Melalui laporan yang dihasilkan Gabriel Rebelo berdasarkan observasinya pada 1560 tertulis "*Papua, em todas as linguas diz Cafre,*" artinya Papua dalam Bahasa orang Maluku adalah 'kafir" atau penyembah berhala.<sup>143</sup> Tidak hanya merujuk pada sistem kepercayaan, istilah *Papua* juga dipakai untuk mengidentifikasi penduduk asli Pulau Guinea Baru yang terdiri dari negara merdeka PNG di bagian timur dan Tanah Papua. Selain merujuk pada perbedaan linguistik antara Austronesia dan non-Austronesia, *Papua* atau *puahpuah* juga dipakai untuk menggambarkan rambut keriting yang punya konsekuensi tambahan, yakni hitam atau kulit gelap.<sup>144</sup> Dalam perkembangannya, muncul kajian-kajian yang menjelaskan istilah *papua* sebagai bagian dari rumpun Melanesia, yang berbeda dengan Melayu. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan istilah Papua sejak awal abad ke-16 lebih terkait dengan asosiasi kepada orang, tempat, dan ras.<sup>145</sup>

Evolusi dan sekat sosial yang terbangun ini kemudian membentuk karakter budaya, sosial, dan ekonomi di antara ras-ras yang berbeda. Dari segi ras, Papua masuk dalam rumpun Melanesia dengan pola budaya tertentu. Kekayaan Papua juga terlihat dari keberagaman suku dan bahasa. Sedangkan secara ekologis, ada variasi dalam pola adaptasi masyarakat. Pesebaran ekologis yang bervariasi membentuk fokus budaya, misalnya area budaya agraris di pegunungan tengah, sirkulasi kain timur di sekitar wilayah

---

142. Gelpke, "On the Origin," 318.

143. Afriansyah, et.al., *Policy Paper: Alternatif Pendidikan*, 13.

144. Afriansyah, et.al., *Policy Paper: Alternatif Pendidikan*, 13.

145. A. Ibrahim Peyon, *Manusia Papua Negroid: Ras dan Ilmu dalam Teori Antropologi* (Jakarta: Kelompok Studi Nirentohon, 2012), 13.

kepala burung, kebudayaan masyarakat maritim di sekitar Teluk Cenderawasih, budaya fumeripits dalam masyarakat Asmat di bagian selatan, dan lain sebagainya.<sup>146</sup> Budaya masyarakat ini dibentuk dalam proses refleksi atas relasinya dengan alam.

Setiap suku bangsa yang hidup menjadi entitas politik yang mengatur dirinya sendiri baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Hal ini terlihat dalam sebuah dokumentasi tentang suku Amungme. Menurut Hein van der Schoot, seorang pejabat Belanda yang pernah betugas di Mimika:

*Orang Amungme mendiami daerah yang luas hingga pertengahan tahun 1960an, mereka hampir tidak terjamah oleh pengaruh pemerintah. Ini berbeda dengan tetangga mereka di sebelah timur, orang Dani, yang mendiami daerah yang lebih terkonsentrasi... Di lembah tiap-tiap kelompok orang Amungme merupakan komunitas yang solid, namun pemukiman mereka bukan merupakan desa dalam arti biasa. Letak rumah mereka berkelompok-kelompok. Tidak banyak tanah yang cocok untuk berkebun. Kesadaran teritorial ada di sana karena keterisolasian lembah-lembah tempat mereka tinggal. Dari segi strategi, orang Dani lebih unggul.<sup>147</sup>*

Dokumentasi lainnya juga dibagikan Richardson. Ia mengagumi bagaimana orang Yali mengidentifikasi diri mereka sebagai “orang-orang kuat dan perkasa, penguasa bumi.” Cara pandang

---

146. Peyon, *Manusia Papua Negroid*, 13.

147. Margaretha Hanita, *Cita-Cita Politik: Gerakan Politik Orang Papua* (Jakarta : UI Publishing, 2019), 101.

seperti ini tidaklah terlepas dari keberadaan mereka di lembah-lembah yang terpencil dan dikelilingi gunung, sehingga tidak seorang pun dapat menantang kekuasaan mereka.<sup>148</sup>

Berbeda dengan penduduk asli lembah, masyarakat Biak sudah lebih dulu berkontak dengan dunia luar sehingga mereka sering disebut *The Vikings*. Kebudayaan Maritim menjadi kekuatan mereka sehingga mereka sering bermigrasi ke daerah seperti Raja Ampat, Manokwari dan Kepulauan Komamba, Jayapura.<sup>149</sup> Suku Bangsa Biak juga sudah dikenal lama sebagai para penjelajah lautan yang tangguh. A. B. Lopian menuliskan jelajah orang Biak ke Maluku, Sulawesi, dan Jawa, bahkan diperkirakan pada periode 1400-1800 sudah sampai di semenanjung Malaka.<sup>150</sup> Tidak hanya itu, orang Biak bahkan sudah sampai pada pembentukan aliansi politik dengan Sultan Nuku ketika menghadapi Kesultanan Jailolo dan Ternate sekitar 1780-1810.<sup>151</sup>

Eksistensi masyarakat dari generasi ke generasi juga dipertahankan melalui ideologi dan kepercayaan yang direfleksikan melalui mitologi dan pandangan *mesianis*. Seperti *koreri* dalam kebudayaan Biak, Numfor, dan Raja Ampat, Pasai-Buri di Nabire, Manokwari, Wondama, Bintuni dan sekitarnya, Dema dalam kebudayaan Marind Anim, Fumeripits dalam budaya Asmat dan sekitarnya, Atoaripiti *Bipiaripimera* dalam kebudayaan Kamoro, *Yeli*

148. Hanita, *Cita-Cita Politik*, 136.

149. Enos H. Rumansara, "Transformasi Upacara Adat Papua: Wor dalam Lingkaran Hidup Orang Biak," *Humaniora*, Volume 15, no 2 (Juni 2003), 212. <https://doi.org/10.22146/jh.789>

150. A. B. Lopian, *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut, Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX* (Depok: Komunitas Bambu, 2009).

151. Muridan Widjojo, *Pemberontakan Nuku: Persekutuan Lintas Budaya di Maluku-Papua Sekitar 1780-1810* (Depok: Komunitas Bambu, 2013).

dalam budaya Yali, Mek dan Hubula, *naruekul* dalam budaya Habula di lembah Baliem, dan *Hai* dalam budaya Amungme.<sup>152</sup>

Brvald Childs mendefinisikan mitos dan mitologinya sebagai “*suatu bentuk melalui mana struktur-struktur kenyataan yang ada dimengerti dan dipertahankan.*”<sup>153</sup> Dalam konteks Melanesia, mitos tidak hanya berfungsi mempertahankan struktur yang ada, tetapi juga berfungsi sebagai model atau rencana bagi perubahan yang diharapkan akan terjadi. Menurut Strelan “*Mitos diangkat secara terus-menerus, direvisi, dimodernisasi, dan dijadikan relevan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang bersifat eksistensial.*”<sup>154</sup> Dalam sejarah suku bangsa di Papua, mitologi ini kemudian dihidupi sebagai aspirasi emosional dan politik yang menggerakkan masyarakat ketika berhadapan dengan ancaman dari luar.

Penjelasan singkat di atas penting untuk melihat bahwa jauh sebelum negara modern itu ada, suku bangsa Papua yang beragam telah eksis. Mereka hidup sebagai entitas politik yang berdaulat (*sovereign*) dan menentukan nasibnya sendiri, baik secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Budaya dalam komunitas masing-masing disepakati bersama sebagai hasil relasi dengan alam dan lingkungannya. Sistem kepemimpinan tradisional, pranata sosial, peradilan adat, norma, dan nilailah yang menjadi instrumen dalam memastikan keberlangsungan hidup mereka (*survival*).

152. Peyon, *Manusia Papua Negroid*.

153. John Strelan dan Jan. A. Godschalk, *Kargoisme di Melanesia: Suatu Studi tentang Sejarah dan Teologi Kultus Kargo* (Jayapura: Pusat Studi Irian Jaya, 1989), 117.

154. Strelan dan Godschalk, *Kargoisme di Melanesia*, 117.

Dalam relasi dengan suku lain di sekitarnya, kesadaran teritorial bagi setiap suku menjadi nilai sentral.<sup>155</sup> Kesadaran ini diwujudkan melalui pembagian batas wilayah setiap klan atau suku dengan menggunakan sungai, gunung, bukit, dan petunjuk alam lainnya. Tanpa melalui pematokan modern pun, pembatasan tradisional ini terus dihargai. Batas wilayah setiap suku juga merupakan simbol identitas bagi sukunya. Oleh karena itu, perang suku yang terjadi adalah bukan hanya bagian dari mempertahankan integritas wilayahnya (*territorial integrity*), tetapi juga menjadi identitas pembeda antara suku bangsa. Ketika perang atau perselisihan antara suku terjadi, maka resolusi konflik yang berakar dari budayanya akan dilaksanakan dalam menciptakan perdamaian, seperti mekanisme bakar batu atau bayar kepala.<sup>156</sup>

Di sinilah terlihat keunggulan, peradaban, dan intelektualitas masyarakat dalam mengatur dirinya sendiri dan relasinya dengan suku lain. Alam menjadi narasi kultural mereka. Tanah dan segala yang ada di dalamnya tidak hanya memberikan fungsi ekonomi, tetapi menjadi bagian integral dalam memahami dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Budaya dan identitas inilah esensi tentang siapa mereka, bagaimana, dan dimana seharusnya mereka berada, serta bagaimana relasi mereka dengan kelompok masyarakat di luar komunitasnya.

Namun sejarah Papua membuktikan adanya sikap resistansi yang berakar dalam identitasnya ketika berinteraksinya dengan pihak luar (*other*). Ketika injil masuk ke Papua pada 5 Februari 1855,

---

155. Strelan dan Godschalk, *Kargoisme di Melanesia*, 117.

156. Lihat F. Maubak, "Ritual Bakar Batu sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Horizontal pada Masyarakat Adat Suku Dani di Timika Papua," Disertasi Doktorat Program Studi Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2009.



kultur adalah tantangan utamanya. Sehingga sesudah setengah abad setelahnya, kuburan Pendeta lebih banyak dibandingkan jumlah OAP yang dibaptis.<sup>157</sup> Demikian juga dengan perlawanan masyarakat Amungme<sup>158</sup> ketika Freeport mulai beroperasi pada 1967. Menurut Giay dan Beanal, protes masyarakat Amungme ini didorong motif *Hai* yang mendambakan kehidupan lebih baik, kesejahteraan, rumah yang sehat dan kemakmuran. Juga pengakuan terhadap hak dan sejarahnya. Emas dan tembaga yang kemudian dieksploitasi dengan kehadiran Freeport dilihat sebagai cara untuk merealisasikan impian mereka.<sup>159</sup> *Hai* yang adalah sebuah mitologi dalam masyarakat tradisional Amungme kemudian ditransformasikan sebagai gerakan kultural ketika berhadapan dengan Freeport dan militer Indonesia hingga saat ini.

Hal yang sama juga terjadi dalam resistansi masyarakat Biak tradisional hingga sekarang. Ketika Jepang menginvasi Pulau Biak pada masa Perang Dunia 2, kesakitan akibat perang menghidupkan kembali *Koreri* sebagai gerakan perlawanan. Ideologi *Koreri* sendiri menempatkan Manarmakeri<sup>160</sup> sebagai Mesias yang dianggap telah pergi dan akan kembali untuk mendatangkan hidup

---

157. Hanita, *Cita-Cita Politik*, 65.

158. Suku bangsa Amungme tinggal di lembah-lembah di antara wilayah administrasi Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak Jaya. Kontak pertama Amungme dengan pendatang dari luar diperkirakan terjadi pada 1912 hingga 1913. Lihat Hanita, *Cita-Cita Politik*, 97.

159. Hanita, *Cita-Cita Politik*, 199.

160. Figur sentral *Koreri* adalah lelaki tua bernama Yawi Nushado yang kemudian disebut Manarmakeri. Julukan ini berasal dari kata *mansar* (*lelaki tua*) dan *amaker* (*kudisan*). Manarmakeri kemudian melakukan *Rer* (*perubahan*) dengan membakar dirinya di api. Ia kemudian muncul dalam bentuk aslinya bukan sebagai orang tua yang mengalami sakit kulit, namun sebagai seorang pria muda yang gagah. Pergantian kulit Manarmakeri menunjukkan adanya proses pembaharuan dari generasi ke generasi yang berlangsung secara berkesinambungan. Freerk Christiaans Kamma, "Koreri: Gerakan Messianis dalam Kebudayaan Biak-Numfor," Disertasi Ph.D Universitas Leiden, 1972, 21.

yang berkelimpahan. Selain itu, Manarmakeri juga dikisahkan bertemu dengan Sampari 'Si Bintang Kejora' di Pulau Wundi. Sampari menunjukkan adanya perwujudan Maha Kuasa yang memberitahukan rahasia hidup abadi. Kisah ini dipercaya dan melekat dalam simbol perjuangan Papua, salah satunya adalah Bintang Kejora. Hingga saat ini Koreri masih tetap menjadi simbol penting dalam memahami nasionalisme dan resistansi masyarakat Biak dan Papua.<sup>161</sup>

Sejarah Papua membuktikan bahwa ada resistansi yang mengakar dalam budaya dan identitasnya. Perlawanan ini muncul dalam interaksi dengan pihak luar yang dianggap mengancam nilai yang dipercaya dan dihidupi selama turun temurun. Meskipun kedatangan pihak luar tidak selalu memberikan dampak buruk, namun ketegangan nilai baru dan lama menjadi sumber resistansi. Dan budaya muncul tidak hanya sebagai simbol partisipasi namun sebagai wadah bagi terbentuknya aksi dan motif gerakan sosial masyarakat Papua.<sup>162</sup>

## 4.2 REPRESENTASI NEGATIF PAPUA

Kontak Papua dengan dunia luar memberikan makna bagi berbagai suku bangsa Papua untuk melihat diri dan identitasnya. Kedatangan para ekspedisi Eropa, kolonial Belanda, hingga interaksi dengan

161. Danilyn Rutherford, *Laughing at Leviathan. Sovereignty and Audience in West Papua* (Chicago : University of Chicago Press, 2012), 112.

162. Menurut March Ross simbol budaya yang dimunculkan dalam gerakan sosial punya implikasi politis. Lihat March Ross, "The Cultural Dynamics of Ethnic Conflict," dalam *Culture in World Politics*, Andrew Oros, Marco Verweij, dan Dominique Jacquin-Berdal eds., (London: Palgrave Macmillan, 1998): 156-186.

Indonesia membawa serta pengetahuan (*knowledge*) versi mereka. Hegemoni pengetahuan inilah menjadi awal konstruksi rasial terhadap Papua dan pengalamannya.

Menurut Martin Slama dan Munro, representasi Papua sebagai ‘zaman batu’ dan ‘primitif’ telah menjustifikasi berbagai misi untuk ‘memperadabkan,’<sup>163</sup> ‘memodernisasi,’ ‘Kristenisasi,’ dan ‘Islamisasi’ populasi lokal dan membentuk relasi hierarkis.<sup>164</sup> Sejarah Papua kemudian dituliskan dengan kaca mata penguasa. Pengenalan pengetahuan oleh kuasa dari luar secara perlahan-lahan membentuk kuasa pengetahuan terhadap apa dan bagaimana Papua.

Pandangan ini diperkuat dengan pengenalan sistem negara modern yang mendefinisikan kembali ‘negara,’ ‘kedaulatan,’ ‘teritori,’ dan ‘penentuan nasib sendiri.’ Ketika pembangunan pendidikan masuk melalui *zending* maupun program Papuanisasi masa Belanda, suku bangsa Papua mulai terhubung. Dalam berbagai dinamika budayanya karena interkoneksi dan akulturasi budaya, maka masyarakat yang heterogen tadi merefleksikan pengalamannya dan masa depannya melewati batas-batas kesukuannya. ‘*Primitive*’ menjadi sebuah ideologi bagi mereka untuk ‘memahami diri sendiri.’<sup>165</sup> Memahami adanya perbedaan

---

163. Rupert Stasch, “From Primitive Other to Papuan Self: Korowai Engagement with Ideologies of Unequal Human Worth in Encounters with Tourists, State Officials and Education,” dalam *From ‘Stone-Age’ to ‘Real-Time’: Exploring Papuan Temporalities, Mobilities, and Religiosities*, eds. Martin Slama dan Jenny Munro, (Canberra: Australian National University Press, 2015), 62-63.

164. Martin Slama dan Jenny Munro eds., *From ‘Stone-Age’ to ‘Real-Time’: Exploring Papuan Temporalities, Mobilities, and Religiosities* (Canberra: Australian National University Press, 2015), 1-2.

165. Rupert Stasch melihat bagaimana ‘*primitive*’ menjadi sebuah ideologi yang menghubungkan antara yang memberikan stereotipe dengan yang distereotipe dalam konteks masyarakat Korowai. Menurutnya, primitif telah menjadi instrumen bagi masyarakat Korowai

dan kuasa hegemoni yang lambat laun menguasai dan mengancam keberadaan mereka.

Di sinilah Papua terbentuk sebagai hasil imajinasi mereka terhadap kehidupan yang baik. Papua tidak hanya merupakan identitas politis yang dibangun karena aspirasi merdeka, tapi dasarnya adalah dari sejarah penaklukan panjang terhadap identitas dan budayanya. Papua muncul sebagai bentuk resistansi atas penaklukan tapi juga sebagai aspirasi akan hidup yang bahagia dimana tidak ada lagi susah dan penderitaan.

### 4.3 NASIONALISME PAPUA

Dominasi kolonial menjadi faktor penting dalam menyebarkan identitas dan nasionalisme Papua.<sup>166</sup> Interaksi sejarah antara OAP dan pendatang memainkan peranan penting. Menurut Chauvel, ada sistem dua lapis dalam sistem administrasi yang diterapkan di Papua. Di bagian pertama diduduki oleh orang Eropa dalam posisi sebagai pegawai. Lapisan kedua oleh orang Indonesia yang duduk dalam posisi sebagai guru atau polisi. Di lapisan kedua ini juga ada guru-guru yang bebasal dari Ambon, Sangir, Manado, Kei dan Tanimbar.<sup>167</sup> Menurut Belanda, kedatangan tenaga dari Indonesia Timur ini akan lebih mempermudah kontak dengan OAP.

untuk memahami dirinya sendiri (*self understanding*). Mereka merefleksikan kembali identitasnya dan melihat kebutuhan akan reformasi terhadap identitasnya. Hal ini menjelaskan perekatan antara suku bangsa yang beragam di Papua. Lihat Stasch, "From Primitive Other to Papuan," 62-63.

166. Jenny Munro, "Now we know shame: Malu and Stigma among Highlanders in the Papuan Diaspora," dalam *From 'Stone-Age' to 'Real-Time': Exploring Papuan Temporalities, Mobilities, and Religiosities*, eds. Martin Slama dan Jenny Munro, (Canberra: Australian National University Press, 2015), 172.

167. Bernarda Meteray, *Nasionalisme Ganda Orang Papua* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2012), 27.

Sistem administrasi ini hanya dilakukan di Papua karena minimnya kelompok sosial yang terdidik.<sup>168</sup>

Namun, lapisan kedua justru mengambil jarak dari OAP. Stigma OAP sebagai orang 'bodoh,' 'kotor,' dan 'rambut keriting' kerap diungkapkan. Menurut Meteray, ungkapan 'Papua bodoh' sering dikeluarkan dari para guru yang tidak sabar dalam mendidik murid Papua.<sup>169</sup> Alhasil, perasaan ketidaksukaan terhadap kelompok pendatang semakin besar. Masyarakat Papua kemudian menyebut para pendatang dengan istilah *Amberi*. Sistem ini kemudian mengubah struktur sosial yang sudah ada. Interaksi minim dengan Belanda membuat pandangan Papua terhadap Amberi sebagai penjajah yang sebenarnya. Papua-Amberi menjadi sebuah dikotomi oposisi sejak kolonialisme.

Di sinilah menjadi akar pahit bagi terbentuknya rasialisme. Menurut Maccallum, rasialisasi terjadi ketika perbedaan antara sesama manusia disederhanakan tanpa melihat pada signifikansi sosial, politik, budaya, ekonomi, dan bahkan psikologis. Pandangan rasis terhadap Papua kemudian mempertajam polarisasi Papua-Amberi. Pandangan Papua kepada Amberi sebagai kolonial sudah semakin jelas. Akan tetapi, hal ini belum membangkitkan semangat nasionalisme. Pada masa ini, dapat dilihat bagaimana Papua dan pandangan rasialisme merupakan sebuah konstruksi politis.

Fase penting dalam pembentukan persamaan nasib adalah melalui pelembagaan identitas Papua dengan kebijakan papuanisasi yang diterapkan Belanda sejak 1950an. Ide ini bertujuan untuk

168. Meteray, *Nasionalisme Ganda Orang Papua*, 25.

169. Meteray, *Nasionalisme Ganda Orang Papua*, 27.

mempersiapkan kemerdekaan Papua yang direncanakan pada 1970an.<sup>170</sup> Gagasan ini lahir dari kesadaran akan interaksi Papua dengan kebudayaan non-Papua yang telah mencabut Papua dari akar-akar budayanya. Menurut Benny Giay, meski hanya sedikit Lembaga Pendidikan yang dibuat Belanda, namun jelas bahwa tujuannya adalah papuanisasi bukan indonesianisasi.<sup>171</sup> Dengan kata lain, pendidikan menjadi alat transformasi penting melindungi identitas politik dan nilai kultural OAP dari berbagai ancaman budaya modernisasi dan indonesianisasi itu sendiri.

#### 4.4 INDONESIANISASI MELALUI PEMBANGUNAN

Ketika menjabat sebagai presiden di tahun 1966, Soeharto menyatakan Orde Baru akan menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Hal ini berbeda dengan era Demokrasi Terpimpin ala Soekarno. Ada dua implikasi penting dari pandangan sentral ini. Pertama, kerangka kebijakan era Orde Baru berubah dari semangat 'revolusi' menjadi 'akselerasi dan modernisasi.'<sup>172</sup> Tujuan yang hendak dicapai oleh Soeharto sebenarnya adalah mengintegrasikan Indonesia dan masyarakatnya ke dalam sistem kapitalisme modern. Oleh karena itu, basis stabilitas keamanan

170. Meteray, *Nasionalisme Ganda Orang Papua*, 27.

171. Indonesianisasi merujuk pada proses pembangunan yang dianggap tidak bertujuan untuk mensejahterakan Papua, tetapi untuk mengindonesiakan orang Papua semata. Dalam konteks ini, menurut Giay, pembangunan bersikap ideologis dalam mematikan budaya Papua dan memaksa orang Papua untuk berpikir, bersikap, berpakaian, berbicara seperti orang Indonesia. Lihat Benny Giay, *Menuju Papua Baru: Beberapa Pokok Pikiran Sekitar Emansipasi Orang Papua* (Jayapura: Deiyai/ Els-ham Papua, 2000).

172. Giay, *Menuju Papua Baru*, 95.

penting diciptakan dan memastikan kelancaran proses *nation building*.

Dalam perspektif modernisasi, keberadaan sikap modern tertentu adalah prasyarat bagi pembangunan. Masyarakat tradisional dengan karakteristik seperti terikat dengan norma tradisional, hidup dalam keterisolasian, subsisten, memiliki relasi kuat dengan alam yang dianggap maha dahsyat, berorientasi pada masa lalu, memiliki insentif non-ekonomi, dan ingin menjaga stabilitas hidup seperti ini mustahil dapat berkembang.<sup>173</sup> Tidak hanya itu, beberapa penganut teori ini menganggap inti dari modernisasi adalah pada watak modern individu. David McClelland menekankan sikap mengandalkan diri sendiri dan berorientasi pada prestasi sebagai kualitas individu modern.<sup>174</sup> Oleh karena itu, perubahan nilai budaya, manusianya, maupun institusi pendukungnya juga perlu dimodernisasi. Sistem kekerabatan OAP dan pranata sosial yang melanggengkan hidup OAP kemudian dianggap sebagai tantangan besar bagi modernisasi.

Kebijakan yang diambil dalam melakukan modernisasi melalui pembangunan adalah melakukan transmigrasi, yaitu memindahkan penduduk dari daerah padat seperti Jawa dan Bali ke daerah yang masih sedikit jumlah penduduknya, termasuk Papua. Wilayah transmigran seperti Merauke dan Keerom yang berbatasan langsung dengan PNG menjadi area penyangga OPM. Pembukaan lahan untuk transmigrasi ini dimaksudkan untuk mempermudah pengendalian. Tidak heran, pembangunan yang

173. Giay, *Menuju Papua Baru*, 24.

174. Giay, *Menuju Papua Baru*, 21.

sangat Jawa-sentris membuat kebencian OAP pada migran Jawa. Mereka dianggap sebagai migran politis yang merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk mengamankan wilayah Papua.<sup>175</sup>

Ketidaksukaan masyarakat Papua juga beralasan karena banyak para transmigran yang masuk adalah keluarga ABRI maupun pensiunan ABRI.<sup>176</sup> Para veteran ABRI yang ikut dalam program transmigrasi selanjutnya menjadi intel Kodam dalam mengawasi daerah transmigran seperti di Arso dan Koya serta beberapa daerah di Merauke yang kemudian dijadikan sebagai daerah penyangga OPM.

Gelombang transmigrasi menjadi semakin intens di Keerom sejak 1975-1990an, seiring pengembangan perkebunan kelapa sawit.<sup>177</sup> Untuk mendukung kebijakan transmigrasi, Gubernur Irian Jaya mengeluarkan Keputusan No.143/GIJ/1983 pada 26 Mei 1983 tentang penunjukan dan pencadangan tanah lokasi perkebunan inti rakyat.<sup>178</sup> Para transmigran di Keerom (Arso dan Koya) diberikan satu rumah; 0,25 hektar lahan untuk pekarangan; 0,75 hektar lahan pangan; dan dua hektar kebun sawit. Tidak sekadar pola peminggiran yang muncul tapi juga pencaplokan lahan atas nama pembangunan.

175. Max Auparay, *Ekonomi Politik Migrasi Penduduk di Papua*, ed. Alexander L. Griapon, (Jayapura: Kerjasama Penerbit Praja Mandiri dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura, 2012), 15.

176. S. Karoba, et.al., *Papua Menggugat: Teori Politik Otonomisasi NKRI di Papua Barat* (Yogyakarta: WatchPapua dan Galang Press, 2004).

177. Jehan Paju Dale Cypri, *Kuasa, Pembangunan, dan Pemiskinan Sistemik: Analisis Kontra-Hegemoni dengan Fokus Studi Kasus di Manggarai Raya, NTT, Indonesia* (Labuan Bajo: Sunspirit, 2013), 14.

178. Asrida Elisabeth, "Kala Masyarakat Tuntut Hak Ulayat Dari Perusahaan Sawit Negara Di Keerom (Bagian 1)," *Mongabay Environmental News*, 12 Maret 2018. <https://www.mongabay.co.id/2018/03/12/kala-masyarakat-tuntut-hak-ulayat-dari-perusahaan-sawit-negara-di-keerom-bagian-1/>



Dalam wawancara pada Juli 2019, Servo Tuamis, Ketua Dewan Adat Keerom menjelaskan awal masuknya pembangunan jalan dan transmigrasi PIR.

*Setelah program jalan masuk, lalu transmigrasi masuk. Positifnya jalan masuk membuka isolasi, supaya bantu ekonomi masyarakat, tapi hak-hak masyarakat adat secara perlahan-lahan tertindas...Tahun 1980an, masyarakat adat belum tahu proyek ini mengarah kemana. Tapi khusus untuk PIR ini luasan awalnya minta 500 hektar, namun dalam pernyataan pelepasan mencapai 50.000 hektar. Ini masalah sampai hari ini... Tanah ko (pemerintah) bagi untuk nusa bangsa PIR, ini terus kita punya status tanah adat hilang.<sup>179</sup>*

Keerom hanya menjadi satu wajah bagaimana program pembangunan seperti migrasi yang didukung oleh militerisasi dan agenda korporasi sejak sebelum integrasi hingga sekarang memiliki dampak besar. Pembangunan menyebabkan marginalisasi ekonomi dan menghancurkan budaya OAP. Dalam masa Soeharto, tercatat ada 30 SK pelepasan kawasan hutan seluas 90.378,91 hektar. Berbagai catatan juga menunjukkan bagaimana manipulasi dilakukan oleh perusahaan bersama negara. Pencaplokan lahan sejak 1970an juga menjadi cerita yang masih terus dibagikan oleh masyarakat.

Pemerintah juga melakukan homogenisasi budaya untuk meleburkan identitas nasional. Bahasa daerah dari tiap suku di

179. Wawancara Servo Tuamis, Ketua Dewan Adat Keerom, Juli 2019

Papua dilarang untuk dituturkan. Padahal Papua memiliki lebih dari 200 bahasa suku. Bahasa Indonesia menjadi satu-satunya yang digunakan. Tidak heran, penduduk lokal memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang lebih baik daripada para migran yang datang. Di institusi pendidikan formal pun, bahasa daerah Papua tidak boleh diajarkan.<sup>180</sup> Kebijakan diskriminatif ini hanya dijalankan di Papua. Penguasa juga mereproduksi pengetahuan dengan mengajarkan sejarah Papua pasca integrasi. Berbagai ingatan antropologis budaya menjadi sesuatu yang mengancam identitas Indonesia.

Bahkan nama atau istilah *'Papua'* kemudian dilarang penyebutannya di dalam masyarakat. Menurut Fadhal Alhamid: *"yang dibangun Soeharto adalah ketakutan. Ketika kita menyebut istilah Papua saja, sudah dianggap subversif atau makar. Karena Papua itu mewakili suatu pengalaman politis."*<sup>181</sup> Ketakutan itu secara terus menerus dilanggengkan melalui konstruksi rasial dan stigma separatisme yang dilekatkan pada OAP.

Konstruksi rasial dan separatisme yang dilekatkan pada identitas Papua juga melegitimasi kekerasan pembangunan. Salah satu operasi yang menimbulkan trauma masyarakat hingga sekarang adalah Operasi Koteka pada April dan Juni 1977.<sup>182</sup> Atas nama modernisasi, pemerintah menggelontarkan dana

180. Bilveer Singh, *Papua: Geopolitics and the Quest for Nationhood* (London: Transaction Publishers, 2008), 99.

181. Wawancara Fadhal Alhamid, Aktivist Gerakan Mahasiswa Era Orde Baru dan Ketua II DAP, April 2020

182. Al-Araf, *Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan Terhadap Kondisi HAM di Papua* (Jakarta: Imparsial, 2011), 58.

sebesar Rp205 juta rupiah untuk mengganti koteka<sup>183</sup> dengan celana pendek.<sup>184</sup> Elemen-elemen angkatan bersenjata dan aparat birokrasi bergabung dalam kampanye militer untuk memaksakan nilai 'keberadaban' pada OAP. Masyarakat suku Dani dipaksa untuk meninggalkan budayanya, pergi bersekolah dan terintgerasi dengan sistem ekonomi yang modern. Tidak hanya untuk laki-laki, perempuan Papua di daeah pegunungan diberikan Sarung untuk menggantikan Sali yang mereka kenakan. Sekitar 15.000 orang berkumpul melakukan protes. Di Tiom, Jayawijaya, sekitar 4.000 warga menyerang pos pemerintah. ABRI menekan perlawanan dengan menurunkan pasukan dari RPKAD (saat ini disebut Kopassus TNI AD) melalui helikopter.<sup>185</sup>

Operasi Koteka dan berbagai kebijakan homogenisasi budaya lainnya adalah strategi memermalukan (*humiliation strategy*) digunakan menjadi cara sehingga masyarakat merasakan *inferiority complex* dalam proses perubahan sosial itu. Bukan hanya keaslian budayanya dipaksakan hilang, tapi juga hilangnya pribadi dan rasa percaya diri sebagai kolektif dan individu. Georde J. Aditjondro menyatakan:

*Pada saat penjajah tidak bisa lagi meniadakan penduduk jajahannya secara fisik, dia kemudian mengeliminasi mereka secara kultural, dengan mengatakan bahwa mereka tidak*

183. Dalam masyarakat Dani, Koteka merupakan salah satu pakaian yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari di masa lalu dan merupakan salah satu penanda identitas budaya.

184. Singgih Wiryono, "Masa Kelam Koteka Era Orba, Warga Papua Dirazia dan Dipaksa Pakai Celana Pendek," *Kompas.com*, 21 Januari 2020. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/22/05350091/masa-kelam-koteka-era-orba-warga-papua-dirazia-dan-dipaksa-pakai-celana>

185. Al-Araf, *Sekuritisasi Papua*, 58.

*punya kebudayaan atau dengan dalih bahwa kebudayaan mereka lebih rendah.*<sup>186</sup>

Sikap *paternalistic* dan *patronizing* dari Indonesia yang melihat budaya Papua sebagai '*primitive*' dan terbelakang, telah menjadi sumber resistansi. Dalam perkembangannya, operasi ini dilihat tidak berhasil dan menjadi tidak produktif karena justru memperkuat kesadaran bersama OAP dan memunculkan perasaan frustrasi yang sama (*sense of grievance*) yang kemudian termanifestasikan secara politis.

Berbagai agenda pembangunan mulai dari pembangunan ideologis dan politik, pembangunan ekonomi, serta pembangunan sosial dan budaya dilakukan pada era Soeharto.<sup>187</sup> Untuk mempercepat pembangunan, struktur militer dan polisi yang bersifat teritorial seiring berjalan dengan struktur administrasi pemerintahan sipil. Struktur ini kemudian berfungsi sebagai mesin-mesin otoriter dalam memaksakan pembangunan.<sup>188</sup> Pembangunan pun dijalankan dalam kontrol politis yang sangat kuat dalam konteks modernisasi dan perlawanan terhadap gerakan-gerakan perlawanan Papua merdeka yang masih ada. Sehingga, pembangunan dan militerisme menjadi dua sisi mata uang. Militer muncul dalam memastikan kestabilan politik sebagai prasyarat keberhasilan. Hal ini dilakukan oleh Soeharto bukan hanya sekadar untuk menumpas separatisme, tetapi sedang melakukan pembangunan ideologis dan budaya untuk mengindonesiakan

186. Al-Araf, *Sekuritisasi Papua*, 118.

187. Singh, *Papua: Geopolitics*, 94.

188. Singh, *Papua: Geopolitics*, 89.

Papua secara paksa. Tidak hanya memaksakan Indonesia ke tubuh OAP, tetapi secara psikologis OAP dipaksa berpikir, berpakaian, berbicara, dan bertindak seperti orang Indonesia.

Masa Orde Baru menjadi masa penting dalam melihat transformasi Papua. McGibbon menjelaskan bahwa pengalaman Papua saat Orde Baru karena program pembangunan dan migrasi menjadi faktor yang menguatkan identitas Papua.<sup>189</sup> Praktik kekerasan yang terjadi bukan hanya kekerasan langsung yang dirasakan fisik, tetapi juga kekerasan struktural dan budaya. Operasi militer tidak hanya memaksa OAP untuk berpindah dari wilayahnya, tetapi juga membuat kekerasan dan pembunuhan itu menjadi sebuah kewajiban di Papua.

Warisan Orde Baru adalah ingatan kekerasan (*memoria passionis*) yang direproduksi secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Tentu saja ini menjadi elemen penting dalam konstruksi kepapuaan. Akan tetapi, yang lebih mematikan adalah kekerasan kultur yang melegitimasi praktik kekerasan langsung maupun struktural di Papua. Hal ini tidak terlepas dari kekerasan di Papua itu yang melekat (*embedded*) ke dalam struktur negara dan sewaktu-waktu dapat saja dipakai atas nama separatisme.

#### 4.5 KEBIJAKAN EKSTRAKTIF PASCA REFORMASI

Belum berakhir narasi ketertindasannya karena kekerasan negara, Papua menemukan wajah kolonialisme yang baru yakni melalui

189. McGibbon, *Plural Society in Peril*.

ekspansi korporasi. Interkoneksi antara masyarakat adat dan investasi global yang kapitalistik semakin tidak terhindarkan. Hubungan antar keduanya menimbulkan ketegangan antara nilai lama dan nilai baru. Ironisnya, negara yang seharusnya melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat, justru mendukung praktik opresi kapitalis.

Dengan sumber daya berlimpah, Papua menjadi surga bagi para investor. Genealogi ekspansi korporasi sangat erat kaitannya dengan warisan kebijakan sebelumnya. Perkebunan kelapa sawit muncul pada waktu bersamaan dengan kedatangan migrasi. Menurut *fact sheet* yang dikeluarkan oleh Forest Watch Indonesia, ada 10 izin pelepasan kawasan hutan dengan luas mencapai 72.521 ha untuk pembangunan perkebunan. Tidak hanya itu, program transmigrasi yang dilakukan juga berdampak pada kerusakan hutan. Tercatat ada 30 SK pelepasan kawasan hutan dengan luas mencapai 90.378 hektar.<sup>190</sup>

*Tabel 4. 1 Luasan Izin Pelepasan Kawasan Hutan untuk Wilayah Transmigrasi*

Rezim Pemerintahan	Jumlah SK	Luas (Ha)
1991	13	57.866,37
1996	17	32.512,54
Soeharto	30	90.378,91
SBY (2014)	1	31,28

190. Regnskogforet, *Lembar Fakta: Deforestasi Papua dari Masa ke Masa*, Rainforest Foundation, 2019. [fwi.or.id/wp-content/uploads/2019/01/Factsheet-deforestasi-papua.pdf](http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2019/01/Factsheet-deforestasi-papua.pdf)

Jokowi (2017)	1	195,71
Total	32	90.605,90

Sumber: Data Pelepasan Kawasan hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hingga 2017

Program transmigrasi ini menjadi sebuah kekerasan struktural yang masif. Lahan masyarakat diambil atas nama pembangunan.

*Tabel 4. 2 Jumlah SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan*

Rezim	Jumlah SK	Luas (Ha)
<b>Pemerintahan</b>		
Soeharto	10	72.521,65
Awal Reformasi	4	94.332,69
Susilo Bambang Yudhoyono	70	721.391,16
Joko Widodo	4	36.244,59
Total	88	924.490,09

Sumber: Data Pelepasan Kawasan hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hingga 2017

Di masa Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan ekstraktif menjadi lebih ekspansif. Konversi hutan alam menjadi semakin masif. Salah satu program pengembangan pertanian skala besar adalah melalui Kebijakan MIFEE pada 2008. Rencananya akan ada sekitar 1,23 juta ha lahan yang akan dikembangkan. Oleh karena itu

pemerintah mengeluarkan PP No.26/2008, Perpres 5/2008 dan PP No. 18/2010.<sup>191</sup>

#### 4.6 AGEN PEMBANGUNAN: NEGARA, KORPORASI, DAN MILITER

Frangky Samperante, Direktur Yayasan Pusaka, membagikan pengalamannya dalam advokasi masyarakat adat di Papua.<sup>192</sup> Menurutnya, negara masih sangat bergantung pada korporasi/perusahaan dalam menggerakkan berbagai proyek pembangunan. Kepemilikan kapital menjadi alasan utama. Sedangkan negara melalui pemerintah di berbagai tingkatan, berperan dalam beberapa fase tertentu saja seperti pemberian izin dan penyediaan infrastruktur.

Samperante menjelaskan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan sejak awal terkait prosedur ketika berkaitan dengan hak ulayat masyarakat. Konflik masyarakat adat dan perusahaan, terjadi sejak awal pemberian izin, pelepasan lahan, hingga tahapan produksi.<sup>193</sup> Berdasarkan berbagai instrumen internasional maupun aturan hukum Indonesia, maka masyarakat adat mempunyai hak atas memberi atau tidak memberi lahannya untuk korporasi atau negara. Mekanisme *free, prior, informed consent* menjamin masyarakat untuk dapat memutuskan secara 'bebas' setelah mendapatkan informasi di awal terkait kegiatan perusahaan sehingga izin pengelolaan dikeluarkan setelah masyarakat

---

191. Regnskogforet, *Lembar Fakta: Deforestasi Papua*.

192. Wawancara dengan Frangky Samperante tanggal 3 Mei 2020. Yayasan Pusaka sendiri melakukan berbagai advokasi terkait masyarakat adat dan lingkungan di Papua.

193. Wawancara dengan Frangky Samperante tanggal 3 Mei 2020.



memberikan izin. Hal ini juga diatur dalam peraturan perundangan nasional seperti UUD 1945 Pasal 188 ayat 2, Pasal 281 Ayat 3, UU Perkebunan No39/2014 Pasal 12 Ayat 1 dan UU No. 32 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Akan tetapi dalam praktiknya, mekanisme ini tidak berjalan. Menurut Frangky:

*Kalau kita lihat di Papua, negara selalu mendahului dengan pemberian izin. Diikuti dengan kegiatan konsultasi dan sosialisasi oleh korporasi yang melibatkan negara, tidak hanya OPD, tapi juga aparat militer. Apalagi di daerah-daerah pedalaman Papua dan perbatasan. Militer ada disitu dan mereka juga punya kepentingan-kepentingan bisnis. Di sinilah sering terjadi benturan di awal proses pengambilalihan masyarakat. Setelah tahapan izin, masuk pada tahapan kedua, yakni pelepasan lahan. Ketika tahapan ini, mereka (korporasi) minta restu dari masyarakat setelah memiliki izin. Itu sesuatu yang keliru. Ketika korporasi minta restu melalui sosialisasi masyarakat tidak bisa apa-apa. Korporasi hanya bilang kami sudah miliki restu negara, kami hanya minta tanggapan dari masyarakat. Masyarakat di Papua dengan keterbatasan hak untuk berpekspresi, mereka tidak punya pilihan atau menolak. Cenderung mereka diam atau menerima dengan hal tertentu.*

Menurut Samparante, penerimaan masyarakat biasanya disebabkan oleh tiga hal, yakni stimulus yang dijanjikan perusahaan, intimidasi melalui aparat militer, maupun manipulasi oleh perusahaan. Stimulus ini dapat berupa janji-janji pembangunan,

pembuatan jalan, insentif pendidikan, dan lain-lain. Hal ini juga dibenarkan oleh Rasella Melinda yang juga melakukan advokasi dengan masyarakat adat di Bouven Digoel mengatakan:

*Yang kuat adalah resistansi mereka terhadap kapitalis agraria yang mencaplok tanah. Hanya memang kompleks. Kalau bicara soal ekspansi, karena ada di tengah-tengah. Kita melihat masyarakat yang terpapar ilusi modernisasi. Ada keinginan bahwa hal ini sesuatu yang baru untuk mereka. Ada investor yang janjikan ada datang kesejahteraan dan itu belum pernah mereka coba, jadi wajar jika mereka tergoda di awal. Tapi juga karena intervensi perusahaan yang masif dengan menggunakan kekerasan dan manipulasi.<sup>194</sup>*

Ambivalensi masyarakat terhadap pembangunan ini terkait erat dengan situasi paradoks Bouven Digoel. Kabupaten yang dimekarkan berada pada wilayah hutan, namun sekarang menjadi tempat dimana berabagai ekspansi perusahaan sawit, sehingga Bouven Digoel menjadi sasaran ekspansi sawit dan proyek pembangunan negara. Salah satu perusahaan besar yang menguasai adalah Menara Negara milik Malaysia. Akan tetapi, simbol-simbol penguasaan ekonomi seperti kepemilikan kios dikuasai oleh masyarakat Bugis dan Jawa yang hidup di ibukota. Janji perusahaan tentu saja memberikan harapan terhadap perubahan yang lebih baik bagi masyarakat.

194. Wawancara dengan Rasella Melinda, seorang tokoh yang melakukan advokasi dengan masyarakat adat di Bouven Digoel, Mei 2020.

Dalam banyak kasus, ketidakberdayaan masyarakat juga karena adanya intimidasi oleh aparat militer.<sup>195</sup> 'Budaya bisu' masyarakat tidak hanya dikondisikan oleh pembatasan kebebasan berekspresi, tapi juga ingatan kekerasan yang terus direproduksi. Jika menelusuri kembali pada sejarah kekerasan di Papua, wilayah kampung menjadi sasaran operasi militer dalam penumpasan gerakan OPM. Tragedi kekerasan berkaitan erat dengan ingatan manusia yang merespon dan menafsirkannya. Ketika berhadapan dengan mereka yang berseragam, masyarakat akan langsung diam. Ketakutan ini dimanfaatkan oleh perusahaan.

Ketakutan yang sama juga muncul dalam penguasaan lahan-lahan oleh oknum maupun institusi militer.<sup>196</sup> Beberapa tahun belakangan ini, *military land grabbing*, menjadi sebuah isu yang hangat diperbincangkan dikalangan aktivis maupun kelembagaan adat. Ada praktik-praktik penguasaan lahan oleh militer. Seorang aktivis pemuda adat di Biak mengatakan:

*Sekarang kalau orang tanya, fam (marga) apa yang paling besar di Biak, jawabannya adalah AURI.<sup>197</sup> Karena sekarang mereka punya semua lahan di Biak. Masyarakat datang mau klaim tanah adat, nanti dong kasih turun satu pasukan. Kita su tra bisa bikin apa-apa.<sup>198</sup>*

Penguasaan lahan oleh AURI memang sangat terlihat kasat mata di Biak. Tentunya, keterlibatan militer baik oknum maupun

195. Al-Araf, *Sekuritisasi Papua*, 118.

196. Al-Araf, *Sekuritisasi Papua*.

197. Selain merujuk pada TNI, AURI juga merupakan salah satu marga yang ada di Biak.

198. Diskusi tertutup di Biak, 2018

institutsi harus dikaji lebih mendalam. Akan tetapi, peran mereka selalu muncul dalam narasi-narasi ketertindasan masyarakat.

Selain stimulus dan intimidasi, masyarakat juga sering menjadi korban dari manipulasi perusahaan. Salah seorang peserta FGD mengatakan:<sup>199</sup>

*Ada orang perusahaan datang, terus bawa Bapa kepala suku ke Jakarta. Katanya untuk jalan-jalan saja. Tapi ternyata sampai di sana, mereka kasih surat pelepasan lahan untuk Bapa tanda tangan. Padahal Bapa dia tidak bisa baca, baru dong tipu, tidak jelaskan itu surat apa yang dong kasih.*

Kisah-kisah ini sudah sering terjadi dan sering didengarkan menjadi bentuk manipulasi yang berulang. Dan biasanya akan lebih buruk pada masyarakat adat yang ada di pelosok tanpa ada advokasi lembaga lain. Tahapan ketiga dari konflik masyarakat adat dan perusahaan adalah pada saat produksi. Ketika perusahaan tidak merealisasikan janji-janji pemberdayaan, perekrutan kerja, dan janji lainnya, maka masyarakat pun menunjukkan perlawanan. Budaya biasanya menjadi bentuk perlawanan masyarakat. Ekspresi mereka pun beragam mulai dari tarian, nyanyian, pemalangan/sasi, protes hingga mengajukan kasus ke pengadilan. Akan tetapi menurut Frangky, jarang sekali menemukan tuntutan yang bisa sampai ke pengadilan.<sup>200</sup> Beberapa faktor di antaranya karena adanya ketidakpercayaan yang tinggi pada negara. Selain itu masyarakat

199. Diskusi tertutup di Biak, 2018

200. Wawancara dengan Frangky Samperante tanggal 3 Mei 2020.

juga belajar dari pengalaman bagaimana negara menjadi tidak responsif dan tidak berpihak pada mereka. Pengalaman pemberian izin ataupun konsultasi membuat ada ketidakpercayaan. Hal lainnya, yakni keterbatasan akses dari kampung mereka ke kantor pemerintah ataupun pengadilan. Kalau pun ada kasus yang sampai ke pengadilan, biasanya karena ada tokoh mereka yang di kota, sehingga bisa membantu mengawal proses. Dalam keterisolasian mereka, infrastruktur hukum pun tidak tersedia. Hal ini menunjukkan akses keadilan masyarakat dibatasi.<sup>201</sup>

Menurut Frangky, hal ini menunjukkan bahwa penggerak pembangunan yang sebenarnya adalah korporasi sebagai pemilik modal. Peran negara hanya pada tahapan pemberian izin maupun penyedia sarana dan prasarana infrastruktur untuk mendukung produksi.<sup>202</sup> Fungsi negara yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat adat menjadi tidak jelas. Dalam ketertindasan masyarakat, mereka seperti berjuang sendiri. Itu sebabnya menurut Yusuf Sawaki:<sup>203</sup>

*Perjuangan masyarakat adat menjadi sangat sulit karena masyarakat tidak hanya dihadapkan dengan pembangunan infrastruktur semata, tapi pembangunan yang digerakan oleh ideologi. Jika masyarakat mau menang, maka tentu saja harus bangun sistem alternatif.*

201. Wawancara daring dengan Frangky, Yayasan Pusaka, Mei 2020.

202. Yayasan Pusaka memfokuskan advokasi pada isu hak masyarakat adat dan lingkungan di Papua.

203. Wawancara dengan Yusuf Sawaki, tokoh masyarakat Adat, April 2020.

Senada dengan itu, Leonard Imbiri mengatakan:

*Paradigma pembangunan sekarang adalah paradigma dolar yang berorientasi pada pasar yang menghancurkan kita. Itu paradigma kapitalis yang ujung-ujungnya melakukan penghisapan. Kalau pun ada sentra-sentra produksi, tujuannya untuk menjawab permintaan dari sistem kapitalis yang melakukan penghisapan.<sup>204</sup>*

#### 4.7 MEMAHAMI RESISTANSI DAN ASPIRASI MERDEKA

Dengan kejatuhan Soeharto, wajah resistansi Papua pun berubah. Banyak OAP mulai terlibat secara aktif, dalam, dan terkoordinasi. Kelompok-kelompok sosial dan politis pun mulai bermunculan dengan *platform* gerakan yang beragam. Dalam perkembangannya, resistansi Papua didorong untuk semakin memperkuat strateginya dengan memperluas domainnya. Isu-isu pembangunan kemudian menjadi *platform* berbagai gerakan sosial. Kampanye dan gerakan masif seperti 'Papua Bukan Tanah Kosong,' 'Selamatkan Tanah, Hutan, dan Manusia Papua,' 'Gerakan Cinta Tanah Adat,' dan lain sebagainya adalah beberapa bentuk resistansi Papua. *Framing* identitas Melanesia juga merupakan strategi efektif. Kampanye 'One People One Soul' dan 'Black Pride' juga menjadi penting dalam melihat konstruksi identitas Melanesia di Papua. Salah satu resistansi Papua yang mengglobal juga adalah gerakan 'Free West Papua.'

204. Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan Leonard Imbiri, tokoh adat, di Jayapura, 18 Januari 2020.

Untuk melihat bagaimana transformasi dan redefinisi dari berbagai gerakan, maka ada tiga domain gerakan resistansi Papua, yakni di dalam Papua, di Indonesia, dan internasional. Ketiganya saling terhubung dan memperkuat. Hal yang menarik, isu pembangunan seperti otonomi khusus, pembangunan infrastruktur, dan dampaknya pada kelompok rentan mulai menjadi isu sentral yang mendapatkan atensi internasional.<sup>205</sup>

#### 4.8 RESISTANSI DI DALAM PAPUA

Papua tentu saja menjadi basis utama resistansi. Ada dua jenis resistansi, yakni bersenjata dan sipil. Resistansi bersenjata digerakkan oleh OPM ini sudah ada di 1970an, namun berpindah dari kota menuju ke hutan karena intimidasi dan berbagai operasi militer pada masa Orde Baru. Tokoh-tokoh pendiri seperti Frits Kirihio dan Awom adalah elit intelektual yang dihasilkan melalui program Papuanisasi Belanda.<sup>206</sup> Pada era ini, pergerakan Papua masih berbasis kelompok dan belum berakar pada masyarakat sipil.<sup>207</sup> Pergerakan masih merupakan kesadaran kritis individu yang disalurkan ke kelompok sehingga belum berakar. Setelah terbunuhnya Arnold Ap pada 1986 dan diikuti dengan pengungsian

205. Berdasarkan hasil observasi tim peneliti dalam beberapa kegiatan konferensi maupun advokasi feminis yang dilakukan di luar negeri, isu pembangunan dan dampak sosial ekonomi Papua mendapatkan atensi besar. Baik jurnalis maupun akademisi di luar negeri merasa informasi terkait isu ini masih sangat minim. Selain karena tertutupnya akses jurnalis ke Papua, konstruksi persoalan Papua yang paling dominant adalah perjuangan mencapai kemerdekaan politis.

206. Para penggerak resistansi Papua seperti yang membentuk OPM maupun pada masa Papuan Spring hingga terbentuknya AMP dan KNPB serta organisasi pemuda lainnya adalah para intelektual muda. Hal ini menunjukkan peran Pendidikan dalam transformasi gerakan resistansi di Papua

207. Wawancara dengan Thaha Alhamid, 28 Februari 2017.

masyarakat Papua ke PNG telah mengubah wajah resistansi. Para intelektual muda Papua yang mendapatkan intimidasi dari rezim otoriter pun bergeser ke hutan dan melakukan perjuangan bersama OPM. Menurut Alhamid, nasionalisme Papua mengkristal menjadi gerakan gerilya di hutan yang dengan mudah dihentikan oleh operasi militer Orde Baru. Sedangkan gerakan di luar negeri masih menjadi diplomasi berbasis kelompok, sehingga belum dapat mendorong isu Papua secara signifikan.

Memasuki era reformasi, resistansi Papua menjadi lebih inklusif, melakukan pergerakannya di dalam kota dan mendorong pendekatan tanpa kekerasan.<sup>208</sup> Menurut Hardin Halidin, kepapuaan sangat eksklusif dan mengizinkan setiap orang, baik Papua maupun non-Papua, untuk ada di dalamnya. Ia mencontohkan bagaimana FMA dapat menjadi bagian dari pilar mahasiswa hasil Kongres Papua meskipun mereka bukan OAP.<sup>209</sup> Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Agus Sumule. Menurutnya ada beberapa faktor yang mendorong inklusifitas tersebut. *Pertama*, adanya momentum nasional reformasi dan kebijakan dari Gus Dur yang mengakomodasi. *Kedua*, munculnya para intelektual Papua dengan berbagai gagasan kepapuaan dan cita-cita terhadap perubahan. Dan ketiga adalah kerekatan tokoh-tokoh Papua pada masa itu karena persamaan latar belakang pendidikan maupun asrama.<sup>210</sup> Menurut Sumule, La

208. Kivimaki, *Initiating A Peace Process in Papua*.

209. Wawancara dengan La Hardin, Yayasan Ilalang, Mei 2020.

210. Dalam tulisan Bernarda Meteray juga dijelaskan bagaimana sekolah asrama yang dibangun oleh IS.Kijne pada masa kolonialisme Belanda telah menjadi wadah yang menumbuhkan benih-benih kepapuaan. Wacana sekolah asrama ini kemudian dimunculkan sekarang karena dianggap mampu memperkuat kesadaran tentang kepapuaan. Lihat Meteray, *Nasionalisme Ganda Orang Papua*.



Hardin, dan Fadhal Alhamid, pada masa ini ideologi kemanusiaan menggerakkan berbagai gerakan. Ada tuntutan masif dari berbagai gerakan untuk meminta pertanggungjawaban negara terhadap berbagai pelanggaran HAM masa lalu, baik karena operasi militer maupun pembangunan. Narasi 'penelurusan sejarah' juga menjadi sangat dominan pada masa ini. Hal ini menjadi sangat penting karna sejarah seharusnya menjadi media pembebasan, tetapi konstruksi Orde Baru meminggirkan OAP sebagai penulis sejarahnya. Meski demikian, menurut Sumule pada saat itu, sudah ada tiga opsi yang dibahas secara internal dalam melihat Papua, yakni melalui otonomi khusus, merdeka, dan *one nation two system*.

Dalam konstruksi politisnya, terlihat ketokohan Theys Eluay yang menarasikan merdeka sebagai *platform* perjuangan. Fadhal Alhamid mencontohkan inklusifitas Theys:

*Kita (Papua, non-Papua) semua Papua. Kenapa harus takut Papua minta merdeka. Setelah merdeka, yang mau tinggal silahkan, yang mau tinggal silahkan. Tapi kalau mau pulang silahkan, nanti kami antar ke pelabuhan.*<sup>211</sup>

Nasionalisme Papua yang inklusif ini menjadi sangat mengancam bagi negara. Hal ini diikuti dengan pembunuhan Theys dan dibungkamnya PDP. Setelah era *Papuan Spring* dan munculnya otonomi khusus, berbagai intelektual muda Papua kembali mengkonsolidasikan dirinya. Pembentukan KNPB, Gempa, Gempar, Garda Papua, Front Papua, dan lainnya menjadi

---

211. Wawancara Fadhal Alhamid, Aktivist Gerakan Mahasiswa Era Orde Baru dan Ketua II DAP, April 2020

contoh menjamurnya organisasi sipil. Dalam platform organisasi pun terdapat perbedaan. Hal yang menarik adalah munculnya organisasi sipil bertemakan ekonomi, sosial, dan budaya, dimana mereka memfokuskan pada advokasi masyarakat adat.

Pasca reformasi hingga 2020, konsolidasi gerakan sosial juga terlihat pada beberapa kampanye non-kekerasan yang efektif, seperti: 'Papua Tanah Damai,' 'Kembalikan Otsus Papua,' 'Pekerja Tambang vs. Freeport' pada 2007 dan 2011, kampanye mendukung MSG, kampanye 'Papua Bukan Tanah Kosong,' kampanye 'Selamatkan Tanah, Hutan, dan Manusia Papua,' gerakan anti-kekerasan terhadap perempuan (termasuk kekerasan negara), dan gerakan anti-rasisme 'Papua Bukan Monyet' tahun 2019.

## BAB 5

# DIALOG SEBAGAI STRATEGI MENANGANI ISU PEMBANGUNAN, MARGINALISASI, DAN DISINTEGRASI

### 5.1 PENGANTAR

PADA pemaparan dalam Bab 2 sebelumnya prioritas pembahasan diberikan pada pembangunan Papua dengan penekanan pada perkembangan implementasi Otonomi Khusus yang cenderung tidak mencapai tujuannya sebagai instrumen resolusi konflik. Hal tersebut disebabkan karena adanya ketimpangan antara tata kelola pemerintahan modern dan sistem politik di Papua yang berbasis kebudayaan. Imajinasi tentang negara OAP masih berhimpitan dengan imajinasi etnis dan sistem pria berwibawa (*big man*) sehingga perlu ditransformasikan secara bertahap. Kemudian Bab 3 memfokuskan pada proses marginalisasi dan semakin terbatasnya ruang partisipasi OAP untuk menikmati sumber-sumber ekonomi dan sosial budaya. Formasi pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi yang kapitalistik cenderung menguntungkan komunitas

pendatang sehingga membuat OAP semakin termarginalkan dan terdepulasi secara gradual. Pada Bab 4, prioritas pembahasan difokuskan pada keluhan, rasa frustrasi sosio-ekonomi OAP, dan proses marginalisasi.

Oleh karena itu, prioritas dalam pembahasan Bab 5 ini akan bergerak dari fenomena marginalisasi yang berpotensi memperkuat rasionalisasi melepaskan diri dari Indonesia. Dalam bab ini, tim peneliti mengajukan gagasan dialog sektoral sebagai strategi untuk mencegah berlangsungnya marginalisasi OAP dan memperkecil potensi disintegrasi. Maka, pembahasan dalam bab ini akan berfokus pada empat sub-bahasan dimana pada bagian pertama akan dibahas mengenai pendekatan *top-down* dalam penanganan isu Papua. Pada bagian kedua membahas marginalisasi OAP di tanah mereka. Kemudian bagian ketiga membahas dialog sektoral antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tokoh OAP yang berjalan tanpa nyawa. Selanjutnya, pada bagian keempat akan dibahas pembangunan berbasis kebudayaan sebagai alternatif pembangunan di Tanah Papua.

## **5.2 PENDEKATAN TOP-DOWN DALAM PENANGANAN ISU PAPUA**

Dalam banyak pernyataan, pemerintah selalu menyampaikan bahwa saat ini kebijakan yang diambil dalam menangani isu-isu yang berkembang di Tanah Papua sudah tidak lagi mengedepankan pendekatan keamanan, tetapi sudah mengaplikasikan pendekatan kesejahteraan.<sup>212</sup> Namun jika dicermati kenyataan yang terjadi di

---

212. Lihat "Jurnalis Papua Alami Sejumlah Luka Akibat Dihajar Polisi," *Tabloid Wani*, 5 Januari

Papua, masih banyak bukti nyata bahwa pendekatan yang bersifat *top-down* dengan pendekatan keamanan masih dilaksanakan. Di tahun yang sama, Sengketa Wuluwaga menjadi cerminan tingginya militerisasi di Tanah Papua. Pergerakan menghalau massa yang melakukan demonstrasi dan menyampaikan aspirasi melalui beberapa aksi damai yang melibatkan pemuda, mahasiswa, dan masyarakat, dihadapi dengan pengerahan aparat keamanan dan tentara.

Dalam tatanan sosial ekonomi, pendekatan *top-down* telah membawa penghancuran terhadap hutan Papua. Melalui investasi dan proyek-proyek perkebunan, hutan rumah OAP telah dirusak dan diubah menjadi lahan industri.<sup>213</sup> Kemudian praktik pendekatan keamanan di Tanah Papua juga sudah membawa OAP mengalami apa yang disebut sebagai kekerasan struktural<sup>214</sup> yang menyudutkan mereka. Amnesty Internasional telah mencatat 69 kasus dugaan pembunuhan di Papua sepanjang 2010 hingga 2018. Hal yang menyedihkan adalah aparat negara justru menjadi pelaku utama dalam tindak kekerasan, yakni 34 kasus oleh aparat kepolisian dan 23 kasus oleh TNI.<sup>215</sup>

Di sisi lain kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait Papua masih bernuansa *top-down*, sehingga kebijakan yang dibuat pada akhirnya sangat jauh dari kebutuhan OAP dan tidak

---

2017. <https://www.tabloid-wani.com/2017/05/jurnal-papua-alami-sejumlah-luka-akibat-dihajar-polisi.html>

213. Bernard Koten, Daniel Gobay, OFM, dan Tim Kerja SKPKC, "Papua Bukan Tanah Kosong: Beragam Peristiwa dan Fakta HAM di Tanah Papua 2018," *Seri Memoria Passionis* No. 37 (2019), 1, 65, dan 79.

214. Tentang kekerasan struktural, lihat Johan Galtung, "Contemporary Conflict Resoluton," dalam *Contemporary Conflict Resoluton*, Hugh Miall dan Oliver Ramsbotham eds. (Cambridge: Tow Woodhouse Polity Press, 1999).

215. Selma Theofany, "Cukup Sudah Hentikan Kekerasan di Papua," *Kompas.com*, 22 Agustus 2019. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/22/160655965/cukup-sudah-hentikan-kekerasan-di-papua>

mencerminkan nilai OAP. Hasil pengamatan dan wawancara yang sudah dilakukan terkait penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beragam kebijakan *top-down* pemerintah yang merugikan OAP. Salah satunya seperti kebijakan transmigrasi yang awalnya dicita-citakan agar para transmigran menularkan keterampilan hidup mereka kepada OAP agar sama-sama sejahtera, justru dalam banyak kasus di Papua memperlihatkan realitas yang berbeda. Wilayah transmigran maju dan berkembang, sementara OAP semakin tersingkir dan hidup jauh dari sejahtera. Potret paling dekat di pusat provinsi Papua dapat kita lihat di kabupaten Keerom, dimana posisi para transmigran yang adalah non-Papua dan dimana posisi OAP. Secara kasat mata, kita dapat melihat bagaimana OAP semakin tersingkir.<sup>216</sup>

Kebijakan Raskin, bantuan beras miskin, merupakan kebijakan yang dibuat di pusat dengan melihat Jawa sebagai sentral, dimana selain makanan pokok masyarakatnya adalah nasi, mereka juga memiliki sawah dan bercocok tanam padi. Kebijakan ini diberlakukan sama diseluruh Indonesia, termasuk di Papua dimana penduduknya memiliki makanan pokok sagu dan ubi. Selain itu, OAP juga tidak memiliki keterampilan membuat sawah, menanam padi, ditambah secara geografis wilayahnya terdiri dari pegunungan dan pesisir pantai dengan sebagian kecil daerah rawa. Kebijakan memberi makanan gratis ini juga menjadikan OAP kehilangan nilai kemandirian dan membawa petaka kematian. Jika mengikuti berita-berita Papua, maka sampai dengan saat ini, kasus kelaparan dan gizi buruk masih terus terjadi di Papua dan memakan korban jiwa. Kebijakan bantuan beras miskin ini secara tidak langsung juga

216. Wawancara dengan cendekiawan Universitas Cendrawasih, Januari 2020.

meminggirkan/menghancurkan budaya dan identitas OAP karena memaksakan OAP beralih dari makanan pokoknya, yaitu sagu dan umbi-umbian, menjadi nasi. Hal ini menjadi bukti nyata kebijakan *top-down* pemerintah harus mulai diubah. Akan sangat bijak dan jauh lebih baik jika pemerintah mau mengganti kebijakan raskin menjadi berbasis pangan lokal daripada tetap mempertahankan atau mencabut raskin.<sup>217</sup>

Kebijakan pembangunan infrastruktur tidak dilakukan dengan kajian yang mendukung untuk mempersiapkan OAP agar menjadi aktor utama yang menikmati dampak pembangunan itu. Dalam banyak kesempatan sebenarnya sudah disampaikan oleh lembaga Gereja maupun organisasi kemanusiaan yang peduli pada situasi di Papua. Hal utama yang dibutuhkan saat ini adalah pembangunan manusia Papua, seperti meningkatkan kapasitas untuk menjadi pelaku usaha, pejabat publik yang mumpuni, dan lain sebagainya. Ketika pembangunan infrastruktur dilakukan di saat OAP masih gagap teknologi dengan pemahaman sistem pasar yang sangat sederhana (sekadar menjual hasil kebun agar tidak busuk dan lainnya), maka peluang ekonomi, bisnis, dan politik akan direbut oleh masyarakat non-Papua seiring dengan dibangunnya jalan raya. Dari sisi budaya, pembangunan infrastruktur juga kurang memperhatikan tempat-tempat sakral masyarakat adat Papua.

Kebijakan pendidikan di Indonesia yang juga menarik untuk dilihat saat ini adalah kebijakan dalam situasi COVID-19, dimana semua sekolah diliburkan dan proses belajar mengajar dilakukan di rumah masing-masing dengan cara daring (*online*). Diterapkan

217. Bandingkan dengan Nur Saidah, "Dampak Kebijakan Raskin Terhadap Pola Konsumsi Pangan Pokok Lokal di Papua," Tesis Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, 2014, 36. <http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/69046/1/2014nsa.pdf>

dalam skala nasional, tidak terkecuali Papua, tempat dimana sebagian wilayahnya tidak memiliki jaringan telepon, apalagi internet. Seorang guru pada sekolah menengah atas di Keppi, Ibukota kabupaten Mappi, provinsi Papua menuturkan bahwa tahun lalu sekolah mereka mendapatkan bantuan akses internet, sehingga Ujian Sekolah maupun Ujian Nasional yang dibuat secara daring dapat dilaksanakan di sekolah mereka. Akses internet hanya tersedia di sekolah itu saja, sedangkan di luar sekolah atau kompleks pemerintahan penggunaan *handphone* hanya mendapat sinyal E dan paling tinggi 2G (hanya dapat digunakan untuk menelepon dan SMS). Di tengah keterbatasan akses internet dan kebijakan belajar dari rumah tersebut, pelaksanaan belajar daring menjadi sulit untuk dilakukan. Kebijakan belajar daring dan bekerja dari rumah (*work from home*) penting untuk dilakukan demi pencegahan penularan COVID-19, namun risiko ketertinggalan pelajaran bagi sebagian siswa di wilayah dengan akses internet yang terbatas menjadi tidak terhindarkan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh seorang tokoh Papua dalam wawancara daring:<sup>218</sup>

*Saya mendengar berbagai macam kesulitan orang-orang untuk sekolah sekolah dan guru-guru untuk belajar melalui jarak jauh itu, pertama kita memberikan berbagai macam opsi di online learning, terus banyak yang punya koneksi internet atau tidak mampu kuota.... Lalu ada yang bilang tidak ada sinyal TV bahkan ada yang bilang tidak punya listrik. Itu bikin saya kaget luar biasa, saya pun belajar*

218. Wawancara daring dengan seorang guru di Papua, April 2020.



*sebagai menteri bahwa Indonesia ini masih banyak area-area yang sebenarnya tidak terbayang bagi kita di Jakarta, benar-benar tidak terbayang ada yang masih tidak punya akses listrik, bayangkan listriknya cuma nyala beberapa jam sehari,"<sup>219</sup> Ini adalah statement Menteri Pendidikan Republik Indonesia Bapak Nadiem Makarim dalam kesempatan telekonferensi yang disiarkan di YouTube Kemendikbud RI pada hari Sabtu 2 Mei 2020 dalam rangka hari Pendidikan Nasional.*

Pernyataan narasumber tersebut menegaskan bahwa pembangunan yang tidak merata dan terlalu terpusat di Pulau Jawa telah melupakan wilayah lain yang juga merupakan bagian dari Indonesia. Kebijakan tersebut dibuat dengan pengandaian semua wilayah di Indonesia memiliki kondisi yang sama seperti di Jakarta.

Berdasarkan ungkapan beberapa narasumber dalam sebuah diskusi mengenai pengalaman pelayanan di kampungnya, mereka melihat bagaimana pembangunan yang ada selama ini lebih banyak memberikan dampak negatif bagi OAP. Pembangunan yang menyertakan kehadiran komunitas non-Papua/pendatang menjadi masalah besar bagi OAP. Hal ini dikarenakan komunitas pendatang sudah mempunyai modal pengetahuan dan daya saing dari tempat mereka berasal. Mereka datang dan menguasai ekonomi di

219. Rahel Narda, "Kemendikbud Terus Lakukan Evaluasi Pendidikan Jarak Jauh," *Detik.com*, 2 Mei 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5000123/kemendikbud-terus-lakukan-evaluasi-pendidikan-jarak-jauh>

wilayah yang baru dimasuki pembangunan.<sup>220</sup> Sementara OAP tidak bisa bersaing untuk merebut peluang ekonomi yang ada, sehingga akhirnya mereka tersingkirkan dari tanahnya sendiri.

### 5.3 MASIFNYA MARGINALISASI TERHADAP OAP

OAP secara terus menerus mengalami marginalisasi atau peminggiran dari pusat-pusat peran, identitas, dan nilai yang selama ini mereka miliki. Marginalisasi yang dialami lebih bermakna sosial dan politik. OAP yang sebelumnya menjadi “tuan rumah” yang memiliki otoritas atas sistem nilai, institusi-institusi sosial dan politik, dan peran-peran sosial ekonomi di masyarakat, saat ini sudah kehilangan otoritas tersebut. Kehilangan ini disebabkan oleh hadirnya masyarakat lain dengan pengetahuan yang lebih tinggi dan kekuatan yang jauh lebih besar.<sup>221</sup>

*Aku adalah Papua....*

*Tanah kami tanah kaya, laut kami, laut kaya,*

*Kami tidur di atas emas, berenang di atas minyak,*

*Tapi bukan kami punya, semua anugerah itu,*

*Kami hanya berdagang, buah-buah pinang....*

*- “Suara Kemiskinan,” Frangky Sahilatua*

220. Diskusi tertutup tim peneliti dengan beberapa staf SKPKJ, di sekretariat SKPK Jayapura Januari 2020.

221. Mangadar Situmorang, “Mewujudkan Dialog untuk Pnyelesaian Konflik Papua: Persoalan Sosial Ekonomi,” dalam *Oase Gagasan Papua Damai* (Jakarta: Imparsial Press, 2017), 199.

Sepenggal lirik lagu berjudul "Suara Kemiskinan" yang diciptakan dan dinyanyikan oleh musisi Indonesia, Frangky Sahilatua, barangkali dapat dilihat sebagai ungkapan hati atas realitas ketidakseimbangan antara kekayaan alam Papua dan judul pembangunan untuk kesejahteraan OAP. Marginalisasi atau peminggiran terhadap OAP sudah terjadi sejak proses integrasi Papua ke dalam Indonesia. Proses Pepera yang hanya melibatkan beberapa OAP dianggap sebagai bagian dari meminggirkan OAP untuk terlibat secara bebas dan sadar dalam menentukan masa depannya.<sup>222</sup>

Marginalisasi yang dialami oleh OAP berlangsung dengan sangat cepat dan masif karena kebijakan *top-down* selama ini tidak mempertimbangkan kemampuan OAP melakukan penyesuaian kekuatan modal, pengetahuan, kekuasaan, dan institusi yang datang. Lebih menyakitkan lagi yang terjadi adalah perlawanan yang kini dilakukan justru semakin menggiring mereka ke sudut-sudut, peran-peran, dan otoritas-otoritas sosial baru. Bahkan banyak yang bermuara pada penyingkiran, seperti yang nampak dalam penggambaran dari hasil observasi dan wawancara tim peneliti di bawah ini.

Pada 2011 SKPKC Fransiskan Papua mendampingi masyarakat di Kampung Suskun, Distrik Arso Timur. Distrik Suskun adalah wilayah layanan Gereja Katolik Dekanat Keerom, wilayah Keuskupan Jayapura. Bersama dua distrik lainnya, yaitu Distrik Kriku dan Yeti, Distrik Arso mendapatkan tawaran untuk melepaskan tanah mereka seluas 26.000 hektar kepada perusahaan

222. Wawancara dengan Sekretaris Umum DAP Abepura, Januari 2020.

kelapa sawit. Pada 2008, Kampung Suskun mendapatkan tawaran investasi dengan iming-iming masyarakatnya akan mendapatkan akses jalan raya, listrik, dan telepon. Demi pembangunan tersebut, masyarakat adat akhirnya melepaskan tanah seluas 18.000 hektar yang merupakan lahan, dusun, tempat sakral, dan tempat mereka bergantung hidup.

Masyarakat selalu mengambil bahan mentah untuk makan dari hutan, mulai dari sagu, sayur genemo (melinjo), dan hasil buruan berupa babi, rusa, dan hewan buruan lainnya. Sementara hasil kebun, seperti pinang, dijual ke kota dengan pendapatan yang tidak terlalu besar. Namun setelah hadirnya perusahaan, mereka tidak lagi mendapat bahan makan dari hutan karena sudah menjadi milik perusahaan. Uang yang mereka hasilkan dari bekerja sebagai buruh di perusahaan biasanya mereka gunakan untuk belanja bahan makan berupa beras, lauk-pauk, sayur-sayuran, serta untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Bisa ditebak? Pedagang, tukang ojek, dan tukang sayur yang berjualan di sana adalah non-Papua.<sup>223</sup>

Masyarakat Kampung Suskun mempunyai ciri-ciri budaya peramu. Mereka masih mencari untuk habis dipakai makan hari dan kemudian besok mencari lagi. Meskipun sudah mulai bercocok tanam, jenis tanaman yang mereka tanam membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk berbuah, seperti pinang dan kakao. Masyarakat Kampung Suskun tidak menanam tanaman jangka pendek, seperti sayuran, bawang, kedelai, dan jangung dalam

223. Diskusi tertutup tim peneliti dengan beberapa staf SKPKJ, di sekretariat SKPK Jayapura Januari 2020.

jumlah banyak yang bisa menjadi bahan komoditas. Terdapat hasil kebun atau buruan milik mereka yang sebenarnya bisa dijual ke pasar untuk sumber penghasilan, tetapi mereka tetap kesulitan karena tidak tersedianya sarana transportasi angkutan umum di Kampung Suskun. Jalan raya tersedia, tetapi tidak ada mobil atau kendaraan lain untuk membawa hasil kebun dan buruan mereka ke pasar. Meski terdapat pilihan ojek, masyarakat jarang menggunakannya karena biaya yang sangat mahal, yaitu Rp100.000,00 – Rp200.000,00 untuk sampai di Arso Kota, tempat dimana tersedia pasar untuk menjual hasil kebun atau buruan mereka dengan keuntungan yang sangat kecil. Pengeluaran lebih besar dari pemasukan dan mereka pun semakin “hilang.”<sup>224</sup>

Pembangunan ekonomi di Papua saat ini bukanlah tidak ada, bahkan sudah diprioritaskan dan dilakukan. Hal yang belum mendapat perhatian secara serius adalah belum adanya optimalisasi manfaat dari pembangunan ekonomi yang dirasakan rakyat. Negara dalam kaitannya dengan pembangunan di Papua sudah hadir melalui rancangan pembangunan di bidang pelayanan publik, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Hal lain yang menambah timbulnya rasa ketidakpuasan OAP dan belum sungguh-sungguh mendapatkan perhatian adalah masih tingginya jurang perbedaan antara OAP dengan pendatang yang masih mendominasi dinamika perubahan di Tanah Papua. Masih belum ada jembatan yang menghubungkan

224. Diskusi tertutup tim peneliti dengan beberapa staf SKPKJ, di sekretariat SKPK Jayapura Januari 2020; dan lihat juga Unung Turua, Setia Hadi, Bambang Juanda, dan Endah Murniningtyas, “Ekologi dan Budaya Petani Asli Papua dalam Usaha TNI di Kabupaten Kerom,” *Sosiohumaniora*, Volume 16 No. 3 (November 2014): 234- 241.

partisipasi masyarakat asli dalam seluruh kegiatan pembangunan. Pada akhirnya hal ini hanya menyertakan OAP pada lintasan pinggiran, sehingga interaksi antar mereka yang terbangun adalah hubungan sosial budaya yang asing secara mutual, stereotipikal, dan penuh stigma kesalahpahaman yang sering kali fatal.

Pembangunan ekonomi yang mengambil bentuk eksploitasi sumber daya alam demi penciptaan pasar memiliki persoalan. Hal ini dikarenakan kebijakan yang ada tidak dimaksudkan untuk mengintegrasikan OAP agar mendapatkan bagian yang adil dengan masyarakat pendatang dan negara. Kurang mendapatkan pemikiran bahwa daya saing masyarakat asli dibanding dengan masyarakat lainnya masih jauh mengalami ketimpangan. Akibatnya, sebagian pembangunan di Papua hanya memberikan keuntungan bagi masyarakat pendatang dan jurang kesenjangan pun tidak bisa dibendung lagi dan semakin meluas.<sup>225</sup>

Selain ketidakadilan seperti yang sudah digambarkan di atas, OAP juga mengalami apa yang disebut dengan keterbelakangan. Menjadi ironis karena Papua sebenarnya merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, akan tetapi masyarakatnya hidup dalam kemiskinan. OAP mengalami apa yang disebut oleh Edward Weisband sebagai "kemiskinan dalam kemelimpahan."<sup>226</sup> Sebuah laporan menunjukkan betapa lemahnya posisi OAP dibandingkan dengan pendatang atau yang berafiliasi dengan kekuasaan, seperti:

225. Bandingkan dengan Chris Hugh Ballard, "The Denial of Traditional Land Right in West Papua," *Cultural Survival Quarterly*, Fall (2002), 41.

226. Perhatikan Edward Weisband ed., *Poverty Amid Plenty: World Political Economy and Distributive of Justice* (Colorado and London: Westview Press Boulder, 1989).

*Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun demikian wilayahnya tidak bertumbuh dan aktivirtas ekonomi yang dihasilkan belum memberikan kontribusi besar pada pembangunan ekonomi yang menguntungkan OAP. Terlepas dari semua perbaikan pelayanan sosial sejak tahun 1960, sebagian besar OAP masih terlibat dalam aktivitas-aktivitas pencarian nafkah primitif, seperti berburu, memancing dan bertani. Perekonomian di wilayah Papua hampir seluruhnya dimiliki pendatang yang bukan OAP. Dalam Indeks Kesejahteraan Manusia (HDI) Papua tercantum sebagai provinsi kedua termiskin setelah NTB.<sup>227</sup>*

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan pada Desember 2019, seorang tokoh OAP mengungkapkan bahwa:

*Jurang kemiskinan dan perbedaan tingkat kesejahteraan antara Orang Papua dan Non-Papua semakin memperuncing tingkat kecemburuan sosial yang sangat dekat tahapannya menuju ke konflik horizontal. Sisi yang lainnya adalah membuat Orang Papua semakin kehilangan kepercayaannya kepada pemerintah Indonesia dan merasa dengan hidup sendiri, berdiri sendiri sebagai sebuah bangsa yang merdeka adalah pilihan satu-satunya agar Orang Papua tidak punah di atas tanahnya sendiri.*

227. Dennis C. Blair dan David L. Philip, *Komisi Untuk Indonesia: Perdamaian dan Perkembangannya di Papua* (New York: The Council for Foreign Relations Inc., 2003), 12.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa secara ekonomi memang ada pertumbuhan di Papua, akan tetapi kenikmatan pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh segelintir OAP. Sementara itu, kelompok pendatang atau pihak-pihak yang berafiliasi dengan kekuasaan selalu mendominasi dan menguasai kue ekonomi yang ada. Dengan demikian, bagi OAP sendiri yang terjadi adalah hal yang lebih buruk dari ketiadaan pembangunan ekonomi, yaitu proses pemiskinan. Parahnya kondisi ekonomi ini akhirnya membawa persoalan dalam hubungan OAP, baik dengan pendatang maupun dengan pemerintah pusat. Kondisi inilah yang memicu dan menjadi dasar argumentasi bagi OAP untuk memberontak dan memilih untuk disintegrasi.<sup>228</sup> Sangat jelas betapa kondisi yang dialami OAP membawanya dalam suatu kondisi yang sarat dengan ketidakberdayaan dan penuh keluhan. Semakin meningkatnya keluhan (kekurangan), maka akan semakin meningkat juga rasa frustrasi yang mereka rasakan.

Tragisnya lagi perasaan *relative deprivation* ini nyata-nyata sudah terkombinasi dengan garis kesukuan, misalnya: BBM serta Jawa yang secara tegas memiliki perbedaan dengan OAP. Maka sangat argumentatif untuk menyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang dirasa sangat jauh dari keadilan, telah melahirkan kekuatan bagi mereka untuk memilih jalan disintegrasi. Keluhan OAP sudah melewati ambang toleransi yang akhirnya tidak mampu membendung mereka untuk menahan rasa frustrasi dan memilih cara pemberontakan.<sup>229</sup> OAP sebagai kelompok yang mengalami

---

228. Lihat Milton Esman, *Ethnic Politics* (New York: Cornell University Press, 1994).

229. Wawancara dengan cendekiawan Universitas Cendrawasih Jayapura, Januari 2020; Gurr, *Why Men Rebel.*; dan James C. Davies, "Toward a Theory of Revolution," dalam *Anger*



kekurangan akan menyalahkan lawannya dan menuduhnya sebagai pihak yang mengambil segalanya. Kemudian bagi pihak lain, mereka akan mengatakan bahwa tuntutan dari kelompok yang mengalami kekurangan adalah tidak rasional dan berargumentasi bahwa apa yang mereka dapat adalah hasil dari kerja keras. Dengan demikian pembangunan ekonomi tidak menjadi jaminan perdamaian di Tanah Papua, dimana masyarakatnya belum memiliki keselarasan hubungan antaretnis. Sebaliknya, justru hal tersebut akan menjadi sumber pertikaian.

Dengan contoh kasus tersebut, bagaimana kita bisa melihat pembangunan dan kebijakan pemerintah sudah mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat? Bagaimana menumbuhkan keinginan pemerintah untuk melindungi masyarakat adat yang sudah hidup miskin dan mudah saja “ditipu” oleh para pemodal dengan dukungan pemerintah? Pendampingan perlu dilakukan untuk meningkatkan keterampilan hidup juga kesadaran di tingkat masyarakat adat agar mereka tidak mudah ditipu. Tidak salah mereka mendambakan jalan raya, listrik, dan sinyal telepon, tetapi kenapa mereka harus membayar dengan harga yang sangat mahal? Mereka kehilangan dusun, tempat sakral, dan tempat hidup, sehingga tidak lagi mandiri karena bergantung kepada perusahaan.

#### 5.4 DIALOG SEKTORAL ANTAR PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, DAN TOKOH MASYARAKAT PAPUA

Berdasarkan informasi yang dihimpun penting untuk tetap mempertahankan dan menghidupkan format 'dialog' sebagai mekanisme menuju Papua damai. Hal ini dikarenakan, sebagai sebuah gagasan, dialog sendiri sebenarnya sudah hadir dan ada dalam tradisi atau adat istiadat OAP. Segala persoalan yang dihadapi selalu dibicarakan dalam rumah adat (para-para adat). Setiap suku di Tanah Papua memiliki sebutan tradisi dan cara untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.

Sebagai strategi dalam menangani isu pembangunan, marginalisasi, dan disintegrasi di Tanah Papua, dialog harus diposisikan sebagai sebuah konsep yang dinamis dan bisa mengakomodasi tingkat kebutuhan pada saat diterapkan.<sup>230</sup> Dialog akan menjadi media atau cara untuk menghadirkan para pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan OAP) secara inklusif agar dapat saling memahami dan membahas isu pembangunan, marginalisasi, dan disintegrasi secara komprehensif dalam konteks mewujudkan perdamaian di Papua.

Sebagai sebuah konsep 'dialog' dalam kaitannya dengan penanganan persoalan Papua, sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing meskipun muncul dengan pemilihan istilah yang beragam. "Komunikasi konstruktif" pernah menjadi wacana pada era pemerintahan SBY. Kemudian dari Forum Akademisi Papua Damai

230. Wilfried Graf dan Gudrum Kramer, "Conflict Transformation Through Dialogue: From Lederach's Rediscovery of Freire Method to Galtung's Tranced Approach," *Journal Fur Entwicklungs Politik*, XXII 3 (2006), 55-83.

dan Imparsial, istilah yang diwacanakan adalah “*consensus building*” (membangun konsensus). Jika dikaitkan dengan persoalan Papua, intinya adalah bagaimana menghasilkan sebuah kesepakatan tentang persoalan di Tanah Papua yang disetujui dan diterima secara bersama-sama oleh semua pihak.<sup>231</sup> Pada era pemerintahan sekarang ini, meskipun belum ada istilah atau konsep yang akan dijadikan mekanisme dalam merespon persoalan Papua, akan tetapi tersirat dalam Nawacita bahwa persoalan yang kini dialami oleh saudara kita di Papua harus mendapatkan penyelesaian. Sebab hanya dengan menyelesaikan persoalan Papua-lah pemerintah akan bisa membuktikan prioritas sembilan agenda yang ada dalam Nawacita.<sup>232</sup>

Untuk meretas jalan perdamaian positif, terutama untuk mengakomodasi isu pembangunan, marginalisasi, dan disintegrasi di Tanah Papua, maka cara-cara yang ditempuh sudah selayaknya melalui cara yang bermartabat. Dari beragam mekanisme yang ada, maka dialog adalah yang paling selaras dengan roh bangsa Indonesia. Dialog juga mencerminkan mekanisme yang paling sesuai dengan jiwa bangsa karena selalu mengedepankan unsur perdamaian dan tidak pernah mematikan kesempatan untuk mengulanginya apabila diperlukan. Pada saatnya nanti, pihak yang terlibat konflik akan sampai pada suatu pemahaman dimana perdamaian akan menjadi

231. “Merumuskan Kebijakan Konstruktif dalam Upaya Penyelesaian Konflik Papua Menuju Papua Damai,” *dirujuk dari hasil Workshop Forum Akademisi Papua Damai*, Jakarta, Indonesia, 1- 2 September 2016.

232. Bahasan yang lengkap mengenai Nawacita ini lihat: *Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat Mandiri dan Berkepribadian: Visi Misi dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kala 2014*, (Jakarta: Seknas Jokowi, 2014).

hasil yang diterima oleh semua pihak.<sup>233</sup> Di sisi lain dialog menjadi tepat dijadikan pilihan kerana mengedepankan ketulusan dan tanpa paksaan. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan adalah benar-benar di tangan pihak-pihak yang terlibat. Kemudian dialog juga menempatkan pihak-pihak yang terlibat dalam tataran yang setara dan sederajat.<sup>234</sup> Perlu digarisbawahi di sini bahwa kesetaraan dan kesederajatan yang dimaksud adalah dalam tatanan keterbukaan, menyampaikan apa yang menjadi kepentingan, dan tidak ada hubungannya dengan posisi.<sup>235</sup> Melalui dialog, maka OAP akan memiliki harkat dan martabat yang selama ini mereka rasakan tercabut.

Melalui dialog, akan terbuka dua jalur hubungan antar pemerintah pusat, daerah, dan OAP, yaitu percakapan dan jalan untuk berhubungan. Hakikatnya, ini merupakan proses komunikasi dimana partisipan bisa mengatakan dan mendengar apa yang belum pernah mereka ucapkan dan dengar sebelumnya. Di dalam proses ini mereka yang terlibat juga bisa menarik bahkan mengubah perkataannya. Melalui dialog pemerintah pusat, daerah, dan OAP akan bisa saling mendengarkan, mempelajari, dan meningkatkan rasa saling memahami.<sup>236</sup> Mereka bisa menuju kepada bagaimana belajar dan menginformasikan, bukan mempersuasi. Memulai percakapan yang dihidupkan oleh pencarian akan pemahaman,

233. Tim Kajian Papua LIPI, *Press Release Dialog Nasional: Alternatif Penyelesaian Masalah Papua* (Jakarta: LIPI, 2016).

234. J. Bercovitch, "Mediation and Negotiation Technique," dalam *Encyclopedia of Violent Peace and Conflict* (Vol. 2), (San Diego: Academic Press, 1999), 403-412.

235. Bandingkan dengan Roger Fisher dan William Ury, *Getting to Yes: Negotiating an Agreement without Giving In* (London: Random House Business Books, 1991).

236. Lihat Ximena Zuniga, Gretche E. Lopez, dan Kristie A. Ford, *Intergroup Dialogue: Engaging Difference, Social Identity, and Social Justice* (Oxfordshire: Routledge, 2014).

bukan persetujuan atau solusi. Akhirnya pemerintah pusat, daerah, dan OAP tidak menuju pada penentuan siapa yang kalah dan siapa yang menang.<sup>237</sup> Sehingga meningkatkan jalan bagi perbedaan dan pertentangan yang selama ini buntu bisa dikomunikasikan satu sama lain. Secara luas, pihak yang terlibat akan menggali dengan rasa saling menghargai, dan membangkitkan percakapan-percakapan baru dimana isu-isu yang penting bisa mengemuka secara leluasa. Melalui dialog, pihak-pihak dalam konflik yang sebelumnya sangat sulit untuk bisa sampai pada persetujuan, akhirnya akan saling memahami pandangan yang dimiliki masing-masing pihak.<sup>238</sup>

Kalau berkaca kepada apa yang terjadi dengan perjalanan konflik Papua, sebenarnya inisiatif untuk menggalang jalan damai di Tanah Papua bukanlah barang baru. Tercatat sejak keruntuhan rezim Orde Baru 1998, serta dimulainya era reformasi, beragam inisiatif ditujukan untuk menyelesaikan konflik di Tanah Papua mulai diusahakan. Belum ada hasil yang memuaskan dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari inisiatif yang pernah ada. Hal ini disebabkan semata-mata apa yang sebenarnya pembangunan ekonomi tidak menjadi jaminan perdamaian, bukanlah dialog yang sesungguhnya. Teks ini memberikan catatan bahwa jika dialog diadakan secara konsisten dengan format yang sesungguhnya maka kelemahan-kelemahan inisiatif perdamaian seperti yang pernah digagas semasa kepemimpinan sebelumnya tidak akan terjadi.

237. Kenneth N. Cisna dan Rob Anderson, "Communication and Ground for Dialogue," dalam *The Reach of Dialogue: Confirmation, Voice and Community*, Kenneth N. Cisna, et.al., eds. (New Jersey: Hampton Press, 1994), 14.

238. Michelle Maiese, "Dialogue," *Beyond Intractability*, September 2003. <https://www.beyondintractability.org/essay/dialogue>

Di awal era reformasi, didirikan Foreri untuk menyampaikan aspirasi OAP. Forum ini melaksanakan “dialog” dengan pemerintah pusat pada Februari 1999 memfasilitasi pertemuan antara 100 pemuka Papua dan Presiden Habibie.<sup>239</sup> Kemudian pada era pemerintahan Gus Dur dengan prinsip pluralismenya dibentuk PDP dengan Theys Eluay sebagai ketua.<sup>240</sup> Namun PDP tidak mampu mengelola momentum kepercayaan; yang terjadi PDP malah mendeklarasikan kemerdekaan Papua yang akhirnya tidak bisa diterima sama sekali oleh pemerintah pusat.

Inisiatif jugaterjadipadaerapemerintahanMegawatidengan dikeluarkannya UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus sebagai alternatif penyelesaian dengan cara-cara militer yang selanjutnya menjadi pendekatan konsiliasi bagi presiden. Ketika SBY dan Jusuf Kalla berkuasa, harapan akan adanya penyelesaian secara damai di Tanah Papua kembali mendapatkan angin segar.<sup>241</sup> Fokus diarahkan pada penerapan Otonomi Khusus secara konsisten, sebagai solusi yang adil komprehensif dan bisa dipertanggungjawabkan. Di awal pemerintahannya, beberapa langkah positif berkenaan dengan pengimplementasian Otsus bisa dicapai termasuk pendirian MRP. Desentralisasi kekuasaan diimplementasikan sejak 2004 dimana pemerintah provinsi diberi kewenangan mengembangkan wilayah kebijakan kecuali hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, kebijakan fiskal dan keuangan, urusan keagamaan, dan hukum.

239. Agus Alua, *Dialog Nasional Papua dan Indonesia*, 26 Februari 1999 (Jayapura: STFT Fajar Timur, 2002).

240. Agus Alua, *Kongres Papua 2000, 29-Mei sampai 4 Juni* (Jayapura: Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur, 2000).

241. Neles Tebay, “Epilog Dialog Jakarta-Papua Demi Perdamaian,” dalam *Oase Gagasan Papua Damai: Waa... Waa... Waa...*, Forum Akademisi Papua Damai ed. (Jakarta: Imparsial, 2012).

Namun dalam praktiknya nilai dan semangat Otsus mengalami perubahan dengan berbagi pertimbangan. Setelah lebih dari satu dasawarsa berjalan, bagi kebanyakan rakyat di Papua dan di mata pengamat Otsus pun akhirnya dianggap menuai kegagalan.

Gagasan dialog juga pernah dibumikan oleh Pater Neles Kedadabi Tebay Pr. (JDP) dengan mengusung Dialog Jakarta – Papua. Menurutny, beberapa alasan mendasar kenapa dialog bisa dijadikan pilihan dalam mencari jalan keluar bagi persoalan Papua, ialah: jalan kekerasan yang ditempuh selama ini tidak berhasil menyelesaikan masalah (konflik) Papua; dan UU-Otsus yang sangat penuh janji juga gagal memberikan kesejahteraan terhadap OAP. Hal ini menyebabkan semakin tergerusnya kepercayaan OAP terhadap pemerintah dan menurunnya dukungan internasional terhadap pemerintah Indonesia.<sup>242</sup> Format dialog (Jakarta – Papua) yang ditawarkan secara substansial memiliki kejelasan karena sudah dilengkapi dengan kerangka acuan, prinsip, tujuan, tahapan, peserta, serta fasilitator dialog. Dari hal tersebut, maka ia mendapat respon yang sangat positif dan menjadi angin segar bagi masa depan perdamaian Papua. Akan tetapi, sejak dikumandangkannya dialog pada tahun 2009 dan dideklarasikan pada konferensi perdamaian Papua 5-7 Juli 2011 hingga saat ini, hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dan bahkan menuai lebih banyak pro-kontra. Di satu sisi pemerintah Indonesia masih beranggapan bahwa dialog dapat menjadi media untuk melepaskan diri dari NKRI, dan di sisi lain OAP masih memiliki keraguan yang kuat dengan tawaran dialog tersebut.

242. Tebay, *Dialog Jakarta – Papua*, 1-11.

Diskusi tentang dialog Jakarta – Papua kembali muncul pada Agustus 2017, dimana pada 15 Agustus Presiden Jokowi mengundang 14 orang yang disebut sebagai perwakilan OAP untuk membicarakan permasalahan di Tanah Papua. Pada saat yang bersamaan, selain berbicara mengenai penyelesaian persoalan HAM, dibicarakan juga agenda dialog dengan Papua yang dipertegas dengan ‘dialog sektoral,’ yaitu membahas isu sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, ekonomi rakyat, dan infrastruktur. Melalui dialog sektoral, semua pihak, baik pusat, provinsi, kabupaten, maupun tokoh adat dan agama, dilibatkan dalam mencari solusi, sehingga semua memiliki tanggung jawab.<sup>243</sup>

Pemerintah pusat memberikan lampu hijau dan Pater Neles Tebay dijadikan PIC atau duta untuk melaksanakan dialog sektoral sebagai langkah penanganan masalah Papua. Namun dalam perkembangannya, dialog sektoral memiliki nasib yang kurang lebih sama dengan dialog Jakarta – Papua. Dalam penerapannya, dialog sektoral juga lebih banyak dikritisi dan ditentang daripada didukung. Seorang cendekiawan antropolog dari Uncen dalam sebuah artikel opini memberikan kritik sangat pedas dengan mengatakan bahwa gagasan dialog yang sedang digagas oleh Pater Neles (JDP) seperti mengarah ke Pepera jilid kedua. Hal ini dikarenakan, apa yang dibicarakan dalam dialog tersebut tidak satu pun berupaya untuk meluruskan sejarah politik Papua. Kemudian Ketua KNPB, Victor Yeimo, dalam ulsannya “menyikapi dialog sektoral” memberikan pandangan bahwa dialog sektoral

243. Pernyataan Pater Neles Tebay dalam siaran persnya di kampus STFT Fajar Timur, 23 Agustus, 2017.



hanyalah bahan politik pencitraan dari Jakarta. Menurunnya, media yang paling pas untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan perdamaian di Tanah Papua adalah referendum. Pdt. Benny Giay menjelaskan bahwa dialog Jakarta Papua dianggap tidak akan efektif tanpa mengikut sertakan ULMWP. Selain itu, dialog juga tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua. Pandangan lainnya mengatakan, persoalan Papua adalah konflik kekerasan aparat militer terhadap masyarakat sipil. Oleh karena itu, pelaksanaan dialog sektoral yang dijanjikan akan mengakomodasi persoalan yang ada, dipandang secara pesimis.<sup>244</sup>

Dari semua inisiatif yang dipaparkan singkat di atas, memang terdapat komunikasi antara pemerintah dan perwakilan Papua. Akan tetapi, sangat kentara bahwa apa yang sebenarnya terjadi bukanlah dialog seperti apa yang dirasionalisasikan dalam paparan teks ini. Dialog yang saat ini berkembang di lapangan hanya menjadi minat sebagian kecil masyarakat dan bahkan tidak jarang kalangan yang mulai mengkritisi kata dialog. Seorang tokoh adat Papua di Abepura, mengemukakan bahwa untuk saat ini dialog merupakan strategi mengakomodasi isu pembangunan, marginalisasi, dan disintegrasi di Papua. Hal ini jangan dibiarkan mendapat pemahaman yang semakin kabur dan terkesan membingungkan. Menurutnya dialog cukup untuk menata komunikasi antara pemerintah pusat dengan OAP. Dialog sektoral harus diterjemahkan menjadi bagaimana pemerintah wajib untuk

244. Bernard Koten et.al., *Papua Surga yang Terlantar: Laporan HAM SKP Se-Papua 2015-2017* (Jayapura: SKPKC Fransiskan Papua, 2018), 75 -77.

menyediakan sektor-sektor yang harus disediakan bagi OAP, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lain lain.

*Apakah perlu memakai kata “dialog sektoral” atau cukup dengan sebutan pembangunan per sektor yang kontekstual, karena berdasarkan kebutuhan daerah atau bisa saja berbasis kebudayaan. Sehingga pemakaian kata dialog cukup dalam konteks dialog antara pemerintah Indonesia dan OAP melalui perwakilannya. Dialog seperti yang sudah dibahas oleh JDP pada awal mulanya JDP terbentuk. Kebijakan per sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain ini adalah bagian dari kewajiban pemerintah untuk menyediakan dan melaksanakannya tanpa harus membuat dialog per sektor dan per aktor.<sup>245</sup>*

Lebih jauh lagi terkait dialog sektoral antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah saat ini menjadi sesuatu yang sangat tidak populer di kalangan OAP secara luas. Bagi OAP sektor penting kehidupan bukanlah sesuatu yang harus didialogkan, melainkan menjadi sesuatu yang sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakannya untuk perbaikan kehidupan mereka. Berdasarkan pengamatan amatir yang beliau lakukan sebagai orang asli dan tinggal di Papua, gagalnya sektor-sektor pembangunan di Papua dapat disebabkan oleh ketiga faktor ini:

[1] Pemerintah pusat tidak memperhatikan rekomendasi dan

245. Wawancara Tim Papua dengan Tokoh Masyarakat Maret, 2020.

kajian-kajian dari daerah, khusus dalam konteks pembangunan di Papua yang berbasiskan pada budaya lokal.

[2] Pemerintah daerah tidak bekerja secara optimal untuk menggali potensi daerah dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk diterapkan di Papua berdasarkan kearifan lokal dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup OAP, dan [3] Tidak ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>246</sup>

Jalinan komunikasi "dialog" melalui inisiatif Otsus dalam penerapannya di Tanah Papua lebih banyak menuai masalah daripada memberikan manfaat yang signifikan bagi rakyat. Otsus banyak dikatakan tidak berhasil dalam melahirkan bentuk kesepakatan antara pemerintah pusat dengan OAP, melainkan hanya merupakan produk pemerintah untuk meredam terjadinya gejolak di Papua. Konsekuensinya, terjadi konflik pemahaman mengenai eksistensi Otsus. Bagi pemerintah hal ini merupakan wujud nyata dan ikhtiar untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Sementara bagi banyak pihak yang memiliki pengaruh kuat di Papua, Otsus adalah ciptaan pemerintah untuk menghentikan perlawanan mereka terhadap ketidakadilan yang dirasakan selama ini.<sup>247</sup> Otsus juga dilabelkan gagal dalam menyejahterakan OAP. Hingga kini, belum ada peningkatan kesejahteraan yang signifikan, bahkan derita lama Papua dalam bentuk pelanggaran HAM, pembalakan liar, pelayanan kesehatan yang buruk, serta penyebaran penyakit HIV/AIDS masih berlangsung dan meningkat.<sup>248</sup>

---

246. Wawancara dengan seorang Ketua DAP, Abepura, Januari 2020.

247. Muchamad Ali Safa'at, "Problem Otonomi Khusus Papua," dalam *Oase Gagasan Papua Damai Waa...Waa...Waa...* (Jakarta: Imparsial Press, 2012), 41.

248. Tebay, *Dialog Jakarta* - Papua, 4.

Dalam konteks Papua, UU Otsus adalah salah satu bentuk kebijakan yang berdasarkan pada kebutuhan daerah. Undang-undang ini lahir karena protes dan tuntutan OAP untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun dalam 20 tahun pelaksanaannya, sudah saatnya UU Otsus dilihat dan dikaji kembali, apakah sudah cukup mengobati hati OAP? Sehingga tidak ada lagi suara-suara untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sebab hingga saat ini, suara dan perjuangan untuk penentuan nasib sendiri masih digaungkan bahkan semakin keras. Maka sudah saatnya semua pihak melakukan refleksi dan mulai mencari jalan penyelesaian bersama.

Dari pencermatan yang dilakukan tim peneliti, baik secara tekstual maupun secara langsung di lapangan, nampaknya dialog menghadapi tantangan yang sangat besar sebagai sebuah strategi dalam mengakomodasi persoalan pembangunan, marginalisasi, dan disintegrasi di Papua. Terdapat 3 hal yang menjadikan dialog tidak mendapatkan tempat dalam menjembatani komunikasi pemerintah pusat, daerah, dan OAP. Pertama, belum ada dampak yang signifikan dan dirasakan bermanfaat, terutama bagi orang Papua. Kedua, belum ada hasil nyata dan langkah praktis yang dirasa bermanfaat. Ketiga, pihak yang terlibat, terutama OAP, tidak meyakini dampak jangka panjangnya terhadap persoalan yang mereka hadapi selama ini.<sup>249</sup>

Apakah dialog bisa menjadi strategi agar pembangunan di Papua benar-benar tepat sasaran dan menyentuh hati OAP? Pencermatan terhadap situasi yang berkembang di Papua

249. Christopher Mitchel, "Problem Solving Exercises and Theories of Conflict Resolution," dalam *Conflict Resolution Theories and Practice: Integration and Application*, Sandole dan Hugo Van Der Merwe eds. (Manchester: Manchester University Press, 1993), 82.

bermuara pada kesimpulan bahwa persoalan yang ada bukan karena dialog adalah sesuatu yang kurang tepat atau tidak diterima, melainkan perlu keseriusan semua pihak untuk berkomitmen dalam pelaksanaannya.<sup>250</sup> Sulit membantah bahwa dialog adalah cara yang paling bermartabat, damai, dan tanpa kekerasan yang menjadi pilihan. Dialog diharapkan dapat mengatasi perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan OAP, OAP dengan pendatang, dan juga antara sesama OAP untuk mencegah konflik yang lebih buruk terjadi.

## 5.5 MENUJU PEMBANGUNAN BERBASIS KEBUDAYAAN

Pembangunan dan perdamaian sudah lama menjadi dambaan bagi seluruh warga yang mendiami Tanah Papua. Impian ini masih terhambat karena pada kenyataannya masih ada persoalan yang menyelimuti Papua bahkan sejak terintegrasinya Papua di 1963. Maka dari itu, tidak berlebihan jika segala hambatan pembangunan perlu segera dihilangkan dan semua pihak harus mulai merealisasikan pembangunan yang berbasis pada budaya.

Kebudayaan OAP memiliki kearifan lokal yang mencakup berbagai bentuk pengetahuan dan praktik yang mereka miliki dan diperoleh sebagai anggota suatu kelompok masyarakat atau komunitas. OAP mengidentifikasi identitas budaya mereka melalui proses belajar dan diwariskan secara turun-temurun. Mereka memiliki berbagai pengetahuan dan praktik yang dijadikan dasar

---

250. Perhatikan FAPD, *Negosiasi Noken Dialog untuk Papua Damai, Dialog dalam Resolusi Konflik* (Jakarta: Tifa, Imparsial, 2012); bandingkan dengan Latifah Anum Siregar dkk. eds., "Bab III Pendekatan Dialog, Pendekatan yang Humanis," dalam *Menuju Papua Tanah Damai: Perspektif Non-Papua* (Jayapura: AIDP, JDP, Tifa, 2013).

dalam tata karma perilaku dan tindakan saat melakukan interaksi sosial antar mereka, dengan kelompok lainnya, dan bahkan menjadi pedoman pada saat berinteraksi dengan alam. Secara budaya, OAP memiliki pemahaman tersendiri mengenai nilai luhur kehidupan dan aktivitas kearifan yang mendasari arah dan bentuk kehidupan sosial, ekonomi, hukum, dan politik mereka.<sup>251</sup>

Harus diakui bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam menangani persoalan Papua masih bersifat *top-down*. Masifnya proses peminggiran terhadap OAP, serta belum terjalinnnya komunikasi antar pemerintah pusat, daerah, dan OAP menjadi indikator kebijakan pembangunan yang dilaksanakan belum menyentuh nilai kebudayaan OAP. Oleh sebab itu, manfaat kebijakan pembangunan tidak dapat dirasakan dalam kehidupan mereka. Berikut disampaikan beberapa contoh kenyataan yang dihadapi beberapa kelompok masyarakat dimana mereka harus menerima program pembangunan pemerintah yang jauh dari nilai kebudayaan yang mereka miliki selama ini.

### **(1) Masyarakat Adat Hubula yang Ada di Wamena Kabupaten Jayawijaya.**

Orang Hubula memiliki filosofi hidup “Wen, Wam, Wene” yang dipegang teguh hingga hari ini. Orang Hubula harus bekerja keras membuat kebun (*wen*) dan menanam sayuran untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memberi pakan babi dimana mereka juga harus memelihara babi (*wam*); dan ketika ada masalah

251. Lihat Aliong Mus, Bupati Kepulauan Taliabu, “Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal di Pulau Taliabu: Potensi dan Aktualisasinya bagi Pembangunan Daerah,” *Jurnal ETNOHISTORI*, Vol. 2, No. 1 (2016), 58-59.

(wene), mereka tidak kesulitan karena memiliki modal hasil kebun dan babi untuk menyelesaikan masalah yang ada, baik pernikahan, kematian, maupun pendidikan. Orang Hubula memiliki ritual adat yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara mereka dengan leluhur mereka dan juga alam sebelum membuka kebun, saat membuka kebun, membuat pagar, dan saat panen hasil kebun. Mereka memiliki bagian masing-masing dalam honai mereka, ada honai urusan ekonomi, honai politik, honai urusan kesuburan, dan sebagainya. Orang dan ritual dalam masing-masing fungsi tersebut tidak bisa ditukar-tukar atau dilewatkan, sebab mereka percaya bahwa hal itu akan membawa kesialan bagi mereka. Adat telah mengatur bagaimana relasi hidup mereka dengan sesama, leluhur, dan alam.<sup>252</sup>

Hal yang disampaikan dari contoh di atas adalah masyarakat adat sejak awal sudah mempunyai kekuatan dan pengetahuan semua sumber alam dan nilai kemandirian. Hidup masyarakat adat tidak bisa terpisah dari alam (tanah, hutan). Mereka memiliki pandangan bahwa tanah adalah ibu yang memberikan kehidupan. Nilai hidup baik ini hampir hilang dari hidup orang Hubula, terutama karena kebijakan pemerintah yang *top-down*. Kebijakan beras miskin menjadikan mereka tidak lagi merasa perlu membuat kebun. Oleh karenanya mereka tidak lagi mampu memelihara babi karena tidak dapat memberi pakan babi, dimana beras hanya cukup untuk kebutuhan makan manusia. Kebijakan raskin ini juga membuat masyarakat adat Hubula hampir melupakan adat istiadat, nilai kemandirian, dan juga terputusnya relasi mereka dengan leluhur dan alam.

---

252. Sugandi, *Analisis Konflik dan Rekomendasi*.

Dalam pengalaman pelayanan SKPKC Fransiskan Papua/ Gereja Katolik di komunitas Hubula-Wamena sejak 2011, masyarakat adat Hubula mulai berkomitmen menata kembali “pagar hidup” mereka yang sudah mulai rusak. Pendampingan terus berlangsung hingga pesta rekonsiliasi pada 2016, dimana dilaksanakan upacara adat untuk memperbaiki hubungan mereka yang selama ini rusak dengan leluhur dan alam. Puncak dari upacara ini adalah masyarakat Hubula di Paroki Pikhe, Wamena, mulai membuat kebun kembali, menanam ubi, sayuran, dan memelihara babi.

Dari hasil kebun yang berlimpah, masyarakat meminta bantuan kepada gereja untuk memasarkan hasil kebun sayuran dan ubi keluar Wamena, sehingga dapat mendatangkan nilai ekonomi bagi mereka yang berguna untuk membiayai sekolah anak-anak mereka. Hal ini mulai menjadi masalah sebab gereja tidak memiliki koneksi dengan pasar. Saat hasil kebun dibawa ke pasar di kota Wamena hasil jualan yang didapatkan tidak seberapa. Petugas gereja mencoba memfasilitasi agar hasil kebun masyarakat asli bisa dijual ke Jayapura, Timika, Biak, dan Deiyai, wilayah-wilayah yang kesulitan sayuran dan ubi. Tetapi masalah berikutnya adalah kuota untuk kargo penerbangan mengirim sayuran dan lain-lain sudah dipegang oleh pengusaha atau pedagang non-Papua yang sudah lebih dulu membangun jaringan bisnis.

Dari sektor ekonomi ini dapat kita lihat bagaimana masyarakat adat yang dalam budayanya dapat mempunyai hasil kebun dengan nilai ekonomis, tetap kalah bersaing dan tersingkir dari pasar. Di sini muncul tantangan bagi gereja dan lembaga masyarakat adat Papua itu sendiri. Bagaimana caranya merebut kembali peluang-peluang ekonomi yang ada, sehingga manfaat pembangunan itu akan benar-benar terasa dan dapat dinikmati oleh OAP? Apakah



situasi ini dapat mendorong dirumuskannya kebijakan-kebijakan berdasarkan budaya?

## **(2) Perjuangan Pedagang Asli Papua untuk Memiliki Pasar yang Representatif (Berbasiskan Budaya Papua)**

Pada 2000 saya menyaksikan Mama-mama Papua yang berjualan di pinggir jalan Kota Jayapura. Salah satu alasan mengapa mereka memilih berjualan di pinggir jalan adalah mereka merasa kalah dan tidak bisa bersaing dengan pedagang non-Papua yang ada di pasar. Mereka pun sangat sering menjadi korban penertiban oleh Satpol PP karena berjualan di emperan toko dan berkali-kali mereka dilarang untuk berjualan di emperan toko.

Melihat hal ini, SKPKC Fransiskan Papua (saat itu masih bernama SKP Keuskupan Jayapura) mulai melakukan pengumpulan data pedagang asli Papua yang berjualan dipinggir jalan dan mendampingi pedagang untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah eksekutif maupun legislatif. Awal negosiasi dengan Pemerintah Daerah (Kota Masya Jayapura dan Provinsi Papua) mama-mama diminta untuk kembali berjualan di pasar umum Youtefa di Abepura. Namun, mama-mama menolak dan mereka ingin memiliki tempat jualan sendiri di Kota Jayapura.

Perjuangan mereka mendapatkan dukungan dari kelompok mahasiswa, hingga akhirnya Mama-mama Pedagang Asli Papua mulai mengorganisasikan diri dengan membentuk SOLPAP sekitar 2007. Perjuangan panjang membuahkan hasil dengan pemerintah mendirikan pasar sementara untuk Pedagang Asli Papua, sambil menunggu kepastian tempat untuk membangun pasar permanen. SKPKC sebagai lembaga awal yang terlibat pun mulai membantu dengan merumuskan pasar yang representatif untuk pedagang asli

Papua berbasiskan budaya, mulai dari desain pasar dan seterusnya. Pada 2014, setelah pelantikan Jokowi, pasar permanen mulai dapat dibangun. Akan tetapi, semua unsur budaya asli dihilangkan dan digantikan dengan konsep Jakarta, sehingga pasar yang didirikan tidak sesuai desain awal.

Dua contoh di atas memberi gambaran perjuangan untuk mempertahankan budaya dan menerjemahkannya dalam kebijakan-kebijakan agar OAP merasa memiliki Indonesia itu sudah pernah dicoba, tetapi niat baik pemerintah untuk melaksanakannya tanpa mengganggu kepentingan pihak lain masih sangat sulit. Hal ini berdampak pada tingkat ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin meningkat. Dengan kata lain, tidak ada jalan lain yang harus diambil pemerintah selain untuk menerapkan pembangunan dengan bingkai Kebudayaan Papua. Pembangunan berbasis kebudayaan yang dimaksud adalah program-program pembangunan yang memelihara dan menjunjung tiga wujud kebudayaan OAP, yakni pertama, pembangunan harus sejalan dengan kompleks dari ide-ide lokal, gagasan, nilai, norma, dan peraturan adat yang tumbuh dan dipertahankan di Papua. Kedua, pembangunan jangan sampai mengusik pola berperilaku luhur OAP dan aktivitas pola perilaku bermasyarakat secara adat antar OAP. Ketiga, jangan sampai pembangunan menggeser benda-benda hasil cipta karya OAP selama ini. Jika wujud pertama disebut sebagai sistem budaya, maka wujud kedua lazim dikenal sebagai sistem sosial, dan wujud ketiga merupakan artefak atau benda-benda hasil karya manusia.<sup>253</sup> Dengan kalimat sederhana, pembangunan harus

---

253. Lihat Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1985).

tetap membuka ruang selebar-lebarnya untuk mempertahankan dan menjunjung tinggi kompleksitas budaya mereka.

Melalui pembangunan yang mengakar pada keluhuran budaya Papua, maka akan sangat besar kemungkinan persoalan-persoalan yang kini ada mendapat penyelesaian dan perdamaian yang kita dambakan dapat terwujud. Apabila terdapat komitmen dari semua pihak untuk merealisasikan pembangunan berbasis kebudayaan, maka empat persoalan utama yang ditenggarai menjadi akar persoalan mahalnya harga kesejahteraan dan perdamaian di Papua akan mulai mendapatkan jalan terang. Keempat persoalan utama terkait Papua tersebut, yakni (1) kegagalan pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur; (2) diskriminasi dan marginalisasi terhadap OAP; (3) kekerasan negara terhadap OAP yang berakibat pada terjadinya pelanggaran HAM; dan (4) perbedaan penafsiran mengenai sejarah integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia.<sup>254</sup>

## 5.6 PENUTUP

Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan Pemerintah untuk menangani persoalan konflik Papua masih bersifat *top-down* baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Meskipun Pemerintah secara terbuka mengklaim bahwa kebijakan negara di Papua didasari pendekatan kesejahteraan, namun tidak mengurangi kebijakan represif dan strategi pembangunan

254. P2Politik-LIPI, *Updating Papua Road Map*.

bercorak kapitalistik yang berbasis pada pertumbuhan. Sebagai akibatnya, pembangunan yang mendatangkan kemajuan dalam bidang infrastruktur, justru mendorong terjadinya marginalisasi dan depopulasi OAP di atas tanahnya sendiri. Fenomena *land grabbing* dan kerusakan ekologis yang menggusur ruang hidup OAP merupakan cerita pilu yang mereka keluhkan.

Salah satu strategi untuk menanggapi isu marginalisasi dan depopulasi OAP adalah melalui dialog antara Pemerintah dan OAP untuk membicarakan grand-design pembangunan di Tanah Papua. Dialog tersebut dapat disebut sebagai dialog sektoral yang berdiri sendiri, terpisah dari dialog politik antara Jakarta dan Papua. Terminologi dialog *sectoral* memungkinkan pemerintah untuk berpartisipasi karena tidak ada ketakutan politik seperti tuntutan kemerdekaan. Namun, dialog jenis ini cenderung ditolak oleh elemen-elemen gerakan politik Papua yang menghendaki dialog internasional. Alternatif kedua, dialog sektoral merupakan bagian dari dialog Jakarta – Papua yang dimediasi oleh pihak ketiga seperti Pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka di 2005.

Salah satu hasil yang diharapkan dari dialog sektoral tersebut ialah *grand design* pembangunan berbasis kebudayaan yang menurut Septer Manufandu berdasarkan pada nilai filosofis: kecukupan, jati diri, dan kebebasan. Artinya, pembangunan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup OAP, memperkuat identitas kebudayaannya, serta mendatangkan kebebasan dari rasa takut dan kekurangan. Prinsip dasarnya adalah keberlanjutan, keberpihakan, perlindungan, pemberdayaan, dan keterpaduan. Strategi pembangunan seperti ini berpotensi untuk mengurangi kesenjangan antara pendatang non-Papua dan OAP. Selain itu,

hal yang paling fundamental adalah strategi pengakuan dan penghormatan terhadap martabat OAP, serta kesediaan pemerintah untuk mendengarkan suara mereka sebelum merencanakan pembangunan di Tanah Papua.



## BAB 6

# KESIMPULAN

DENGAN berpegangan pada konsep, teori, dan memperhatikan data-data, baik dari sumber tertulis maupun observasi dan wawancara yang dilakukan di lapangan, serta memanfaatkan analisis yang sudah dilakukan pada masing-masing bab, maka penelitian ini menyimpulkan:

*Pertama*, elit dan masyarakat di Papua memiliki makna yang berbeda dalam hal pembangunan, marginalisasi, dan disintegrasi. Bagi OAP, pembangunan justru memunculkan marginalisasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta mengakibatkan depopulasi OAP. Sedangkan pemerintah hanya melihat pembangunan dari perspektif ekonomi, infrastruktur, dan membuka keterisolasian geografis. Dalam realitanya pembangunan masyarakat di Papua hanya dimanfaatkan oleh komunitas migran dari luar Papua. Situasi seperti ini hanya memperkuat disintegrasi. Keinginan OAP untuk merdeka telah muncul sejak era dekolonialisasi 1960an

namun hal ini diperkuat oleh marginalisasi yang diakibatkan oleh pembangunan.

*Kedua*, OAP mengeluhkan beberapa isu, yakni: semakin menurunnya kualitas hidup, kemiskinan, menurunnya akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar, semakin terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi, semakin menguatnya dominasi pendatang, serta semakin tergerusnya identitas budaya Papua. Isu yang tersebut dialami oleh OAP sebagai akibat dari masifnya persoalan pembangunan dan marginalisasi yang memperkuat dorongan disintegrasi.

*Ketiga*, marginalisasi sebagai dampak dari masifnya persoalan pembangunan dan semakin menguatnya semangat disintegrasi, berakumulasi pada semakin menguatnya identitas politik kepapuaan. Identitas tersebut sebetulnya telah dikonstruksi pada masa kolonial sebagai anti-tesis dari identitas politik keindonesiaan. Namun pengalaman OAP yang mengalami marginalisasi sejak integrasi hingga sekarang, justru memperkuat identitas tersebut. OAP hingga saat ini merasa dirinya bagian dari keluarga besar Melanesia-Pasifik daripada sebagai bangsa Indonesia.

Pembangunan di Papua yang belum tepat sasaran yang mengakibatkan termarginalisasinya OAP salah satunya disebabkan oleh perbedaan paradigma dan nilai dalam melihat pembangunan. Gagalnya Pemerintah RI dalam memahami konteks historis dan antropologis terhadap pembangunan Papua yang belum usai di tengah sikap akomodatif terhadap berbagai tuntutan politik etnis yang berlebih, justru telah menjadi batu sandungan bagi keberlangsungan Otsus Papua itu sendiri.



Pemerintah melihat pembangunan dalam aspek ekonomi dan birokratisasi, sementara OAP melihat pembangunan dalam aspek sosial budaya. Hingga saat ini belum teridentifikasi mekanisme yang bisa menjembatani perbedaan tersebut. Harapan melakukan akselerasi terhadap pembangunan, peningkatan kualitas demokrasi, kualitas SDM, serta kualitas pelayanan publik di tengah kegagalan pemerintah dalam menerjemahkan akar persoalan birokrasi Papua, terpaksa sirna. Hal ini berkontribusi dalam pembentukan primordialisme dan konflik etnis. Komplikasi ini yang membuat praktik marginalisasi terhadap OAP semakin meningkat dan mengancam integrasi, baik antara sesama OAP maupun masyarakat Indonesia pada umumnya.

Secara lebih rinci, tiga kesimpulan di atas diuraikan dalam refleksi berikut. Penelitian ini menemukan bahwa dialog merupakan sebuah pendekatan dan strategi yang dapat menjembatani antara Pemerintah dan OAP dalam menangani isu pembangunan, marginalisasi, dan disintegrasi. Pembangunan di Tanah Papua memiliki dua wajah, yakni modernitas yang berupa kemajuan secara fisik dan marginalisasi serta depopulasi pada sisi lain. Hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan jalan Trans-Papua yang dilakukan sejak masa Orde Baru, di mana lebih melayani kepentingan transmigran daripada OAP. Marginalisasi terjadi karena OAP sebagai subjek manusia yang memiliki kebudayaan tidak dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sehingga, mereka menjadi terkecualikan dalam pembangunan, baik secara ekonomi maupun budaya, bahkan menjadi korban diskriminasi selama berintegrasi dengan Indonesia.

Marginalisasi yang berkelanjutan terhadap OAP di atas tanahnya sendiri menjadikan mereka secara berkala terdewopulasi

oleh pendatang di kawasan yang menjadi lokasi pembangunan. Persoalan pendatang di Papua pada masa kini merupakan masalah yang diwariskan oleh Orde Baru yang memulai transmigrasi pada 1971. Total transmigran meningkat dari 5.000 warga menjadi 560.000 pada 1979. Dampak dari transmigrasi ini adalah sebagian kabupaten di Papua didominasi oleh etnis Jawa, seperti di Kabupaten Merauke, Keerom, dan Sorong. Selain transmigrasi, migrasi spontan juga terjadi di Papua terutama dari masyarakat BBM. Jumlah pendatang pada umumnya hampir sama dengan jumlah OAP, bahkan lebih besar di kota-kota besar seperti Jayapura, Sorong, dan Timika. Baik transmigrasi dan migrasi spontan telah mengubah komposisi penduduk Papua.

Sejak implementasi Undang-Undang Otsus Papua dimulai pada 2002, pembangunan di Tanah Papua menghasilkan rendahnya IPM dan tingginya tingkat kemiskinan di kabupaten-kabupaten yang jumlah penduduknya didominasi oleh OAP. Selain itu, sentra-sentra perkembangan ekonomi lebih banyak di kota-kota yang didominasi oleh komunitas pendatang maupun daerah yang menjadi lokasi transmigrasi. Sebagaimana telah disampaikan dalam paparan Bab 3, kondisi ini memperkuat hasil-hasil kajian sebelumnya yang menguraikan mengenai marginalisasi OAP dalam pembangunan Indonesia.

Marginalisasi tersebut dapat dipahami dalam dua perspektif. Pertama, konsep dan strategi pembangunan Indonesia yang berbasis pada pertumbuhan dan ideologi kapitalisme, tidak sesuai dengan sistem kebudayaan dan nilai tradisi OAP. Oleh karena itu, wajar jika komunitas pendatang menerima manfaat pembangunan lebih banyak. Sistem kebudayaan Melanesia yang berbasis pada komunalitas, pertukaran, dan keseimbangan antara

alam, manusia, dan kekuatan penguasa alam semesta belum dijadikan bahan pertimbangan dalam pembangunan Indonesia. Kedua, OAP tidak dipersiapkan secara sungguh-sungguh agar dapat terlibat dalam pembangunan atau mampu memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Sebagai akibatnya, dalam perubahan sosial yang disebabkan oleh migrasi, perkembangan teknologi, dan percepatan pembangunan, maka OAP hanya menjadi objek, bahkan korban dalam pembangunan.

Marginalisasi OAP yang berkelanjutan di atas tanahnya sendiri secara bertahap menyebabkan pertumbuhan OAP lebih lambat dibandingkan komunitas-komunitas pendatang. Walaupun terus mengalami pertumbuhan yang relatif stabil, pertumbuhan jumlah penduduk dari komunitas pendatang lebih besar daripada OAP. Fenomena ini menjadikan OAP dalam kurun waktu 1971-2000 relatif terdepopulasi. Setelah Reformasi 1998 yang dilanjutkan dengan Otsus Papua, marginalisasi dan depopulasi terus disampaikan secara akademik, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Namun demikian, belum ada upaya-upaya yang serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyelesaikan kedua persoalan ini. Salah satu strategi yang tepat, kami kira, ialah dengan melaksanakan pembangunan berbasis kebudayaan Melanesia yang sesuai dengan sistem nilai dan praktik-praktik kebudayaan orang asli Papua.

Sebagai sebuah refleksi, tim peneliti menegaskan kembali bahwa penguatan identitas OAP, terutama di kalangan generasi muda yang merasa sebagai bagian dari keluarga besar Melanesia-Pasifik dan anti-Keindonesiaan harus ditempatkan dalam perspektif politik kebudayaan. Hal ini berarti pemerintah seyogianya merespon penguatan identitas Papua-Melanesia tersebut dengan

pendekatan kebudayaan, yakni melalui pengadopsian nilai filsafat Melanesia sebagaimana disampaikan oleh Bernard Narakoby maupun Pater Walter Lini. Pendekatan represif dan pembangunan yang kapitalistik serta reformasi birokrasi yang merupakan strategi perdamaian hibrida tidak akan mampu menarik hati OAP dalam rumah besar Indonesia.

Salah satu strategi yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah pada saat ini adalah dengan mengerahkan upaya pembangunan ekonomi di Tanah Papua untuk membangun manusia Papua secara totalitas. Para perencana pembangunan, baik di Jakarta maupun di Papua, harus memiliki visi pembangunan yang melihat bahwa sistem ekonomi OAP merupakan suatu kesatuan dengan sistem sosial, hukum adat, kepemilikan tanah, kebudayaan, politik, dan ekologi. Sayangnya pemikiran seperti itu tidak terlihat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan wilayah Papua yang selalu diarahkan pada pembukaan akses keterisolasian, meningkatkan investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan di Tanah Papua semestinya dilaksanakan dengan menghormati komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat komunitas lokal, dan juga memajukan kesetaraan dan keadilan gender. Pembangunan di daerah ini seharusnya bersifat khusus, untuk memastikan kelangsungan hidup OAP beserta seluruh sistem sosial, ekonomi, ekologi, dan budayanya.

Di sisi lain, gagasan dialog sebagai mekanisme dalam mengakomodasi atau pijakan dalam mencari solusi yang dibutuhkan belum diterima secara utuh. Kalau diperhatikan proses yang terjadi, meskipun dalam bahasa yang berbeda, komunikasi dalam membuka jalan atau sarana yang bermartabat untuk mencari solusi

yang tepat dalam penyelesaian masalah Papua sudah digaungkan. Dialog sudah mendapatkan dukungan dimana mulai banyak orang di Papua sudah tidak takut dan alergi dengan kata tersebut. Meski demikian, hingga saat ini belum ada kepastian dalam pelaksanaan dialog untuk Papua Damai. Terdapat beberapa temuan terkait belum berjalannya dialog, seperti belum adanya pemahaman yang sama antara Pemerintah dan OAP, serta antar OAP sendiri, baik tentang tujuan dan agenda dialog. Akhirnya yang nampak adalah sebuah ganjalan yang sering diungkapkan dalam pertanyaan “bagaimana mau ada dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan OAP jika antar pihak belum mempunyai pemahaman yang sama tentang tujuan dan agenda dialog?” Kemudian permasalahan lainnya adalah belum adanya komitmen dari semua pihak. Dialog adalah alternatif terbaik saat ini, karena merupakan cara yang bermartabat dan tanpa kekerasan, sebab “dialog hasilnya adalah kesepakatan.”

Ke depan, kesempatan untuk dilaksanakannya dialog Papua Damai sebenarnya memiliki kemungkinan yang besar. Resepnya adalah menemukan kesepahaman makna dari dialog, adanya komitmen, dan juga konsistensi pelaksanaannya. Selanjutnya penting juga untuk memasukan beberapa terobosan dan beberapa isu yang esensial dalam agenda dialog untuk disebutkan, misalnya menyentuh mengenai isu migran. Pembatasan arus migrasi ke Papua memberikan gambaran bagaimana OAP termarginalkan dan kalah dalam persaingan dengan non-Papua. Selain itu, gambaran bagaimana non-Papua merebut peluang dalam bidang ekonomi dan politik, ruang-ruang hidup, dan membuat OAP semakin tersingkir di atas tanahnya sendiri, pada akhirnya meningkatkan kecemburuan sosial dan dapat menyebabkan konflik horizontal. Hal ini berujung

pada hal yang paling fatal, yaitu ancaman disintegrasi. OAP perlu diberi ruang sedikit lebih luas untuk menikmati manfaat dari pembangunan tersebut. Dengan syarat tanpa harus tersingkir lagi karena ketidaksiapan/ketidakmampuan untuk bersaing dan juga karena sistem yang mendiskriminasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- "33 Tewas dalam Rusuh Papua," *Tempo*, 28 September 2019, <https://majalah.tempco.co/read/nasional/158481/33-tewas-dalam-rusuh-papua>
- "Jurnalis Papua Alami Sejumlah Luka Akibat Dihajar Polisi," *Tabloid Wani*, 5 Januari 2017. <https://www.tabloid-wani.com/2017/05/jurnalis-papua-alami-sejumlah-luka-akibat-dihajar-polisi.html>
- "Merumuskan Kebijakan Konstruktif dalam Upaya Penyelesaian Konflik Papua Menuju Papua Damai." *Dirujuk dari hasil Workshop Forum Akademisi Papua Damai*. Jakarta, Indonesia, 1- 2 September 2016.
- "Tanah Papua: Perjuangan yang Berlanjut Untuk Tanah dan Penghidupan." *Buletin Down to Earth*, Edisi Khusus Papua No. 88-90 (Nov. 2011).
- Aditjondro, George J. *Suatu Telaah Dampak Migrasi Suku-suku Bangsa dari Sulawesi Selatan dan Tenggara ke Irian Jaya Sejak Tahun 1962*. Jakarta: LRKN-LIPI, 1986.
- Afriansyah, Anggi, Dini D. Kusumaningrum, Andhika A.

- Baskoro, dan P.S. Prasojo Ari, *Policy Paper: Alternatif Pendidikan Bagi Orang Asli di Provinsi Papua Barat*. Jakarta: Kedeputusan IPSK-LIPI, 2019.
- Al-Araf. *Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan Terhadap Kondisi HAM di Papua*. Jakarta: Imparsial, 2011.
- Al-Rahab, Amiruddin. "Presidium Dewan Papua: Berangkat dan Surutnya Gerakan Nasionalis Papua Merdeka 1999-2003." Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006.
- Alua, Agus. *Kongres Papua 2000. 29-Mei sampai 4 Juni*. Jayapura: Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Dialog Nasional Papua dan Indonesia, 26 Februari 1999*. Jayapura: STFT Fajar Timur, 2002.
- Ananta, A., D. R. W. W. Utami, dan N. B. Handayani. "Statistics on Ethnic Diversity in the Land of Papua, Indonesia," *Asia & the Pacific Policy Studies*, 3(3), (2016): 458-474.
- Anderson, B. *Papua's Insecurity: State Failure in the Indonesian Periphery*. Washington: East-West Center, 2015.
- Arriola, L. R. "Patronage and Political Stability in Africa." *Comparative Political Studies*, 42 no. 10 (2009): 1339-1362.
- Aspinall, Edward dan Greg Fealy eds., *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation & Democratisation*. Singapura: ISEAS, 2003.
- Auparay, Max. *Ekonomi Politik Migrasi Penduduk di Papua*. Ed. Alexander L. Griapon. Jayapura: Kerjasama Penerbit Praja Mandiri dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura, 2012.
- Ayamiseba, D. C. "Kebhinekaan Bahasa di Irian Jaya." Dalam *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk (Seri Etnografi Indonesia 5)*, eds. Koentjaraningrat, dkk. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1994.
- Bachtiar, H.W. "Sejarah Irian Jaya." Dalam *Irian Jaya membangun Masyarakat Majemuk*, eds. Koentjaraningrat, dkk. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1994.
- Backer, David, Ravinder Bhavnani, dan Paul Huth eds.



- Peace and Conflict 2016*. New York: Routledge, 2016.
- Badan Pusat Statistik. *Sensus Penduduk 2010*. Badan Pusat Statistik, 2010. <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=9100000000> dan <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=9400000000>
- 
- \_\_\_\_\_. *Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Aspek dan Provinsi 2009-2018*. Badan Pusat Statistik, 2018. <https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/05/04%2000:00:00/1242/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-aspek-dan-provinsi-2009-2018.html>
- 
- \_\_\_\_\_. *Indeks Kebahagiaan Menurut Provinsi 2014-2017*. BPS, 2018. <https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/05/04/1243/indeks-kebahagiaan-menurut-provinsi-2014-2017.html>
- 
- \_\_\_\_\_. *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi, 2011-2018*. BPS, 2018. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/964>
- 
- \_\_\_\_\_. *Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan dalam 12 tahun terakhir menurut Provinsi 2015-2018*. BPS, 2018. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).
- 
- \_\_\_\_\_. *Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi 2007-2019*. BPS, 2020. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).
- 
- \_\_\_\_\_. *Presentasi Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur 2011-2019*. Badan Pusat Statistik, 2020. <https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/12/22/1056/persentase-penduduk-buta-huruf-menurut-kelompok-umur-2011-2019.html>.
- 
- \_\_\_\_\_. *Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2010-2018 (Metode Baru)*. Badan Pusat Statistik, 2020 <https://www.bps.go.id/dynamictable/2019/04/16/1615/peringkat-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi-2010-2018-metode-baru.html>
- Baker, Victoria J. "Elders in the Shadow of the Big-Man."

- Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 139, no: 1, Leiden (1983): 1-17.
- Ballard, Chris Hugh. "The Denial of Traditional Land Right in West Papua." *Cultural Survival Quarterly*, Fall (2002).
- \_\_\_\_\_. "Synthetic Histories: Possible Futures for Papuan Pasts." *Reviews in Anthropology*, Vol. 39, Issue 4 (2010).
- Barth, Fredrik. "Introduction." Dalam *Ethnic Group and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*, eds. Fredrik Barth, dkk. Bergen-Oslo: Universitets Forlaget, 1970.
- \_\_\_\_\_. *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Judul asli Ethnic Group in Boundaries, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Nining I. Susilo. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988.
- Belau, Arnold dan Yosef Rumaseb. "Saya Siap Mati: Revitalisasi Perjuangan Uskup Muninghoff dalam Advokasi HAM di Tanah Papua." *Suara Papua*, 17 Februari 2018. <https://suarapapua.com/2018/02/17/saya-siap-mati-untuk-papua-perjuangan-uskup-muninghoff-dalam-advokasi-ham-di-tanah-papua-bagian-kedua-habis/>
- Bercovitch, J. "Mediation and Negotiation Technique," dalam *Encyclopedia of Violent Peace and Conflict (Vol. 2)*. San Diego: Academic Press, 1999.
- Bertrand, Jacques. *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- \_\_\_\_\_. "Autonomy and Stability: The Perils of Implementation and "Divide-and-Rule" Tactics in Papua, Indonesia." *Nationalism and Ethnic Politics*, Volume 20 Issue 2 (2014): 174-99. <https://doi.org/10.1080/13537113.2014.909157>
- Blair, Dennis C. dan David L. Philiph. *Komisi Untuk Indonesia: Perdamaian dan Perkembangannya di Papua*. New York: The Council for Foreign Relations Inc., 2003.
- Blauner, Robert. "Internal Colonialism and Ghetto Revolt." *Social Problems*, Vol. 16, No. 4 (Spring, 1969): 393-408. <https://>

- [www.jstor.org/stable/799949](http://www.jstor.org/stable/799949)
- Boswell, Terry dan William J. Dixon. "Marx's Theory of Rebellion: A Cross-National Analysis of Class Exploitation, Economic Development, and Violent Revolt." *American Sociological Review* Vol. 58, No. 5 (Oct., 1993): 681-702. <https://www.jstor.org/stable/2096281>
- Bourdieu, Pierre. *Language and Symbolic Power*. Cetakan kelima, eds. oleh John B. Thompson dan diterjemahkan oleh Gino Raymond dan Matthew Adamson. Cambridge: Harvard University Press, 1991.
- BPKAD Provinsi Papua. *Pengalokasian Dana OTSUS Tahun 2006 s/d 2019*. BPKAD Provinsi Papua, 2019. <https://bpkad.papua.go.id/dana-otsus/22/pengalokasian-dana-otsus-papua-tahun-2006-sd-2019.htm>
- Bünthe, M. dan A. Ufen eds. *Democratization in Post-Suharto Indonesia*. London: Routledge, 2009.
- Casanova, Pablo Gonzalez. "Internal Colonialism and National Development." *Studies in Comparative International Development*, Vol. 1. No. 4 (1965).
- Chauvel, Richard. *Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaption*. Washington: East-West Center, 2005.
- \_\_\_\_\_. "Papuan Political Imaginings of the 1960s: International Conflict and Local Nationalisms." *Dipresesntasikan dalam Seminar on the Act of Free Choice, 2008*: 39-59. <http://resources.huuygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/>
- Cisna, Kenneth N., dan Rob Anderson. "Communication and Ground for Dialogue." Dalam *The Reach of Dialogue: Confirmation, Voice and Community*, eds. Kenneth N. Cisna, et.al. New Jersey: Hampton Press, 1994.
- Clarke, G. "From Ethnocide to Ethnodevelopment? Ethnic Minorities and Indigenous Peoples in Southeast Asia." *Third World Quarterly* 22.3 (2001): 413-436.
- Collier, Paul. *The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It*. New York: Oxford

- University Press, 2007.
- Conde, Victor. *A Handbook of International Human Rights Terminology*. Nebraska: University of Nebraska-Lincoln, 2004.
- Cook, Alistair D. B. "Investing in Papua: The Dual Challenges of Governance and Development." *NTS Perspectives Issue*, No. 2 (Aug 2010). <https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/nts/2537-investing-in-papua-the-dual-c/>
- Creswell, John W. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, 4th ed. Boston: Pearson Education, 2012.
- Cypri, Jehan Paju Dale. "Penjajahan Lewat Pembangunan di Papua." *Rappler*. 23 Mei 2016. <https://rappler.com/world/penjajahan-lewat-pembangunan-papua>
- \_\_\_\_\_. *Kuasa, Pembangunan, dan Pemiskinan Sistemik: Analisis Kontra-Hegemoni dengan Fokus Studi Kasus di Manggarai Raya, NTT, Indonesia*. Labuan Bajo: Sunspirit, 2013.
- Davies, James C. "Toward a Theory of Revolution." *American Sociological Review*, Vol. 27, No. 1 (Feb, 1962).
- \_\_\_\_\_. "Toward a Theory of Revolution." Dalam *Anger Violence and Politics*, eds. Rosaline Fierabend, Ivo K. Fierabend, dan Ted Robert Gurr. New Jersey: Prentice Hall, (1963).
- Dinas Kesehatan Provinsi Papua, *Profil Kesehatan Provinsi Papua 2017*. Jayapura: Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 2018.
- Djojosekarto Et Al. 2012. *Nilai-Nilai Dasar Orang Papua dalam Mengelola Tata Pemerintahan (Governance): Studi Reflektif Antropologis*. Jakarta: Kemitraan.
- Elisabeth, Adriana, Muridan S. Widjojo, Cahyo Pamungkas, Rucianawati, dan Sinnal Blegur. *Agenda dan Potensi Damai di Papua*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2005.
- Elisabeth, Adriana, Muridan S. Widjojo, Rusli Cahyadi, dan Sinnal Blegur. *Pemetaan Peran dan Kepentingan Para Aktor Dalam Konflik di Papua*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2004.

- Elisabeth, Asrida. "Kala Masyarakat Tuntut Hak Ulayat Dari Perusahaan Sawit Negara Di Keerom (Bagian 1)." *Mongabay Environmental News*. 12 Maret 2018. <https://www.mongabay.co.id/2018/03/12/kala-masyarakat-tuntut-hak-ulayat-dari-perusahaan-sawit-negara-di-keerom-bagian-1/>
- Eller, J. D. *Cultural Anthropology: Global Forces, Local Lives*. New York and London: Routledge, 2009.
- Elmslie, Jim dan Camellia Webb-Gannon. "A slow-motion genocide: Indonesian rule in West Papua." *Griffith Journal of Law & Human Dignity* 1, no. 2 (2014).
- Elmslie, Jim. "West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: "Slow Motion Genocide" Or Not?" *Centre for Peace and Conflict Studies*, working paper no. 11/1 (2010).
- \_\_\_\_\_. "The Great Divide: West Papuan Demographics Revisited: Settlers Dominated Coastal Regions but the Highlands Still Overwhelmingly Papuan." *The Asia Pacific Journal, Asian Focus*, Vol, 15 Issue, 2. No.1. (15 Januari 2017).
- Esman, Milton. *Ethnic Politics*. New York: Cornell University Press, 1994.
- FAPD. *Negosiasi Noken Dialog untuk Papua Damai, Dialog dalam Resolusi Konflik*. Jakarta: Tifa, Imparsial, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Oase Gagasan Papua Damai Waa...Waa...Waa...* Jakarta: Imparsial, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Oase Gagasan Papua Bermartabat Waa...Waa...Waa...* Jakarta: Imparsial, 2017.
- Farhadian, C. E. *Christianity, Islam, and Nationalism in Indonesia*. London: Routledge, 2005.
- Fauzia, Mutia. "Kemenkeu: Ada Dana OTSUS Papua Rp. 1,85 Triliun yang Didepositokan." *Kompas.com*. 26 Februari 2020. <https://money.kompas.com/read/2020/02/26/051800626/kemenkeu--ada-dana-otsus-papua-rp-1-85-triliun-yang-didepositokan>
- Fearon, James D. *Ethnic Mobilization and Ethnic*

- Violence*. Oxford: The Oxford Handbook of Political Economy, 2006.
- Firman, Tony. "Ribuan Tahun Orang Melanesia di Indonesia." *Tirto.id*, 29 Agustus 2016. <https://tirto.id/ribuan-tahun-orang-melanesia-di-indonesia-bEYN>
- Fisher, Roger dan William Ury. *Getting to Yes: Negotiating an Agreement without Giving In*. London: Random House Business Books, 1991.
- Fitriani, Fitriana, Bert Hofman, dan Kai Kaiser. "Unity in diversity? The creation of new local governments in a decentralising Indonesia." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 41:1 (2005):57-79. <https://doi.org/10.1080/00074910500072690>
- Foran, John. "Theories of Revolution Revisited: Toward a Forth Generation?" *Sociological Theory* Vol. 11, No. 1 (Mar., 1993): 1-20. <https://www.jstor.org/stable/201977>
- Galtung, Johan. "Contemporary Conflict Resoluton." Dalam *Contemporary Conflict Resoluton*, Hugh Miall dan Oliver Ramsbotham eds. Cambridge: Tow Woodhouse Polity Press, 1999.
- Gelpke, J. H. F. Sollewijn. "On the Origin of the Name Papua." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Deel 149, 2de Afl (1993): 318-332. <https://www.jstor.org/stable/27864458>
- Giay, Benny. *Menuju Papua Baru: Beberapa Pokok Pikiran Sekitar Emansipasi Orang Papua*. Jayapura: Deiyai/ Els-ham Papua, 2000.
- Graf, Wilfried dan Gudrum Kramer. "Conflict Transformation Through Dialogue: From Lederach's Rediscovery of Freire Method to Galtung's Tranced Approach." *Journal Fur Entwicklungs Politik*, XXII 3 (2006).
- Gurr, Ted Robert. *Why Men Rebel*. New Jersey: Princeton University Press, 1970.
- Hadiz, V. R. "Decentralisation and Democracy in Indonesia; A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives." *Southeast Asia Research Centre, Working Paper Series 47* (2003).
- Haluk, Markus. ULMWP: *Persatuan dan Rekonsiliasi*

- Bangsa Melanesia di Papua Barat*, ed. Tim Kerja ULMWP. Numbay (Jayapura): ULMWP Press, 2015.
- Hanita, Margaretha. *Cita-Cita Politik: Gerakan Politik Orang Papua*. Jakarta: UI Publishing, 2019.
- Hansen, T. B. dan F. Stepputat eds. *States of Imagination: Ethnographic Explorations of the Postcolonial State*. Durham dan London: Duke University Press, 2001.
- Haryanto. "Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Nov, 2009). <https://doi.org/10.22146/jsp.10958>
- Hechter, Michael. *Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, 1536-1966*. London: Routledge and Kegan Paul, 1975.
- Hedman, Eva-Lotta ed. "Dynamics of Conflict and Displacement in Papua, Indonesia." *Refugee Studies Centre, Working Paper No. 42* (2007).
- Heiduk, F. "Two Sides of the Same Coin? Separatism and Democratization in Post-Suharto Indonesia." dalam *Democratization in Post-Suharto Indonesia*, M. Bunte dan A. Ufen eds. London: Routledge, 2009.
- Hoffman, John dan Paul Graham. *Introduction to Political Theory*. New York: Routledge, 2015.
- Horowitz, Donald L. *Ethnic Groups in Conflict*. London: University of California Press, 1985.
- Howard, M. C. Vanuatu: *The myth of Melanesian socialism*. Labour, Capital and Society/Travail, capital et société, 1983.
- Hyden, G. *African Politics in Comparative Perspectives (Second Edition)*. New York: Cambridge University Press, 2013.
- International Crisis Group. "Indonesia: Ending Repression in Irian Jaya." ICG Asia Report, No. 23 (2001). <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/indonesia/indonesia-ending-repression-irian-jaya>
- IPAC. *Carving Up Papua: More Districts, More Trouble*

- IPAC, Report No. 3. (9 Oktober 2013), <https://www.jstor.org/stable/resrep07786>
- Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat Mandiri dan Berkepribadian: Visi Misi dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kala 2014*. Jakarta: Seknas Jokowi, 2014.
- Kamma, Freek Christiaans. "Koreri: Gerakan Messianis dalam Kebudayaan Biak-Numfor." Disertasi Ph.D Universitas Leiden, 1972.
- Karoba, S., et.al. Papua Menggugat: Teori Politik Otonomisasi NKRI di Papua Barat. Yogyakarta: WatchPapua dan Galang Press, 2004.
- Kementerian Dalam Negeri. *Pengelolaan Dana OTSUS di Provinsi Papua*. Dirjen OTDA Kemendagri, 2018 [http://fmb9.id/document/1522114027\\_Paparan\\_Materi\\_Data\\_Ossus\\_Papua.pdf](http://fmb9.id/document/1522114027_Paparan_Materi_Data_Ossus_Papua.pdf).
- Kementerian Keuangan. *Ringkasan APBD 2018: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA-2018.pdf>
- Kemitraan. *Menuju Masyarakat yang Cerdas dan Pemerintah yang Responsif*. Kemitraan, September 2018. <https://www.igi.kemitraan.or.id/report/menuju-masyarakat-yang-cerdas-pemerintah-yang-responsif>
- Kerangka Acuan Workshop Penyusunan Design Penelitian Permasalahan Papua*. Bandung: FAPD, PACEDEPES dan IMPARSIAL, Oktober 2019.
- Kingsbury, D. dan H. Aveling eds. *Autonomy and Disintegration in Indonesia*. London: Routledge Curzon, 2003.
- Kivimaki, Timo. *Initiating A Peace Process in Papua: Actors, Issues, Process, and the Role of International Community*. Washington DC: East-West Centre, 2006.
- Kivimaki, Timo dan Rubern Thorning. "Democratization and Regional Power Sharing in Papua/Irian Jaya: Increased Opportunities and Decreased Motivations for Violence." *Asian Survey*,



- Vol. XLII, No. 4 (Juli/Agustus 2002): 651-672.
- Koalisi Internasional untuk Papua (ICP) dan Westpapua  
Netzwerk. *Hak Asasi Manusia di Papua 2017, Bagian 3: Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. 2005.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1985.
- Kompas. "Kilasan Ekonomi: Papua Terus Disoroti." 24 Januari 2000.
- Kompas.com. "Cukup Sudah Hentikan Kekerasan di Papua." 22 Agustus, 2019.
- Koten, Bernard, Daniel Gobay, OFM, dan Tim Kerja SKPKC. "Papua Bukan Tanah Kosong: Beragam Peristiwa dan Fakta HAM di Tanah Papua 2018." *Seri Memoria Passionis* No. 37 (2019).
- Koten, Bernard, et.al. *Papua Surga yang Terlantar: Laporan HAM SKP Se-Papua 2015-2017*. Jayapura: SKPKC Fransiskan Papua, 2018.
- Lagowan, Bernard. "Upaya Belanda Membangun Kesehatan Papua." *Suara Papua*, 25 Oktober 2017. <https://suarapapua.com/2017/10/25/upaya-belanda-membangun-kesehatan-papua/>
- Lan, T. Ju et.al. *Klaim, Kontestasi & Konflik Identitas: Lokalitas vis-à-vis Nasionalitas*. Jakarta: LIPI Press, 2006.
- Lapian, A. B. *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut, Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Depok: Komunitas Bambu, 2009.
- Li, T. M. "Compromising power: Development, culture, and rule in Indonesia." *Cultural Anthropology*, 14 (3), (1999): 295-322.
- LIPI dan TAF. *Jalan untuk Komunitas: Membangun Infrastruktur Konektivitas Jalan untuk Penghidupan OAP dan Lingkungan Hidup (Laporan hasil penelitian Dampak Infrastruktur terhadap Kehidupan dan Penghidupan OAP)*. Jakarta: LIPI dan TAF, 2018.
- Loen, Timothy. "INFOGRAFIS: Peta Kerawanan Pemilu 2019." *CNN Indonesia*. 15 Desember 2018. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181214205357-35-353814/infografis-peta-kerawanan-pemilu-2019>

- MacLeod, J. "Pathway to Dialogue in Papua: Diplomacy, Armed Struggle or Non Violence Resistance?" dalam *Comprehending West Papua* eds. Peter King et.al. Sydney: Sydney Center for Peace and Conflict Studies, University of Sydney, 2012.
- Maiese, Michelle. "Dialogue." *Beyond Intractability*, September 2003. <https://www.beyondintractability.org/essay/dialogue>
- Mansoben, Johsz R. "Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya, Indonesia: Studi Perbandingan." Disertasi Doktoral, Leiden University and the Indonesian Institute of Sciences, 2014.
- Maubak, F. "Ritual Bakar Batu sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Horizontal pada Masyarakat Adat Suku Dani di Timika Papua." Disertasi Doktoral Program Studi Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2009.
- Mawel, Benny. "Indonesia Terus Memaksa Orang Papua Menyangkal Identitasnya Sebagai Orang Melanesia." *Tabloid Jubi*, 1 Mei 2020. <https://jubi.co.id/indonesia-terus-memaksa-orang-papua-menyangkal-identitasnya-sebagai-orang-melanesia/>
- McGibbon, Rodd. *Plural Society in Peril: Migration, Economic Change, and the Papua Conflict*. Wasington D.C.: East-West Center, 2004. <https://www.jstor.org/stable/resrep06523>
- \_\_\_\_\_. "Secessionist Challenges in Aceh and Papua: Is Special Autonomy the Solution?" *East-West Center-Wasington, Policy Studies* 10 (2004).
- \_\_\_\_\_. *Pitfalls of Papua: Understanding the Conflict and its Place in Australia-Indonesia Relations*. New South Wales: Lowy Institute for International Policy, 2006.
- Meckstroth, Christopher. *The Struggle for Democracy: Paradoxes of Progress and the Politics of Change*. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Merton, R. K. *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press, 1968.
- Meteray, Bernarda. *Nasionalisme Ganda Orang Papua*.

- Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2012.
- Miller, Rory. *ConCom: Conflict Communication a New Paradigm in Conscious Communication*. Wolfeboro: YMAA Publication Centre, 2015.
- Mitchel, Christopher. "Problem Solving Exercises and Theories of Conflict Resolution." Dalam *Conflict Resolution Theories and Practice: Integration and Application*, Sandole dan Hugo Van Der Merwe eds. Manchester: Manchester University Press, 1993.
- Müller, K. *Indonesian New Guinea: West Papua/ Irian Jaya*. Singapore: Periplus, 2001.
- Munro, Jenny. "Now we know shame': Malu and Stigma among Highlanders in the Papuan Diaspora." Dalam *From 'Stone-Age' to 'Real-Time': Exploring Papuan Temporalities, Mobilities, and Religiosities*, eds. Martin Slama dan Jenny Munro. Canberra: Australian National University Press, 2015.
- Mus, Aliong, Bupati Kepulauan Taliabu. "Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal di Pulau Taliabu: Potensi dan Aktualisasinya bagi Pembangunan Daerah." *Jurnal ETNOHISTORI*, Vol. 2, No. 1 (2016).
- Narda, Rahel. "Kemendikbud Terus Lakukan Evaluasi Pendidikan Jarak Jauh." *Detik.com*, 2 Mei 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5000123/kemendikbud-terus-lakukan-evaluasi-pendidikan-jarak-jauh>
- Narokobi, Bernard dan Henry Olela. *The Melanesian Way*, ed. Henry Olela. Boroko: Papua New Guinea, 1980.
- Olson Jr., Mancur. *The Economics of the Wartime Shortage*. Durham, N.C.: Duke University Press, 1968.
- P2Politik-LIPI. *Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua*. eds. Cahyo Pamungkas dan Suma Riella Rusdiarti. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Pamungkas, Cahyo. "Papua Islam dan Otonomi Khusus: Kontestasi Identitas di Kalangan Orang Papua." Tesis Magister Sosiologi FISIP UI, Depok, 2008.

- \_\_\_\_\_. "Building Social Resilience on Asmat People: Social and Cultural Perspective." *Kapata Arkeologi* 14, no. 1 (2018): 111-122.
- \_\_\_\_\_. "Can Infrastructure Bring Peace to West Papua." *Dipresentasikan dalam International Peace Research Association Conference*, Ahmedabad, Hyderabad India, 14-18 November 2018.
- Pasaribu, K. *Noken dan Konflik Pemilu: Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua*. Jakarta: Perludem, 2016.
- Peyon, A. Ibrahim. *Manusia Papua Negroid: Ras dan Ilmu dalam Teori Antropologi*. Jakarta: Kelompok Studi Nirentohon, 2012.
- Piketty, Thomas. *Capital in the Twenty-first Century*. Cambridge: Harvard University Press, 2014.
- Pusaka. *Setahun Moratorium: Mendesak Negara, Memulihkan Hak Masyarakat, Laporan Pusaka 2019*. Jakarta: Yayasan Pusaka, 2019.
- Putra, Erik Purnama. "Ras Melanesia di Indonesia Mencapai 13 Juta Jiwa." *Republika*, 29 Oktober 2019. <https://republika.co.id/berita/nwz2q3334/ras-melanesia-di-indonesia-mencapai-13-juta-jiwa>
- Ramezanzadeh, Abdollah. *Internal and International Dimension of Ethnic Conflict: The Case of Iran*. Leuven: Catholic University of Leuven, 1995.
- Raweyai, Yorrys. "Mengapa Papua ingin Merdeka." Dalam *Laporan Akhir Kajian Resolusi Permasalahan Papua dari aspek Politik, Hukum, dan Pemerintahan*. Yogyakarta: Depdagri dan S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM, 2002.
- Regnskogforet. *Lembar Fakta: Deforestasi Papua dari Masa ke Masa*. Rainforest Foundation, 2019. [fwi.or.id/wp-content/uploads/2019/01/Factsheet-deforestasi-papua.pdf](http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2019/01/Factsheet-deforestasi-papua.pdf)
- Resosudarmo, B. et al, "Development in Papua After Special Autonomy," dalam *Regional Dynamics in a Decentralized Indonesia*. ed. Hal Hill. Singapore: ISEAS, 2014.

- Riggs, F. W. "Modernity and Bureaucracy." *Public Administration Review*, Vol.57 No.4, Wiley (Jul-Aug, 1997).
- Rizzo, Suzanna Grazia. "From Paradise Lost to Promised Land: Christianity and the Rise of West Papua Nationalism." Disertasi Doktor Universitas Wollongong, 2004. [www.uow.edu.au](http://www.uow.edu.au).
- Ross, March. "The Cultural Dynamics of Ethnic Conflict." Dalam *Culture in World Politics*, eds. Andrew Oros, Marco Verweij, dan Dominique Jacquin-Berdal. London: Palgrave Macmillan, 1998.
- Roth, D. "Many Governors, No Province." Dalam *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Soeharto Indonesia*, eds. H. S. Nordholt dan G. A. van Klinken. Leiden: KITLV Press, 2007.
- Ruhyanto, A. "The Perils of Prosperity Approach in Papua," *Peace Review*, 28:4 (2016).
- Rumansara, Enos H. "Transformasi Upacara Adat Papua: Wor dalam Lingkaran Hidup Orang Biak." *Humaniora*, Volume 15, no 2 (Juni 2003), 212. <https://doi.org/10.22146/jh.789>
- Rutherford, Danilyn. *Laughing at Leviathan: Sovereignty and Audience in West Papua*. Chicago: University of Chicago Press, 2012.
- Safa'at, Muchamad Ali. "Problem Otonomi Khusus Papua." Dalam *Oase Gagasan Papua Damai Waa...Waa...Waa...* Jakarta: Imparsial Press, 2012.
- Saidah, Nur. "Dampak Kebijakan Raskin Terhadap Pola Konsumsi Pangan Pokok Lokal di Papua." Tesis Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, 2014. <http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/69046/1/2014nsa.pdf>
- Savitri, Laksmi A. "State Actor Brokerage in Large-scale Agricultural Investment in Indonesia." *Dipresentasikan dalam konferensi internasional Land Grabbing, Conflict and Agrarian-Environmental Transformations: Perspectives from East and Southeast Asia*, Chiang Mai University, Thailand, 5-6 Juni 2015. [https://www.iss.nl/sites/corporate/files/CMCP\\_77-Savitri.pdf](https://www.iss.nl/sites/corporate/files/CMCP_77-Savitri.pdf).
- Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan

- Ciptaan Fransiskan Papua (SKPKC). "Rekam Jejak, Perjuangan Mama-Mama Pedagang Asli Papua untuk Mendapatkan Pasar di Tengah Kota Jayapura." SKPKC, Seri Memoria Passionis No. 23 (2011).
- Setiyawan, Arief. "Situasi Sosial Politik di Papua: "Akibat Api dalam Sekam" Gubug Bambu." Juli 2010. <http://djoglongarep.blogspot.co.id/2010/07/situasi-sosial-politik-di-papua-ibarat.html#>.
- Simpson, Brad. "Power, Politics, and Primitivism: West Papua's Struggle for Self-Determination" *Critical Asian Studies*, Vol. 35: 3 (2003): 469-475. <https://doi.org/10.1080/1467271032000109944>.
- Sinaga, R. *Masa Kuasa Belanda di Papua 1898-1962*. Depok: Komunitas Bambu, 2013.
- Singh, Bilveer. *Papua: Geopolitics and the Quest for Nationhood*. London: Transaction Publishers, 2008.
- Siregar, Latifah Anum, dkk., eds. "Bab III Pendekatan Dialog, Pendekatan yang Humanis." Dalam *Menuju Papua Tanah Damai: Perspektif Non-Papua*. Jayapura: AIDP, JDP, Tifa, 2013.
- Situmorang, Mangadar. "Mewujudkan Dialog untuk Pnyelesaian Konflik Papua: Persoalan Sosial Ekonomi." Dalam *Oase Gagasan Papua Damai*. Jakarta: Imparsial Press, 2017.
- Slama, Martin dan Jenny Munro eds. *From 'Stone-Age' to 'Real-Time': Exploring Papuan Temporalities, Mobilities, and Religiosities*. Canberra: Australian National University Press, 2015.
- Snanfi, F. L. et.al., "Politik Identitas Etnik Asli Papua Berkontestasi dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sorong," *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 20, No. 2 (Juli 2018): 122 – 131.
- Soejono, R. P. "Prasejarah Irian Jaya." Dalam *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk*, eds. Koentjaraningrat, dkk. Jakarta: Djambatan, 1994.
- Stasch, Rupert. "From Primitive Other to Papuan Self: Korowai Engagement with Ideologies of Unequal Human Worth in Encounters with Tourists, State Officials and Education." Dalam *From 'Stone-Age' to 'Real-Time': Exploring Papuan Temporalities, Mobilities,*

- and Religiosities*, eds. Martin Slama dan Jenny Munro. Canberra: Australian National University Press, 2015.
- Strathern, A. "Violence and political change in Papua New Guinea." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Politics, tradition and change in the Pacific 149, no: 4 (1993): 718-736.
- Strelan, John dan Jan. A. Godschalk. *Kargoisme di Melanesia: Suatu Studi tentang Sejarah dan Teologi Kultus Kargo*. Jayapura: Pusat Studi Irian Jaya, 1989.
- Sugandi, Yulia. *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*. Frederich Ebert Stiftung: Jakarta, 2008.
- Surjadi, Harry dan Angel Manembu. "Arti Tanah bagi Orang Papua." *Kompas*, 25 September 1995. <http://www.sastrapapua.com/2017/02/arti-tanah-bagi-suku-amungme.html>
- Sutaarga, M. Amir dan Koentjaraningrat. "Kebinekaan Ras Penduduk Irian Jaya." Dalam *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk (Seri Etnografi Indonesia 5)*, eds. Koentjaraningrat dkk. Jakarta: PT Penerbit Djambatan, 1963.
- Sutaarga, M. Amir. "Tjiri-Tjiri Antropologi Fisik dari Penduduk Pribumi." Dalam *Penduduk Irian Barat (Projek Penelitian UI No. CII)*, eds. Koentjaraningrat dan Harsja W. Bakhtiar, dkk. Jakarta: PT Penerbitan Universitas, 1963.
- Tebay, Neles. *Dialog Jakarta - Papua: Sebuah Perspektif Papua*. Jayapura: SKPKC Jayapura, 2009.
- \_\_\_\_\_. "Epilog Dialog Jakarta-Papua Demi Perdamaian." Dalam *Oase Gagasan Papua Damai: Waa... Waa... Waa...*, Forum Akademisi Papua Damai ed. Jakarta: Imparsial, 2012.
- \_\_\_\_\_. "Makna Integrasi dengan Indonesia Menurut Orang Papua: Sebuah Perspektif Antropologi Kebudayaan." *Dipresentasikan dalam Seminar Integrasi Sosial-Ekonomi, Sosial-Budaya, dan Sosial-Politik*, oleh Tim Kajian Papua LIPI, 14 Desember 2014.
- Theofany, Selma. "Cukup Sudah Hentikan Kekerasan di Papua." *Kompas.com*, 22 Agustus 2019. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/22/160655965/cukup-sudah-hentikan->

kekerasan-di-papua

- Tidwell, Alan C. *Conflict Resolved? A Critical Assesment of Conflict Resolution. Continuum*, New York. 1998.
- Tim Kajian Papua LIPI. Press Release Dialog Nasional: *Alternatif Penyelesaian Masalah Papua*. Jakarta: LIPI, 2016.
- Tim Prioritas Nasional Papua-LIPI. *Policy Paper Strategi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak untuk OAP di Papua Barat*. Jakarta: Kedeputan IPSK-LIPI, 2019.
- Tim Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keusukupan Jayapura. *Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi: Dasar Menangani Konflik di Papua*. Jayapura: SKPKC, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Sehat itu Sa Pu Hak, Pemetaan Sistem Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua*. Jayapura: SKPKC, 2008.
- Timmer, Jaap. "Decentralization and Elite Politics in Papua." *Paper diskusi pada Research School of Pacific and Asian Studies*, Australia National University (ANU), 2005.
- \_\_\_\_\_. "Erring Decentralization and Elite Politics in Papua." Dalam *Renegotiating Boundaries: Local Politics in post-Suharto Indonesia*, eds. H. Schulte Nordholt dan G. van Klinken. Leiden: KITLV Press, 2007.
- Turner, M. et al. *Decentralisation in Indonesia: Redesigning the State*. Canberra: Asia Pacific Press, 2003.
- Turua, Unung, Setia Hadi, Bambang Juanda, dan Endah Murniningtyas. "Ekologi dan Budaya Petani Asli Papua dalam Usaha TNI di Kabupaten Kerom." *Sosiohumaniora*, Volume 16 No. 3 (November 2014): 234-241.
- Twikromo, Y. Argo. *Pemulung Jalanan Yogyakarta: Konstruksi Marginalitas dan Perjuangan Hidup dalam Budaya-Budaya Dominan*. Yogyakarta: Media Pesindo, 1999.
- Utas, K. ed. *African Conflict and Informal Power: Big Men and Networks*. New York: Zed Books, 2012.
- Viartasiwi, Nino. "Autonomy and Decentralization as



- Remedies? Counterinsurgency Tactics for the West Papua Conflict in Democratic Indonesia." *The Institute of International Relations and Area Studies (IIRAS)*, 27-1 (June 2014).
- Visser, Liontine ed. *Governing New Guinea: An Oral history of Papuan Administrators, 1950-1990*. Leiden: KITLV Press, 2012.
- Weisband, Edward ed. *Poverty Amidst Plenty: World Political Economy and Distributive of Justice*. Colorado and London: Westview Press Boulder, 1989.
- Widjojo, Muridan S. "Etnonasionalisme Papua Dalam Era Demokratisasi" dalam *Nasionalisme, Demokratisasi, dan Sentimen Primordial di Indonesia: Problematika Etnisitas versus Keindonesiaan (Studi Kasus Aceh, Papua, Riau dan Bali)* ed. Firman Noor. Jakarta: LIPI Press, 2008.
- \_\_\_\_\_. "Cross-Cultural Alliance-Making and Local Resistance in Maluku during the Revolt of Prince Nuku, c. 1780-1810." Disertasi Doktoral TANAP (Towards A New Age of Partnership), IGEER, Department of History, Faculty of Arts, Leiden University, 2007.
- \_\_\_\_\_. ed. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerjasama dengan KITLV, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Pemberontakan Nuku: Persekutuan Lintas Budaya di Maluku-Papua Sekitar 1780-1810*. Depok: Komunitas Bambu, 2013.
- Wing, J. dan P. King. *Genocide in West Papua? The Role of the Indonesian State Apparatus and a Current Needs Assessment of the Papuan People*. Sydney: CPACS University of Sydney, 2005.
- Wiryono, Singgih. "Masa Kelam Koteka Era Orba, Warga Papua Dirazia dan Dipaksa Pakai Celana Pendek." *Kompas.com*, 21 Januari 2020. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/22/05350091/masa-kelam-koteka-era-orba-warga-papua-dirazia-dan-dipaksa-pakai-celana>
- Yeimo, Hengky. "West Papua mekar di persimpangan "Jalan Melanesia"." *Tabloid Jubi*, 31 Oktober 2019. <https://jubi.co.id/>

west-papua-mekar-di-persimpangan-jalan-melanesia/

Zuniga, Ximena, Gretche E. Lopez, dan Kristie A. Ford. *Intergroup Dialogue: Engagging Difference, Social Identity, and Social Justice*. Oxfordshire: Routledge, 2014.

### **Data Wawancara:**

Diskusi tertutup tim peneliti dengan beberapa staf SKPKJ, di sekretariat SKPKJ Jayapura Januari 2020.

Pamungkas, Cahyo & Sudira, Nyoman, wawancara BK, pada 17 Januari 2020.

Pamungkas, Cahyo & Sudira, Nyoman, wawancara dengan AK, Guru SMA, di Jayapura, 17 Januari 2020.

Pamungkas, Cahyo & Sudira, Nyoman, wawancara dengan ER, Dosen Uncen, di Jayapura, 15 Januari 2020.

Pamungkas, Cahyo & Sudira, Nyoman, wawancara dengan FA, tokoh adat, di Jayapura, 16 Januari 2020.

Pamungkas, Cahyo & Sudira, Nyoman, wawancara dengan Leonard Imbiri, tokoh adat, di Jayapura, 18 Januari 2020.

Pamungkas, Cahyo & Sudira, Nyoman, wawancara dengan PK, mantan anggota DPR RO, di Jayapura, 17 Januari 2020.

Pamungkas, Cahyo & Sudira, Nyoman, wawancara dengan PR, Dosen Uncen, di Jayapura, 17 Januari 2020.

Pamungkas, Cahyo & Sudira, Nyoman, wawancara dengan SW, Aktivist Gereja di Timika, 30 Januari 2020.

Pamungkas, Cahyo & Sudira, Nyoman, wawancara dengan VT, Dosen Uncen, di Jayapura, 15 Januari 2020.

Pamungkas, Cahyo & Sudira, Nyoman, wawancara dengan YL, Aktivist HAM, di Jayapura, 18 Januari 2020.

Pernyataan Pater Neles Tebay dalam siaran persnya di kampus STFT Fajar Timur, 23 Agustus, 2017.

Wawancara daring dengan seorang guru di Papua, April 2020.

- Wawancara dengan cendekiawan Universitas Cendrawasih Jayapura, Januari 2020.
- Wawancara dengan Fadhal Alhamid, Aktivistis Gerakan Mahasiswa Era Orde Baru dan Ketua II DAP, April 2020.
- Wawancara dengan Frangky Samperante tanggal 3 Mei 2020.
- Wawancara dengan La Hardin, Yayasan Ilalang, Mei 2020.
- Wawancara dengan Rasella Melinda seorang tokoh yang melakukan advokasi dengan masyarakat adat di Bouven Digoel, Mei 2020.
- Wawancara dengan Sekretaris Umum DAP Abepura, Januari 2020.
- Wawancara dengan seorang Ketua DAP, Abepura, Januari 2020.
- Wawancara dengan Servo Tuamis, Ketua Dewan Adat Keerom, Juli 2019.
- Wawancara dengan Thaha Alhamid, 28 Februari 2017.
- Wawancara dengan Tokoh Papua Damai, Oktober 2019, Jakarta.
- Wawancara tim Papua dengan Ketua DAP, April 2020.
- Wawancara tim Papua dengan Tokoh Masyarakat Maret, 2020.



## FORUM AKADEMISI UNTUK PAPUA DAMAI

FORUM Akademisi Untuk Papua Damai dibentuk pada tanggal 11 Agustus 2011 di Jakarta, yang diinisiasi oleh sejumlah akademisi dan Imparsial.

### Visi

“Terwujudnya perdamaian di tanah Papua”

### Misi

1. Melakukan kajian-kajian untuk kepentingan perdamaian di Papua.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan informasi dan gagasan untuk Papua damai.
3. Memperluas dan memperkuat dukungan berbagai pihak untuk mendorong proses resolusi konflik di Papua secara damai.

### Anggota Forum

1. Prof. Dr. H. Arfin Hamid, S.H., M.H (Universitas Hasanuddin)
2. Prof. Dr. Purwo Santoso, M.A., Ph.D (Universitas Gajah Mada)
3. Dr. Mangadar Situmorang (Universitas Parahyangan)
4. Dr. I Nyoman Sudira (Universitas Parahyangan)
5. Dr. M. Ali Safaat (Universitas Brawijaya)
6. Dr. Rahayu, S.H., M. Hum (Universitas Diponegoro)
7. Dr. Otto Syamsuddin Ishak (Universitas Syiah Kuala)
8. Dr. Antie Solaiman, M.A (Universitas Kristen Indonesia)
9. Ir. Sahat Marojahan Doloksaribu, M.Ing (Universitas Kristen Indonesia)
10. Dr. R. Herlambang Perdana W, S.H., M.A (Universitas Airlangga)

11. Dr. Phil. Shiskha Prabawaningtyas (Universitas Paramadina)
12. Dr. Edwin Martua Bangun Tambunan, S.IP., M.Si. (Universitas Pelita Harapan)
13. Dr. Anton Aliabbas, M.Si., MDM (Universitas Paramadina)
14. Dr. Ngesti D. Prasetyo, S.H., M.Hum. (Universitas Brawijaya)
15. Dr. Aditya Batara Gunawan, S.Sos, M.Litt (Universitas Bakrie)
16. Dr. Bhatara Ibnu Reza, SH., M.Si., LL.M (Universitas Pelita Harapan)
17. Dr. Cahyo Pamungkas S.E., M.Si. (LIPI)
18. Dr. Bakhrul Khair Amal, M.Si (Universitas Negeri Medan)
19. Dr. Bernarda Meteray (Universitas Cenderawasih)
20. Sholehudin A.Aziz, MA (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)
21. Munafrizal Manan, S.Sos, M.Si (Universitas Al-Azhar Jakarta)
22. Vince Tebay, S.Sos, M. Si (Universitas Cenderawasih)
23. Amiruddin al Rahab, S.S, M.Si (LIPI)
24. Al Araf, SH, MDM, (Universitas Paramadina)
25. Elvira Rumkabu, S.Ip, M.st (Universitas Cenderawasih)
26. Muktiono, SH., M.Phil. (Univesitas Brawijaya)
27. Majda El Muhtaj M.Hum. (Universitas Negeri Medan)

## PACEDEPES

PUSAT Kajian Demokrasi dan Perdamaian UNPAR atau *Parahyangan Centre for Democracy and Peace Studies* (PACEDEPES) nantinya akan beraktivitas dengan melakukan kajian, merancang, dan mempublikasi temuan kajian demokrasi dan perdamaian dengan terlibat secara aktif dalam proses penguatan demokratisasi dan perdamaian di Indonesia, dengan berdasar pada sesanti UNPAR "*Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti*," yaitu berdasarkan Ketuhanan menuntut ilmu untuk dibaktikan kepada masyarakat. Pusat kajian ini akan menjalankan fungsinya untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan internal UNPAR. Selain itu, pusat kajian ini juga melakukan berbagai pengembangan media pelatihan, baik dalam bentuk langsung, cetak, maupun elektronik, terkait dengan demokrasi dan perdamaian.

## **IMPARSIAL** *(the Indonesian Human Rights Monitor)*

IMPARSIAL didirikan oleh 18 orang pekerja hak-hak asasi manusia Indonesia, antara lain: T. Mulya Lubis, Karlina Leksono, M.M. Billah, Wardah Hafidz, Hendardi, Nursyahbani Katjasungkana, [Alm.] Ade Rostina Sitompul, Robertus Robet, Binny Buchory, Kamala Chandrakirana, [Alm.] H.S. Dillon, [Alm.] Munir, Rachland Nashidik, Rusdi Marpaung, Otto Syamsuddin Ishak, Nezar Patria, Amiruddin, dan Poengky Indarti. Para pendiri berbagi *concern* yang sama: kekuasaan negara dengan kecenderungan praktik-praktik represifnya menunjukkan kecenderungan menguat di Indonesia saat ini. Tepat di seberangnya, lembaga-lembaga masyarakat yang bekerja dalam bidang promosi dan perlindungan hak-hak asasi manusia justru menunjukkan kecenderungan melemah.

Imparsial diambil dari kata *impartiality*: pandangan yang memuliakan kesetaraan hak setiap individu –dalam keberagaman latarnya– terhadap keadilan, dengan perhatian khusus terhadap mereka yang kurang beruntung (*the less fortunate*). Kami menerjemahkan *impartiality* sebagai mandat untuk membela setiap korban pelanggaran hak-hak asasi manusia tanpa membedakan asal-usul sosialnya, jenis kelamin, etnisitas atau ras, maupun keyakinan politik dan agamanya.

Visi Imparsial adalah menjadi wadah bagi masyarakat sipil Indonesia dalam mempromosikan *civil liberties*, memperjuangkan *fundamental freedom*, melawan diskriminasi,



mengupayakan keadilan bagi para korban dan menegakkan pertanggungjawaban. Sedangkan Misi Imparsial adalah: *pertama*, memonitor dan menyelidiki pelanggaran hak-hak asasi manusia, mengumumkannya kepada publik, memaksa pelakunya bertanggungjawab, dan menuntut pemegang kekuasaan negara memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak warga serta mengakhiri praktik kekuasaan yang jahat.

*Kedua*, menggalang solidaritas di antara sesama warga dan menghimpun sokongan internasional demi mendorong pemegang kekuasaan negara tunduk pada hukum internasional hak-hak asasi manusia.

*Ketiga*, meneliti keadaan-keadaan sosial yang dibutuhkan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia dan merekomendasikan perubahan-perubahan dalam kebijakan negara serta mengawasi implementasinya.

## PEMBANGUNAN, MARGINALISASI, DAN DISINTEGRASI PAPUA

Terus berulangnya kerusuhan yang terjadi di Papua hingga menyebabkan kerusakan infrastruktur bahkan korban luka dan hilangnya nyawa warga sipil dan juga aparat keamanan menunjukkan bahwa integritas dan keutuhan NKRI sedang diuji dengan level yang sangat berat. Penjelasan yang diberikan pengambil keputusan di Jakarta bahwa kerusuhan yang terjadi merupakan akibat dari provokasi yang dilakukan oleh pemimpin kelompok pro-kemerdekaan yang berdomisili di luar negeri dengan perintah untuk melakukan kerusuhan di kota dan memerintahkan Orang Asli Papua (OAP) untuk melakukan penyerangan terhadap penduduk pendatang, nampaknya hanya bisa diterima oleh logika pendekatan keamanan.

Dari kajian konflik dan perdamaian, pola penanganan masalah dengan cara eksekutif dan koersif melalui pendekatan kekerasan disertai pelimpahan kesalahan pada provokator, tentu tidak akan menyelesaikan persoalan. Sementara marginalisasi mengakibatkan OAP mengalami frustrasi karena dalam waktu bersamaan mengambil segala kesejahteraan yang mereka miliki. Gagalnya pembangunan ekonomi di Papua pada akhirnya mengantarkan OAP ke dalam kondisi dimana mereka harus menghadapi kenyataan yang jauh dengan apa yang mereka harapkan. Harapan akan datangnya kesejahteraan tapi yang terjadi justru pemiskinan, harapan menjadi tuan di tanah sendiri malah justru menghadapi kenyataan terpinggirkan dan didominasi oleh masyarakat pendatang.

Melalui penelitian ini Forum Akademisi Papua Damai berusaha menjelaskan keterkaitan isu marginalisasi yang dialami OAP dengan semakin menguatnya eskalasi kekerasan dan gerakan separatis.